Rekam Jejak

10 Tahun Masa Bakti
Bupati Amin Said Husni

BRK
Bondowoso
Republik Kopi

Rekam Jejak

10 Tahun Masa Bakti Bupati Amin Said Husni

Mengangkat martabat Bondowoso dari Kota Pensium menjadi Kota Kampiun

Hari Ini Harus *Lebih Baik* dari Kemarin

RASA syukur saya ungkapkan kepada Allah Swt atas terbitnya karya dokumentatif ini. Buku ini disusun bukan sekedar sebagai catatan perjalanan pemerintahan daerah dalam sepuluh tahun terakhir. Lebih dari itu, buku ini merupakan kodifikasi ilmiah atas gagasan-gagasan cemerlang serta semangat dedikasi yang telah dielaborasi oleh seluruh jajaran pemerintah daerah bersama saya sebagai Bupati Bondowoso selama dua periode, yakni 2008-2013 dan 2013-2018.

Buku ini lantas turut membuktikan betapa Kabupaten Bondowoso sejatinya adalah daerah yang kaya akan potensi, baik dari segi sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Sederet prestasi dan penghargaan atas keberhasilan pembangunan daerah di berbagai sektor yang telah diraih kemudian dicatat dalam buku ini adalah bukti autentik akan berlimpahnya kekayaan daerah ini. Jutaan mata dari berbagai belahan dunia kini mulai terbelalak melihat wajah Bondowoso yang konon sejak dulu adalah kota terbelakang, bahkan pensiun.

Selama usia kehidupan terus berjalan, angin perubahan akan senantiasa meniupkan pergantian zaman. Belum lama menjabat sebagai Bupati Bondowoso, saya merasakan adanya angin perubahan yang bertiup ke arah kemajuan dari suatu diskusi kecil saya dengan beberapa kepala OPD pada akhir 2008. Diskusi kecil tersebut menghasilkan keputusan akan menggarap bidang pertanian sebagai kekuatan utama pemabngunan daerah. Hal ini sesuai dengan kondisi alam Bondowoso yang agraris. Selain itu, lebih dari 60 persen masyarakat Bondowoso mendapatkan penghidupan dari berkah pertanian.

Bersama para pimpinan OPD itu pun saya kemudian mencetuskan Gerakan Bondowoso Pertanian Organik (Botanik). Belum lama program Botanik berjalan, peguatan Klaster Kopi Rakyat menyusul sebagai program unggulan yang menjadi garapan. Penyelenggaraa kedua program unggulan tersebut disertai dengan pembenahan di bidang tata kelola dan reormasi birokrasi. Bersama para pimpinan OPD, saya berupaya menanamkan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah.

Berkat komitmen serta kebersamaan kita semua, Kabupaten Bondwoso lantas berhasil menyabet banyak prestasi dan penghargaan yang membanggakan di berbagai bidang pembangunan daerah. Di bidang tata kelola pemerintahan dan reformsi birokrasi, Kabupaten Bondowoso menadapatkan penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selama lima kali, penghargaan SAKIP dengan prdikat BB pada 2017, dan penghargaan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Renaksi PPK) pada 2018.

INOVATOR; Bupati Bondowoso, Drs. H. Amin Said Husni menikmati secangkir kopi khas Bondowoso. *(Foto/dokumen)*

Di bidang pengelolaan sumber daya alam yang meliputi pertanian, perkebunan, peternakan, dan pariwisata, Kabupaten Bondowoso telah banyak mendulang penghargaan bergengsi. Keberhasilan program Gerakan Bondowoso Pertanian Organik (Botanik), pengembangan Kopi Rakyat Arabika Ijen-Raung dan program Bondowoso Republik Kopi (BRK), serta eksplorasi sektor pariwisata

SENTRAL KOPI; Bupati Amin Said Husni memetik buah kopi di perkebunan kopi Bondowoso. *(Foto/dokumen)*

telah mengharumkan nama Bondowoso dalam kancah nasional dan internasional. Demikian halnya dengan pembangunan daerah di bidang pelayanan dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang juga banyak menuai keberhasilan dan penghargaan. Tidak ketinggalan pula keberhasilan di bidang sosial-keagamaan berupa terobosan atau program-program inovatif yang juga menuai banyak apresiasi.

Tentunya, upaya pembangunan daerah melalui program-program inovatif dan akseleratif dilakukan bukan untuk sekedar apresiasi atau prestasi, tapi semata-mata untuk memajukan Kabupaten Bondowoso yang membawa banyak kemaslahatan bagi kehidupan masyarakat. Keseberhasilan yang telah kita raih bersama itu pun masih belum sampai pada titik kesempurnaan. Terdapat banyak hal yang perlu dibenahi sekaligus terus ditingkatkan. Ketidaksempurnaan itu tidak lepas dari keterbatasan saya sebagai manusia biasa, termasuk batasan sepuluh tahun yang terasa sangat singkat untuk menunaikan serta menyempurnakan pengabdian. Oleh karena itu, saya menyatakan permohonan maaf kepada seluruh jajaran pemerintah daerah dan masyarakat Bondowoso atas keterbatasan ini.

Segores pengabdian dan setitik keberhasilan itu semoga dapat berguna sebagai anak tangga untuk mengejar keberhasilan yang lebih tinggi. Dalam hal ini, begitu besar harapan saya kepada para pemimpin Bondowoso di masa-masa yang akan datang untuk terus melanjutkan dan mengembangkan ide-ide cemerlang serta program-program inovatif pembangunan daerah yang telah terlaksana. Sebab, hari ini harus lebih baik dari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Begitulah spirit pembangunan yang harus selalu kita jiwai sekaligus jalani, baik dalam konteks kehidupan pribadi maupun kehidupan berbangsa dan bernegara.

Seluruh elemen warga Bondowoso harus memiliki keyakinan dan tekad yang kuat untuk terus melangkah bersama mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Bondowoso dari masa ke masa. Sebab, tanpa sinergitas dan soliditas seluruh elemen, sebuah visi

pembangunan daerah hanyalah utopia kemajuan. Demikian halnya dengan visi Pemerintah Kabupaten Bondowoso selama sepuluh tahun kepemimpinan saya sebagai Bupati, yakni terwujudnya masyarakat Bondowoso yang beriman, berdaya, dan bermartabat secara berkelanjutan, yang tidak mungkin terwujud tanpa keterlibatan semua pihak, termasuk peran aktif masyarakat.

Alhasil, saya mengungkapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setingi-tingginya kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, masyarakat, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelengaraan pembangunan Kabupaten Bondowoso. Ungkapan dan penghargaan yang sama juga saya berikan kepada tim penulis yang dikoordinatori oleh Mohammad Syaeful Bahar serta seluruh pihak yang telah memberikn sumbangsih terhadap penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat menjadi referensi pengetahuan bagi siapa saja yang berkomitmen untuk memajukan Kabupaten Bondowoso. Selamat membaca.

Bupati Bondowoso,
Drs. H. Amin Sain Husni.

KEAGAMAAN; Bupati Bondowoso, pada acara pembukaan Festival Muharram Bondowoso. *(Foto/dokumen)*

Bondowoso Kini Lebih "Hidup"

KETIKA pertama kali di sodorkan tugas menulis buku ini, kami segenap tim penulis langsung mendiskusikan gaya penulisan yang akan kami sajikan. Bukan apa, karena karena gaya tulisan akan mempengaruhi daya tarik buku ini kepada pembaca.

Ada dua gaya atau style penulisan yang selanjutnya kami perinci *(breakdown)*. *Pertama*, gaya penulisan yang menekankan kepada kekuatan narasi dan elaborasi data. Model penulisan seperti ini umumnya menitik beratkan kepada interpretasi bahan data, sehingga data menjadi lebih hidup. Pada gaya ini, format tulisan akan sedikit gemuk oleh rangkaian narasi panjang dalam rangka mengkomunikasikan data kepada pembaca.

Kelamahannya, gaya tulisan semacam ini kadang dianggap membosankan, dan konon hanya sedikit orang yang mau membacanya dengan sabar.

Karena itu, gaya tulisan kedua selanjutnya kami pertimbangkan. Yaitu model penulisan yang tidak terlalu 'basa-basi', data cenderung disajikan sekadarnya, dengan kekuatan yang diletakkan pada desain perwajahan *(layout design)*. Gambar menjadi amunisi utama dalam model ini untuk membetot pembaca.

Pada prosesnya, kami tidak mau terjebak kepada dikotomi dua gaya tersebut. Praktiknya, senyampang bermanfaat, kedua model kami pandang bisa dikompromikan sehingga bisa dipergunakan bersama-sama. Eklektis, demikianlah kami menyebut gaya penulisan buku ini. Elaborasi data tetap penting, agar tulisan menjadi hidup. Sebaliknya, gambar tetap menjadi pendekatan yang efektif

untuk mengatasi kebosanan pembaca bergelut dengan baris-baris tulisan yang berbanjar-banjar. Jadilah buku buah dari diskusi tersebut, seperti yang ada di tangan pembaca ini.

Buku ini kami sadari jauh dari sempurna. Ada banyak lubang yang perlu ditambal, karena itu saran dan masukan para pembaca begitu penting untuk menutupi lubang tersebut.

Terlepas dari kekurangsempurnaan buku ini, kami meyakini tidak akan mengecilkan torehan prestasi Bupati Amin Said Husni dalam membawa nafas segar perubahan bagi Bondowoso Republik Kopi. Karena, setiap sejarah selalu diisi oleh para pelaku sejarah *(history maker)* yang akan selalu diingat setiap generasi.

Orang bijak mengakatan*"the history of the world is the biography of the great man"*, maka sejarah inovasi Bondowoso adalah kisah tentang kerja keras dan dedikasi Bupati Amin Said Husni. Dengan pengalaman dan kapasitas intelektual yang dimiliki, Bupati Amin Said Husni berhasil menginisiasi pelbagai program inovatif yang telah mengubah wajah Bondowoso menjadi lebih optimis, dinamis dan eksotis, pendek kata, Bondowoso yang lebih 'hidup'.

Tentu beliau tidak sendirian. Beliau memiliki tim kerja yang juga berkerja secara profesional sejalan dengan ritme, gaya serta visi dan misi kepemimpinan yang diusung oleh beliau. Maka wajah Bondowoso saat ini adalah buah dari kolektivitas, soliditas serta totalitas tim yang mendedikasikan diri untuk kepentingan Kabupaten Bondowoso.

Untuk seluruh tim penyusun yang telah bekerja keras menuntaskan penulisan buku ini dalam proses yang tidak mudah, saya sampaikan terima kasih. Semoga karya kita ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang ingin mengenal metamorfosa Bondowoso secara lebih dekat. Tentu, bagi kami buku ini adalah kopian dari wajah indah Bondowoso. Karena itu, singgahlah untuk mengetahui bagaimana keindahan Bondowoso yang asli.

INOVASI; Adaptasi teknologi adalah kunci keberhasilan pembangunan saat ini. *(Foto/dokumen)*

Ucapan terima kasih kami haturkan kepada Bupati Bondowoso Amin Said Husni yang telah memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada kami untuk menyusun buku ini. Kami juga menyampaikan terimakasih atas kerjasama para pihak yang berkontribusi besar atas rampungnya buku ini, secara khusus kepada Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bondowoso, dan segenap para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bondowoso. Serta terimakasih kepada seluruh pihak yang karena keterbatasan ruang ini, kami tidak bisa menyebutkan satu persatu.

Akhirnya, tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah semata. Selamat membaca!

Tabik,

Syaeful Bahar, dkk.

Daftar Isi

Pengantar ii

Hari ini Harus Lebih Baik dari Kemarin

Prakata vi

Bondowoso Kini Lebih "Hidup"

Profil Kabupaten Bondowoso 1

Pendahuluan 2

Bondowoso Lebih Berdaya dan Bermartabat

VISI MISI 10

Konsistensi Meraih Opini WTP 11
Akselerasi Prestasi SAKIP 19
Birokrasi Bebas Korupsi 27
Revolusi Pertanian Organik 33
Kopi Itu Inspirasi 47
Akselerasi Peternakan Modern 63
Gugusan Gerakan Pendidikan 71
Gugusan Gerakan Kesehatan 95
Merawat Kohesi Sosial 107
Berangsur-angsur Tingkatkan Infrastruktur 127
Eksotika Pariwisata Kita 147
Festival Desa Nusantara 169
Optimasisasi Pemerataan Akses Listrik 175
Merawat Produk Unggulan Daerah 179

Salam Penutup 190
Membangun dengan Totalitas

Tentang Pak Bupati 191

KABUPATEN BONDOWOSO

Nama Kabupaten : Bondowoso
Provinsi : Jawa Timur
Negara : Indonesia
Populasi (2016) : 765.094 jiwa
Letak Geografis : 7"50'10"-7"56'41" lintang selatan dan 113"48'10"-113"48'26" bujur timur
Wilayah perbatasan : Situbondo (sebelah barat dan utara), Banyuwangi (sebelah timur), Jember (sebelah selatan)
Luas Wilayah : 1.560, 10 Km2
Wilayah administrative : 23 Kecamatan, 209 desa dan 10 kelurahan
Bupati saat ini : Drs. Amin Said Husni (2008-2013/2013-sekarang)
Landmark : Bondowoso Republik Kopi

Bondowoso
Lebih Berdaya dan Bermartabat

SATU dekade yang lalu, orang mungkin hanya mengenal Bondowoso dengan *trademark*-nya 'Kota Tape'. Di luar itu, tertinggal, miskin, terisolir dan mati, adalah ragam atribut yang lebih sering disematkan kepada daerah ini. Namun, Bondowoso kiwari, adalah Bondowoso yang sudah banyak berubah. Bondowoso yang kompetitif dengan segenap pencapaian positifnya, adalah wajah Bondowoso kini.

Sekian lama Bondowoso dikenal sebagai daerah yang kurang beruntung dari sisi kepemilikan sumber daya alam. Secara geografis, Bondowoso memang cukup terisolir. Di samping itu, Bondowoso juga menjadi sedikit dari daerah yang tidak memiliki sumber daya alam laut.

Ironisnya, keterbatasan ini menjadi narasi yang terus direproduksi. Seolah Bondowoso ditakdirkan menjadi kota 'mati'. Padahal, tidak ada daerah yang benar-benar miskin. Selalu terdapat potensi unggulan yang jika dikelola dengan baik akan menghasilkan suatu manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat.

Persoalannya, siapkah masyarakat Bondowoso merevisi narasi keterbatasan yang terus direproduksi itu? Pertanyaan ini tidak perlu dijawab. Karena apapun alasannya, jawabannya tetap harus satu ' mereka harus siap merevisinya'. Kesiapan untuk keluar dari bayang-bayang keterbatasan itu wajib hukumnya jika masyarakat ingin mengubah wajah Bondowoso menjadi lebih cerah.

Keterbatasan dan segala ekspresi pesimisme lainnya adalah konstruksi subjektif masyarakat Bondowoso. Entah masyarakat Bondowoso sendiri yang memulainya atau orang lain, yang jelas merekapun menerimanya sebagai sesuatu yang apa adanya *(taken for granted)*.

Padahal sebagai konstruksi sosial, narasi keterbatasan Bondowoso lahir dari subjektivitas yang ironisnya diobjektivasi seolah benar adanya. Konsekuensinya luar biasa, sekeras apapun usaha yang dilakukan, narasi keterbatasan Bondowoso selalu mereduksinya. Mereka dipaksa pesimis untuk sadar diri akan keterbatasan Bondowoso.

Maka merevisi narasi itu penting untuk memberikan sandaran optimisme dalam membangun Bondowoso. Tak ayal, kehadiran seorang pemimpin yang mampu menanamkan optimisme menjadi penting. Seorang pemimpin yang optimis selalu jeli melihat peluang di tengah tantangan, keluasan di tengah kesempitan, berkah di tengah bencana *(blessing in disguise)* dan keberhasilan di tengah keterbatasan.

Sebab sejatinya tidak ada daerah yang miskin. Semua daerah memilki potensi sumber daya yang menjadi karakteristiknya masing-masing. Meminjam konsep Peter Ferdinand Drucker (1909-2005), yang menciptakan perbedaan adalah kemampuan untuk mengelola secara baik *(well managed)* serta memimpin secara efektif. Manajemen berkualitas dan kepemimpinan efektif inilah yang diperlukan oleh semua daerah dan negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya, termasuk Bondowoso.

Selama dua periode memimpin Bondowoso (2008-2013/2013-2018), Bupati Amin Said Husni, tanpa menafikan berbagai ikhtiar positif pemerintahan sebelumnya, sepertinya berhasil mengisi kekosongan *(fill the gap)* kepemimpinan efektif dan manajemen pemerintahan yang berkualitas. Kepemimpinan yang visionir, progersif inovatif dan *out of the box*, begitu kental mewarnai perjalanan Amin Said Husni menahkodai pemerintahan Bondowoso.

PARALAYANG; Sensasi olahraga Paralayang di tengah hamparan keindahan alam Kawah Wurung. *(Foto/dokumen)*

Memang demikianlah pemimpin yang dibutuhkan setiap daerah. Khususnya di era otonomi daerah seperti saat ini. Desentralisasi sebagaimana menjadi elemen utama Otoda, menuntut kemandirian setiap daerah untuk mengelola daerah beserta segenap potensi yang terkandung di dalamnya untuk kesejahteraan rakyat, baik secara politik (desentralisasi politik), administratif (desentarlisasi administratif) maupun fiskal (desentralisasi fiskal). Desentralisasi merupakan antitesa dari sistem pemerintahan sentralistik yang dikritik karena menyebabkan disparitas kesejahteraan setiap daerah semakin lebar.

Di Indonesia, meski asas desentralisasi sejatinya telah lama dikenal, namun semakin mengkristal sejak ditetapkannya kebijakan otomoni daerah melalui Undang-undang nomer 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, serta Undang-undang nomer 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Terdapat garis merah *(red line)* yang menjadi titik damarkasi wawenang pemerintah pusat dan daerah yang diatur secara tegas. Dengan model seperti ini, maka setiap daerah harus membangun inisiatifnya secara mandiri, mengeksplorasi kekayaan daerahnya secara mandiri, dan mengupayakan kemajuan daerah secara mandiri.

Kompetisi antar daerah menjadi tak terhindarkan di era otonomi daerah. Konsekuensinya, daya saing harus ditingkatkan. Pemimpin yang memiliki kemampuan *leadership* dan *management* mumpuni akan sangat menentukan daya saing masing-masing daerah.

Peningkatan daya saing ini penting, karena berhubungan dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap daerah yang menyadari peran utamanya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, tidak bisa mengabaikan peningkatan daya saing daerah (Ananda, 2018:87)

Daya saing inilah yang terus digenjot oleh Bondowoso sejauh ini. Upaya ini terus dilakukan dengan konsisten oleh Amin Said Husni yang dengan kapabilitasnya, berhasil memoles wajah Bondowoso menjadi seperti saat ini.

Sekilas tentang Bondowoso

SECARA gerografis, Bondowoso berada di dataran tinggi dengan rata-rata ketinggian setinggi kurang lebih 253 meter dari atas pemukaan laut. Luas wilayah kabuapaten Bondowoso mengambil porsi 3.26 % dari total luas wilayah Provinsi Jawa Timur, atau seluas 1.560,10 KM^2 (BPS, 2017).

Seluruh luas wilayah Bondowoso terdiri dari daratan yang terbagi-bagi ke dalam kawasan pegunungan dan perbukitan, dataran tinggi dan dataran rendah. Hal ini menjadikan Bondowoso sebagai satu-satunya kabupaten di Jawa Timur yang tidak memiliki lautan.

Secara administratif, Kabupaten Bondowoso terdiri dari 23 kecamatan, 209 desa serta 10 kelurahan. Hingga saat ini, berawal sejak Kabupaten Bondowoso yang secara administratif terpisah dari Besuki, telah terjadi 31 kali suksesi pemerintahan. Ronggo Mas Ngabehi Kerto Negoro atau juga dikenal dengan nama Raden Bagus Asra, adalah bupati pertama Bondowoso yang memerintah pada tahun 1819-1830.

Sejak era otonomi daerah pada tahun 2001 silam, telah berlangsung 4 (empat) kali suksesi pemerintahan yang dipimpin oleh dua orang bupati dengan masing-masing menjabat selama dua periode, yakni Bupati Mashoud, M.Si., (1998-2003/2003-2008) serta Bupati Amin Said Husni pada periode 2008-2013 serta berlanjut pada periode 2013-2018.

Kondisi geografis suatu wilayah sangat mempengaruhi struktur sosial suatu masyarakat. Demikian juga bagi masyarakat Bondowoso. Secara sosiologis, masyarakat Bondowoso adalah masyarakat agraris. Mereka menggantungkan aktivitas perekonomiannya sebagian besar di bidang pertanian. Ketergantungan pada sektor ekonomi ini terkait erat dengan fakta geografis wilayah Bondowoso yang keseluruhannya berupa daratan.

Sebagai masyarakat agraris, kehidupan masyarakat Bondowoso sangat dipengaruhi oleh sistem ekologi sawah. Dalam masyarakat dengan system ekologi sawah, pemukiman penduduk cukup padat dengan topografi pemukiman yang tampak seperti ‘ pulau di tengah lautan ladang-ladang padi’; berbeda dengan sistem ekologi ladang di luar Jawa maupun ekologi tegal di Madura (Kuntowijoyo, 2017:61).

Struktur pemukinan yang terintegrasi ini menjadikan masyarakat Bondowoso sebagai masyarakat yang memiliki ikatan kekerabatan yang cukup dekat antara satu dengan yang lain. Dengan demikian "struktur utama masyarakat Bondowoso lebih dominan warna pedesaann-mya ketimbang warna urbannya" (Harnadi, 2016).

Dalam masyarakat pedesaan *(rural community)*, hubungan sosial antar masyarakat ditandai oleh ikatan sosial yang sangat erat. Di antara mereka tercipta satu hubungan kekeluargaan yang kental. Dan yang terpenting, mereka dicirikan oleh dominannya sektor pertanian sebagai mata pencaharian (Soekanto, 2001:136).

Karakteristik pedesaan masyarakat Bondowoso juga tampak dalam keeratannya memegang nilai-nilai tradisional. Termasuk di dalamnya adalah penempatan figur tertentu yang dipandang kharismatik sebagai patron sosial. Dalam hal ini, para kiai adalah patron sosial yang dipercaya memiliki, mengikuti Weber (1968), otoritas karismatik dan karenanya dihormati oleh masyarakat Bondowoso. Dalam relasinya, masyarakat Bondowoso mengidentifikasi diri sebagai komunitas santri yang meletakkan penghormatan tinggi terhadap figur kiai.

Masyarakat Bondowoso pada dasarnya tidak memiliki identitas kebudayaan tunggal. Karena itulah, meski masyarakat Bondowoso sebagian besar berbahasa Madura, tidak sepenuhnya mencerminkan kultur masyarakat Madura.

Seperti Jember dan Situbondo, masyarakat Bondowoso adalah masyarakat *Pandalungan*, yang terbentuk oleh perpaduan budaya Jawa dan Madura (Sutarto, 2006). Soal budaya mana yang lebih dominan di antara keduanya, para akademisi masih berselisih mengenainya. Namun, sebagian percaya bahwa preferensi budaya masyarakat Bondowoso lebih condong didominasi oleh kultur Madura.

Hal ini tampak dalam penggunaan bahasa Madura yang lebih dominan digunakan ketimbang bahasa Jawa. Dari sisi pemakaian bahasa Madura ini, standard dialek yang digunakan lebih bercorak Pamekasan-Sumenep. Terutama untuk masyarakat yang tinggal di wilayah Bondowoso bagian timur dan utara (Marsudin, 2015).

Kuatnya kultur agraris masyarakat Bondowoso dengan segenap atribut bawaannya, cukup mempengaruhi konsep dan tantangan pembangunan pemerintahan daerah. Pemimpin Bondowoso tidak hanya menghadapi tantangan pengelolaan sumber daya alam. Tantangan lain adalah mengubah pola pikir *(mindset)* masyarakat agar lebih terbuka menerima agenda kemajuan serta berbagai inovasi pembangunan.

TURBA; Mengunjungi hamparan luas perkebunan kopi. *(Foto/dokumen)*

Membaca Bondowoso di Bawah Amin Said Husni

Alam Bondowoso sepintas mungkin tampak tak sekaya beberapa daerah tetangga. Ketiadaan sumber daya alam laut menjadi salah satu keterbatasan Bondowoso. Demikian juga Bondowoso yang tidak dilalui jalur lalu lintas perekonomian kawasan pantai utara sebagai denyut nadi perekonomian pulau Jawa, juga merupakan keterbatasan.

Namun setiap daerah tidak ada yang tidak memiliki keterbatasan. Semua memiliki keterbatasan. Intinya adalah bagaimana para pemimpin di suatu daerah tidak dibebani berbagai keterbatasan dengan fokus memperkuat potensi sumber daya alam yang tersedia. Kata Roy Bennett *"Focus on your strengths not your weaknesses"*.

Dalam memimpin Bondowoso, fokus kepada keunggulan potensial daerah ini yang diterapkan oleh Amin Said Husni selama sepuluh tahun. Di tengah keterbatasannya, Bondowoso juga kaya akan sumber daya yang memiliki prospek cerah bagi agenda mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebutlah misalnya perkebunan kopi, pertanian, serta beragam keunikan alam dengan panorama indah adalah beberapa di antara banyak keunggulan alam di Bondowoso.

Pelbagai potensi tersebut sejauh ini berhasil dieksplorasi menjadi satu dasar pembangunan perekonomian daerah. Semua tentu tidak bisa dilepaskan dari kejelian menangkap peluang kemudian mengeksekusinya secara efektif. Pendek kata, Amin Said Husni berhasil menerapkan prinsip kepemimpinan efektif dalam pembangunan Bondowoso.

Kepemimpinan efektif adalah konsep kepemimpinan yang digagas oleh Peter Ferdinand Drucker. Titik tekan *(stressing point)* dari kepemimpinan efektif adalah kemampuan merumuskan dan menjalankan kebijakan yang tepat *(get the right things done)*.

Kebijakan yang tepat lahir dari sebuah kejelian dan ketepataan membaca peluang dan kekuatan sendiri serta memanfaatkannya semaksimal mungkin. Dalam kepemimpinan efektif, seorang pemimpin dituntut untuk berfikir 'tidak biasa' atau *out of the box*. Melakukan apa yang banyak orang abaikan adalah elemen penting dari kepemimpinan efektif (Drucker, 2018).

Dulu perkebunan kopi di Bondowoso sebatas dilihat sebagai aktivitas perekonomian sampingan. Namun dengan berfikir tidak biasa, Amin Said Husni memanfaatkan perkebunan kopi menjadi *landmark* daerah yang multi efek *(multiple effect)*. Bondowoso Republik Kopi menjadi fenomena baru saat ini.

PRAKTEK; Amin Said Husni sedang menyangrai kopi dalam sebuah kegiatan. *(Foto/dokumen)*

Kawah Wurung sebelumnya juga orang lihat sekadar perbukitan luas yang ditumbuhi rerumputan. Tidak banyak yang bisa menangkap sisi lain bahwa di dalamnya terkandung potensi wisata alam yang mengesankan. Dan Ra Amin adalah sedikit di antara yang berhasil menangkap sisi lain yang terlewatkan dari Kawah Wurung tersebut. Maka di bawah kepemimpinan Ra Amin, Bondowoso sukses meluncurkan wisata baru Kawah Wurung yang menyedot perhatian dan kunjungan para wisatawan.

Secara keseluruhan, peletakan konsep pembangunan daerah yang mulai memberikan porsi besar kepada sektor periwisata berbasis kekayaan alam daerah adalah produk pemikiran Bupati Bondowoso yang jeli dan efektif.

Apakah Bupati Amin Said Husni melaksanakan prinsip-prinsip kepemimpinan efektif? Harus diakui, untuk tidak mengatakan secara keseluruhan, prinsip-prinsip kepemimpinan efektif sudah diterapkan oleh Bupati Amin Said Husni.

Mengikuti rumus Peter Drucker, terdapat beberapa prinsip kepemimpinan efektif. Yaitu, pengelolaan waktu, pemilihan potensi yang bisa berkontribusi terhadap daerah, pengetahuan tentang di mana dan bagaimana memobilisasi kekuatan daerah untuk menghasilkan dampak terbaik, pengaturan prioritas yang tepat serta merajutnya bersama-sama dengan pengambilan kebijakan yang efektif (Drucker, 2018).

Menyaksikan Bondowoso di bawah kepemimpinan Bupati Amin Said Husni sama seperti menyaksikan episode kesinambungan eksibisi kebijakan pemerintahan yang inovatif. Ya, Bondowoso sarat dengan program-program inovatif yang mewarnai kepemimpinan Bupati Amin. Dicanangkannya beberapa program mercusuar daerah di pelbagai sektor seperti Bondowoso Republik Kopi, Bondowoso Pertanian Organik (Botanik), pariwisata dan pendidikan karakter, menunjukkan kekuatan inovasi Bondowoso.

Inovasi adalah jawaban bagi daerah yang memiliki keterbatasan alam seperti Bondowoso. Melalui berbagai inovasi yang dikembangkan, Bondowoso cukup berhasil melewati keterbatasan yang dimilikinya dengan membangun landasan perekonomian yang berpijak di atas sektor unggulan yang tidak banyak dimiliki daerah lain.

Segenap inovasi yang dicanangkan di Bondowoso lahir dari kepemimpinan inovatif yang dijalankan oleh bupati. Kepemimpinan inovatif *(innovation leadership)* terang-

kai dari dua komponen utama. *Pertama* pendekatan inovatif terhadap kepemimpinan. *Kedua*, kepemimpinan untuk inovasi (Horth & Buchner, 2014).

Komponen pertama menyangkut kemampuan untuk memimpin secara berbeda dengan kepemipinan kovensional melalui penerapan pelbagai gagasan dan kebijakan baru. Pemimpin inovatif harus melihat setiap peran yang dimiliki, serta tantangan yang dihadapi dengan kacamata baru. Sementara komponon kedua berkaitan dengan kemampuan seorang pemimpin menghidupkan iklim yang kondusif terhadap diterimanya pemikiran-pemikiran inovatif dalam konteks pembangunan.

Inovasi sepertinya menjadi aspek inherent dalam pemerintahan Bondowoso di bawah kepemimpinan Bupati Amin Said Husni. Semua bertitik pijak di atas visi misi pembangunan Bondowoso yang memang sarat inovasi dan di luar *mainstream*.

Visi terciptanya masyarakat Bondowoso yang beriman, berdaya dan bermartabat tidak hanya unik secara artikulatif. Namun memiliki substansi yang sangat kuat. Dari trilogi visi inilah seabrek prestasi daerah berhasil diraih. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih *(good governance)*, peningkatan kualitas *human development index* (HDI) atau indeks pembangunan manusia (IPM), penanggulangan kemiskinan, pengembangan sektor pariwisata, pertanian dan perkebunan , serta pengentasan Bondowoso dari status tertinggal adalah buah dari implementasi trilogi visi bupati tersebut.

Memang tidak semuanya sempurna. Kaedah yurisprudensi Islam menyatakan, jika sesuatu telah sempurna, maka tampaklah kekurangannya (*Idza dhaqa al-amru ittasa'a*). Kekurangan ini, di tengah perbagai torehan manis yang diraih, juga masih terlihat dalam sepuluh tahun perjalanan Amin Said Husni membangun Bondowoso.

Namun satu hal yang pasti, Amin Said Husni telah meninggalkan *legacy* sistem yang positif. Berbagai capaian bergengsi pemerintahan Bondowoso menunjukkan reputasi Amin Said Husni sebagai pemimpin yang benar-benar bekerja. Amin Said Husni tidak hanya memimpin. Tetapi juga memastikan bahwa kepemimpinannya berjalan efektif.

KEMUDAHAN; Pelayanan administrasi perijinan yang mudah menjadi perhatian khusus pemerintah Bondowoso. *(Foto/dokumen)*

Visi

"TERWUJUDNYA MASYARAKAT BONDOWOSO YANG BERIMAN, BERDAYA, DAN BERMARTABAT SECARA BERKELANJUTAN"

Misi

- Melanjutkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, berakhlak mulia, kreatif, inovatif dan bermartabat.
- Melanjutkan peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kebutuhan dasar rakyat serta penanggulangan kemiskinan secara berkesinambungan.
- Melanjutkan akselerasi kebangkitan ekonomi yang didukung optimalisasi potensi pertanian dan pariwisata yang berdaya saing tinggi, kemitraan strategis, dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.
- Melanjutkan tata kelola pemerintahan yang aspiratif, partisipatif, jujur dan amanah serta didukung birokrasi yang reformatif.
- Mewujudkan masyarakat yang responsif gender, menjunjung tinggi HAM serta penegakan hukum.
- Melanjutkan peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan penataan ruang dan kelestarian lingkungan hidup

Konsistensi
Meraih Opini WTP

SUDAH sejak lama, Kabupaten Bondowoso dikenal oleh banyak orang dengan *trademark*-nya sebagai Kota Tape. Entah bagaimana dan sejak kapan Kota Tape dilekatkan sebagai *trademark* kabupaten bermonumen Gerbong Maut ini. Jelasnya, pengenalan jamak orang terhadap Bondowoso sebagai Kota Tape sudah mengakar kuat dan menjadi *mainstream* yang nyaris tidak mungkin dihapuskan, ibarat rasa asam-manis yang melekat (aksidensi) pada tape itu sendiri.

Sepintas, tidak ada persoalan dengan cap atau "merek dagang" Kota Tape tersebut. Sebab, tape memang merupakan salah satu produk unggulan daerah dan makanan khas Kabupaten Bondowoso sejak zaman dulu. Namun ironisnya, cap tersebut kerap kali diucapkan dengan nada peyoratif, baik oleh warga daerah yang kurang bangga dengan produk lokal maupun orang-orang luar daerah yang menginferiorisasi Kabupaten Bondowoso. Predikat sebagai Kota Tape pun akhirnya dipandang kurang bergengsi dan tidak mengandung nilai *branding* yang prestisius.

Akan tetapi siapa sangka, Kabupaten Bondowoso yang terkesan inferior dengan predikat Kota Tape, dikenal sebagai daerah yang masih berkembang, belum maju, dan nyaris divonis sebagai kota pensiun, dalam satu dekade terakhir telah bangkit menjadi

TRANSPARANSI; Pelaksanaan prinsip *good governance* membuat Kabupaten Bondowoso istiqamah meraih opini WTP dari BPK RI. *(Foto/dokumen)*

suatu daerah yang memiliki banyak torehan prestasi gemilang yang membanggakan. Dalam hal ini, raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak enam kali adalah keberhasilan pertama yang tercatat dalam daftar prestasi Kabupaten Bondowoso. Prestasi dalam bidang reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) ini diraih atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Bondowoso tahun 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, dan 2017.

Prestasi opini WTP tersebut merupakan hasil dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia terhadap LKPD dalam suatu periode

akuntansi. Dalam hal ini, LKPD Pemerintah Kabupaten Bondowoso berbuah opini WTP dari BPK karena memenuhi kualifikasi atau sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) tersebut disebutkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menysusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (pasal 1 ayat 3). Dalam penerapan SAP, pasal 4 ayat 1 dan 2 PP tersebut kemudian menegaskan bahwa pemerintah harus menerapkan SAP berbasis akrual yang dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). Terkait hal ini, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD (pasal 1 ayat 4).

Pemerintah Kabupaten Bondowoso merupakan salah satu pemerintah daerah yang telah (berhasil) melaksnakan kebijakan SAP berbasis akrual tersebut. Keberhasilan ini berangkat dari proses penerapan SAP berbasis akrual yang dirancang secara cermat, tepat, dan akurat. Dalam hal ini, Kepala Inspektorat Kabupaten Bondowoso Wahyudi Triadmaji menjelaskan bahwa keberhasilan Kabupaten Bondowoso meraih opini WTP sebanyak enam kali itu (pada 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, dan 2017) adalah buah dari penyusunan LKPD selama enam periode akuntasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni PP Nomor 71 tahun 2010 tentang SAP dan Permendagri Nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah serta aturan atau petunjuk-petunjuk teknis turunannya.

Senada dengan keterangan Wahyudi Triadmaji di atas, suatu penelitian pun menjelaskan terdapat enam komponen yang sangat diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso, di bawah pimpinan Bupati Amin Said Husni, sehingga LKPD Kabupaten Bondowoso mendapatkan opini WTP sebanyak lima kali. Keenam komponen tersebut ialah sistem pembukuan dan perencanaan anggaran, sistem aplikasi teknologi komputer (IT *related*), inventarisasi aset dan utang, jadwal penyusunan laporan keuangan dan pemeriksaan serta pertanggungjawaban anggaran, *quality assurance* oleh pengawas intern, dan sumber daya manusia (Heny Setyawati, 2017).

BERSIH; Didampingi Ketua DPRD, Bupati Bondowoso menerima laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan dari BPK RI 2017. *(Foto/dokumen)*

Sebagai suatu apresiasi, pemerintah pusat memberikan penghargaan kepada setiap kabupaten/kota atau daerah yang berhasil menyabet opini WTP berupa Dana Insentif Daerah (DID). Kabupetan Bondowoso menjadi salah satu daerah yang menerima penghargaan dari pemerintah pusat tersebut. "Pemerintah kabupaten Bondowoso telah mendapatkan DID dari pemerintah pusat atas keberhasilan meraih opini WTP sebanyak lima kali, terang Wahyudi Triadmaji yang akrab disapa Pak Inspektur itu.

Penggunaan DID pun dapat direalisasikan untuk kepentingan pembengunan infrastruktur atau sarana-prasarana daerah. Terkit hal ini, Pak Inspektur menambahkan bahwa salah satu infrastruktur yang dibangun dengan DID ialah gedung kompleks Education Development Center (EDC) yang terletak di wilayah Kota Kulon Bondowoso.

Penentu Keberhasilan

Sudah menjadi hukum kehidupan (*sunnatullah*) bahwa tidak ada keberhasilan yang diraih secara cuma-cuma, tanpa ikhtiar. Kesuksesan yang dicapai oleh Kabupaten Bondowoso ini pun berkat ikhtiar semua pihak terkait dari level atas hingga bawah dan sudah sesuai dengan kadar usaha yang telah dijalankan.

Berdasarkan data atau informasi yang dihimpun oleh Tim Penulis dari berbagai nara sumber, perlu dikemukakan dua hal strategis yang menjadi penentu keberhasilan Kabupaten Bondowoso dalam menyabet opini WTP. *Pertama*, sosok Bupati Bondowoso Amin Said Husni serta jajaran pimpinan instansi atau OPD yang berkomitmen dan berintegritas merupakan kekuatan strategis nomor wahid sebagai *determinant factor*. Kepribadian atau *persoanality* pemimpin daerah yang demiki-

an terbukti membuat semua program, kegiatan, dan kebijakan daearah, lebih-lebih program atau kegiatan yang berkorelasi langsung dengan pencapaian opini WTP, dijalankan secara *amanah* dengan berlandasakan pada asas akuntabilitas, transparansi, dan sinergitas seluruh elemen pemerintahan.

Hal itu dibenarkan oleh Pak inspektur Wahyudi dalam keterangannya kepada Tim penulis. Pak Inspektur menegaskan bahwa faktor utama dalam pencapaian opini WTP ini ialah komitmen Bupati Amin faktor dalam menerapkan prinsip *good governance*. "Prinsip dan nilai-nilai pemerintahan yang baik dan bersih ditanamkan pada setiap pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) oleh Bupati Amin secara konsisten. Sebab, hal ini (Pemerintah Daerah. red) ibarat suatu kapal besar yang hendak mencapai sutu tujuan, di mana peran sang nahkoda kapal sangat besar dalam mengendalikan kapal agar sampai ke tujuan dimaksud", tandasnya.

Suatu hasil penelitian tentang prestasi Kabupaten Bondowoso ini pun mengungkapkan bahwa komitmen pemimpin dan jajaran pimpinan instansi pemerintahan daerah menempati posisi pertama dan utama sebagai penentu keberhasialan ini. Sebagai kekuatan strategis yang utama, komitmen pimpinan daearah di tangan Bupati Amin memiliki bobot nilai tertinggi, berada jauh di atas penyajian LKPD yang sesuai SAP, sistem pengendalian internal (SIP) yang efektif dan memadai, serta penanganan tindak-lanjut rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan LKPD (Heny Setyawati, 2017).

Kedua, penerbitan dan pengamalan regulasi daerah secara konsisten. Hal ini mengingat regulasi adalah payung hukum dan panduan bagi pelaku implementasi untuk dapat mengaplikasikan perubahan sistem akuntasi dengan baik (Surepno, 2015). Oleh karena itu, dalam rangka penyusunan LKPD yang sesuai dengan SAP, Pemerintah kabupaten Bondowoso telah menerbitkan regulasi dan kebijakan SAP berbasis akrual, baik secara umum maupun teknis, dalam bentuk Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Kebijakan ini diambil sebagaimana tuntunan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, bahwa SAP pada pemerintah daerah diatur dengan peraturan gubernur/bupati/walikota yang mengacu pada pedoman umum SAP (pasal 6 ayat 3).

Demikian halnya dengan penerapan SIP yang telah diatur dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 44 tahun 2016 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Kekurangan-kekurangan yang ditemukan di sini perlu dijadikan bahan evaluasi untuk segera dibenahi, sekaligus untuk meningkatkan capaian di waktu yang akan datang.

PRESTASI; Opini WTP dari BPK RI adalah buah dari transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. *(Foto/dokumen)*

PENGHARGAAN; Drs. H. Amin Said Husni (Bupati Bondowoso) dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (H. Ahmad Dhafir) saat menerima Penghargaan WTP tahun 2017. *(Foto/dokumen)*

Kepatuhan terhadap regulasi pun ditunjukkan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso dengan komitmen dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK atas LKPD. Sebab, tindak-lanjut atas hasil pemeriksaan tahun lalu akan menjadi pertimbangan auditor dalam menentukan risiko audit (Tresnawati dan Apandi, 2016). Di samping itu, tindaklanjut terhadap temuan BPK atas LKPD merupakan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan Negara pada pasal 21 ayat 1 yang harus ditaati oleh pemerintah daerah.

Tentunya, mencandra keberhasilan Kabupaten Bondowoso sekarang, di tangan Bupati Amin Said Husni, sama sekali bukan bertendensi serta tidak berpretensi untuk menegasikan keberhasilan yang dicapai oleh pemerintah daerah terdahulu. Sebaliknya, hal ini justru merupakan sebuah optimisme dan komitmen yang harus terus dihayati dalam rangka membawa kabupaten tercinta ini ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Artinya, segala kekurangan atau kelemahan yang belum terselesaikan

bukanlah akhir perjalanan menuju perbaikan. Berbagai kekurangan dan kelemahan pun tidak boleh dipandang sebagai kegagalan yang membenarkan keputusasaan (pesimisme). Demikian pula dengan sederet keberhasilan yang telah diraih, semua itu bukanlah sesuatu yang perlu dibangga-banggakan hingga memuncak sebagai "kepuasan", apalagi sampai merasa telah mencapai kesempurnaan. Keberhasilan hari ini sejatinya merupakan etape perbaikan dari hari kemarin yang harus dijaga dengan penuh konsistensi (*istiqamah*), sekaligus sebagai modal serta cambuk untuk meraih kabaikan yang lebih tinggi di masa yang akan datang.

Senada dengan hal itu, beberapa saat setelah menerima penghargaan opini WTP yang keenam kalinya Bupati Amin menyampaikan kepada para awak media massa, bahwa semua keberhasilan yang diraih adalah hasil dari komitmen dan kerja keras seluruh jajaran Pemkab Bondowoso untuk terus berbenah dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daearah. Dengan prestasi opini WTP yang sudah diraih sebanyak enam kali tersebut, Bupati Amin Said Husni merasa bangga dan bersyukur. Rasa syukur dan bangga itu pun diungkapkannya dengan meyampaikan apresiasi kepada seluruh OPD Kabupaten Bondowoso yang telah bertekad dan bekerja keras untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah. Pasalnya, sebagai orang nomor wahid di Kabupaten Bondowoso, Amin Said Husni sangat menyadari bahwa sangat tidak mudah untuk meraih prestasi tersebut, mengingat standar atau kualifikasi yang ditentukan BPK RI sangat tinggi. Akan tetapi hal itu dapat dipenuhi dengan baik berkat kerja keras dan sinergitas bersama.

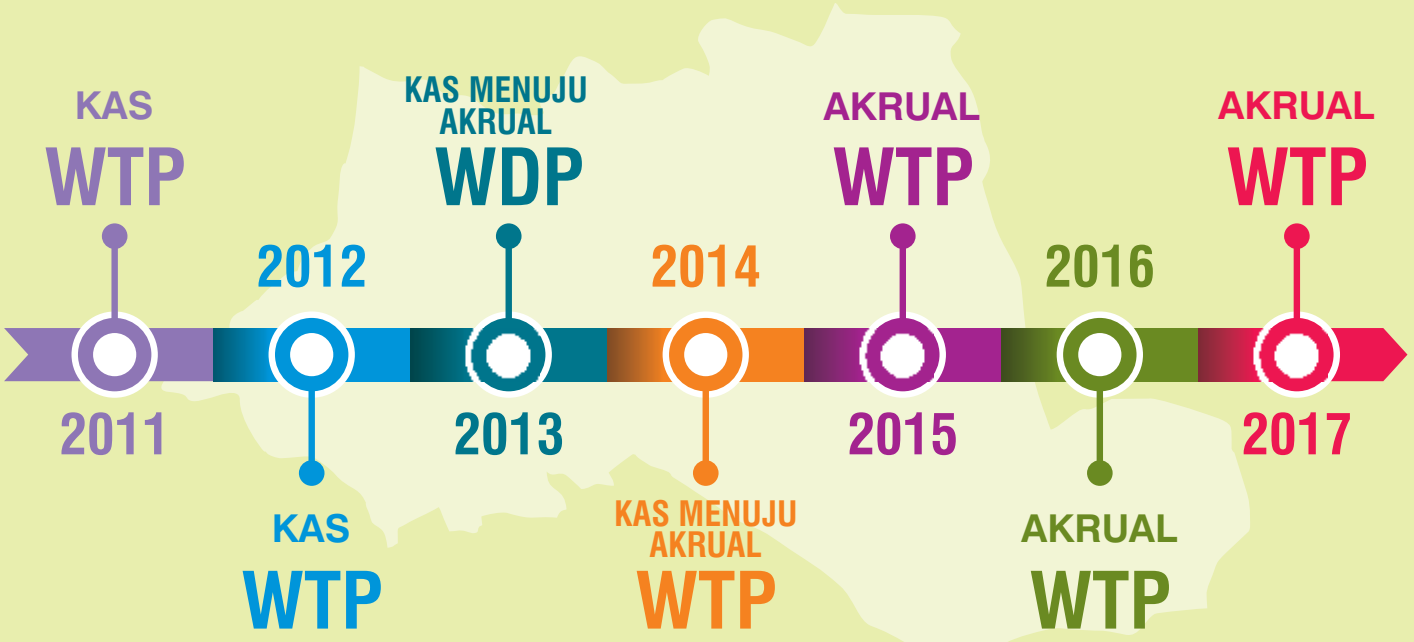

BRK
Bondowoso
Republik Kopi

Akselerasi
Prestasi SAKIP

Prestasi Kabupaten Bondowoso di bidang tata kelola pemerintahan yang patut dicatat, setelah opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP), ialah penghargaan terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Tahun 2017. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menpan RB Asman Abnur kepada Bupati Bondowoso Amin Said Husni di Denpasar Bali pada 31 Januari 2018.

BAGI kabupaten yang kini tenar dengan Bondowoso Republik Kopi (BRK) ini, kesuksesan tersebut ibarat kado tahun baru yang mengharukan. Pasalnya, baru kali ini Kabupaten Bondowoso menerima penghargaan bergengsi tersebut. Hal ini lantas membuktikan bahwa Bupati Amin Said Husni telah berhasil mengangkat mutu sistem akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah menjadi lebih baik dari yang terdahulu.

Betapa tidak, penghargaan tersebut diberikan atas capaian SAKIP Kabupaten Bondowoso yang akseleratif. Dalam hal ini, penerapan SAKIP Tahun 2016 yang memperoleh nilai CC langsung meloncat ke predikat BB untuk tahun 2017, tanpa melalui nilai B terlebih dahulu dan bahkan nyaris menembus nilai A. Capaian ini lantas menjadikan Kabupaten Bondowoso sebagai satu-satunya kabupaten di wilayah eks-karesidenan Besuki yang memperoleh predikat BB.

Tentunya capaian tersebut tidak didapatkan secara cuma-cuma, tapi dibayar dengan usaha bersama secara sinergis, utamanya para pimpinan pemerintah daerah, untuk lebih memajukan Kabupaten Bondowoso dari waktu ke waktu. Hal ini selaras dengan keterangan Bupati Amin yang disampaikan kepada para awak media massa beberapa saat setelah menerima penghargaan tersebut, bahwa keberhasilan Kabupaten Bondwoso meraih predikat BB untuk penerapan SAKIP Tahun 2017 adalah buah dari dua ikhtiar yang sudah dilakukan sejauh ini.

Pertama, pemerintah Kabupaten Bondowoso telah mengambil fokus program pembangunan daerah yang dapat mendongkrak nilai tambah produk lokal agar lebih berdaya saing serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Langkah ini pun dilakukan secara terpadu, serta lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dengan pola *cross cutting*. Terkait hal ini, salah satu terobosan yang telah dilakukan oleh pemerintah

Kabupaten Bondowoso ialah pengembangan kluster kopi rakyat yang menjadi cikal-bakal branding Bondowoso Republik Kopi (BRK) serta gerakan Bondowoso Pertanian Organik (Botanik) yang kemudian melahirkan produk pertanian Beras Organik.

Kedua, Pemerintah Kabupaten Bondowoso telah berkomitmen untuk terus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Bupati Amin pun menegaskan bahwa jajaran pimpinan daerah terus memberikan motivasi kepada OPD-OPD untuk terus berbenah meningkatkan kinerja dan sistem pemerintahan dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, sampai pelaporannya.

Terkait kedua langkah utama di atas, Kepalan Inspektorat Kabupaten Bondowoso Wahyudi Triadmaji menegaskan bahwa faktor yang mendorong diraihnyanya prestasi-prestasi tersebut ialah komitmen Bupati Amin dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance kepada setiap OPD. Dalam hal ini, menurut Wahyudi, Bupati Amin selalu mendorong seluruh pejabat pemerintahan daerah untuk bekerja secara *amanah* dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, bukan sekedar untuk meraih penghargaan dari siapa pun.

"Bupati Amin sering kali menegaskan bahwa kinerja pemerintah daerah tidak boleh didasari hanya untuk mendapatkan

LOMPATAN; Drs. H. Amin Said Husni (Bupati Bondowoso) dan Menpan RB Asman Abnur menunjukkan prestasi Sakip dengan nilai BB. *(Foto/dokumen)*

Capaian ini lantas menjadikan Kabupaten Bondowoso sebagai satu-satunya kabupaten di wilayah eks-karesidenan Besuki yang memperoleh predikat BB

penghargaan semata. Tapi lebih dari itu, kinerja pemerintah daerah harus dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Bondowoso. Inilah yang bagi Bupati Amin jauh lebih penting dan lebih bernilai dari sekedar penghargaan. Dengan begitu, OPD-OPD tidak merasa terbebani dengan program-program yang telah disusun dan ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Strategis (Renstra), tegas Wahyudi". Keterangan Pak Inspektur, sapaan akrab Wahyudi, tersebut memang selaras dengan penjelasan Bupati Amin usai menerima penghargaan SAKIP 2017, bahwa untuk meraih nilai BB, semua OPD tidak boleh lagi berorientasi pada proyek, melainkan harus mengejar hasil dan manfat yang bisa dirasakan masyarakat (TIMES Indonesia, 01/02/2018).

PENGHARGAAN; Pemerintah Kabupaten Bondowoso Saat menerima Penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dengan Predikat BB. *(Foto/dokumen)*

SAKIP dan Good Governance

DALAM Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) disebutkan bahwa SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah (pasal 1 ayat 1). Berdasarkan pengertian tersebut, penerapan SAKIP dalam instansi pemerintah bergerak dalam kerangka pertanggungjawaban (akuntabilitas) dan peningkatan kinerja.

Dalam hal ini, akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan melalui laporan kinerja yang disusun secara periodik (pasal 1 ayat 14). Laporan kinerja dimaksud terdiri dari laporan kinerja interim (triwulanan) dan laporan kinerja tahunan yang masing-masing disampaikan bersamaan dengan laporan keuangan triwulanan dan tahunan (pasal 18 sampai 20). Terkait petunjuk teknis pelaporan kinerja dimaksud diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Intansi Pemerintah.

Secara teoretis, akuntabilitas ialah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemperi amanah (*principal*) yang memiliki hak kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Dalam organisasi pemerintahan, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut (Mardiasmo, 2004: 20).

Dalam konteks ini, akuntabilitas merupakan salah satu prinsip dasar dalam konsep *good governance*. Menurut United Nations Development Program (UNDP), akuntabilitas adalah salah satu dari delapan prinsip *good governance* di samping partisipasi, taat hukum, responsif, kesetaraan, efektivitas, efisiensi, dan visi strategis. Terselenggaranya *good governance* lantas menjadi tujuan utama penerapan SAKIP (LAN dan BPKP, 2000: 13). Dengan demikian, diraihnya penghargaan SAKIP Tahun 2017 membuktikan bahwa penyelenggaraan *good governance* dalam tata kelola pemerintahan Kabupaten Bondowoso sudah berjalan dengan sangat baik (predikat BB).

Adapun pengertian kinerja, dalam Perepres tentang SAKIP tersebut, adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kualitas dan kuantitas terukur (pasal 1 ayat 2). Daefinisi tersebut kemudian dijabarkan secara teknis dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Dalam perbup tersebut, kinerja adalah unjuk kerja dan prestasi kerja yang merupakan hasil kerja yang diwujudkan dengan menjalankan suatu program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu (pasal 1 ayat 13).

Kian meningkatnya kinerja aparat pemerintah daerah inilah yang pada dasarnya menjadi lokomotif bagi keberhasilan Kabupaten Bondowoso meraih penghargaan SAKIP 2017. Adanya peningkatan kinerja aparat pemerintah daerah tersebut dapat dilihat atau dibuktikan dengan capaian kinerja yang telah ditorehkan. Pada tahun 2011, Indeks pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bondowoso menepati posisi 34 di jawa Timur dengan nilai 59,47 persen, AKB 21,18 permil, PDRB perkapita sebesar RP. 11.533.200, angka kemiskinan sebesar 17,89 persen, dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,01 persen. Pada 2017, masing-masing dari kelima persoalan tersebut dapat ditekan secara signifikan, di mana IPM mengalami kenaikan dengan nilai 64,75 persen, AKB menjadi 13,59 permil, PDRB perkapita menjadi Rp. 22.540.060, angka kemiskinan menjadi 14,54 persen, dan tingkat pengangguran terbuka menjadi 1,58 persen.

Menurut United Nations Development Program (UNDP), akuntabilitas adalah salah satu dari delapan prinsip *good governance* di samping partisipasi, taat hukum, responsif, kesetaraan, efektivitas, efisiensi, dan visi strategis.

SEREMONIAL; Acara penyerahan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah wilayah II Nusa Dua Bali 2018. *(Foto/dokumen)*

Formula Keberhasilan

KEBERHASILAN Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam mengatasi kelima isu atau persolan strategis di atas sangat ditentukan oleh adanya tindak-lanjut penyempurnaan penerapan SAKIP dalam hal perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan. Dalam hal perencanaan, perencanaan daerah/OPD yang terdahulu belum fokus karena terlalu banyak indikator yang ingin dicapai. Hal ini kemudian diarahkan atau direformulasikan menjadi perencanaan yang terfokus dan berorientasi pada kinerja dengan tingkat keberhasilan yang terukur, di antaranya, a) perencanaan pembangunan yang mengarah pada spesifikasi indikator tujuan dan sasaran strategis, b) perencanaan pembangunan yang fokus terhadap program-program prioritas dan terintegrasi, c) perencanaan pembangunan pada perangkat daerah yang terintegrasi dengan sasaran strategis pemerintah daerah, d) pimpinan OPD terlibat langsung dalam perencanaan pembangunan dengan menentukan tingkat keberhasilan kinerja pada OPD masing-masing, e) komitmen pimpinan OPD dalam mengawal perencanaan dan hasil yang hendak dicapai, dan f) perencanaan disusun dalam e-*planning*.

Dalam hal penganggaran, perubahan dilakukan terhadap pola penganggaran yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan perencanaan menjadi terintegrasi, selaras, dan berbasis kinerja. Adapun item perubahan dimaksud ialah a) pengalokasian anggran oleh pemerintah daerah berdasarkan prioritas daerah, b) pimpinan OPD memastikan penganggaran terhadap program yang berorientasi pada hasil, dan c) efisiensi program/kegiatan.

Dalam hal pengendalian, perubahan dilakukan dengan mendorong pimpinan OPD melakukan *monitoring* dan pengendalian, sehingga pimpinan OPD menilai tingkat keberhasilan suatu program/kegiatan dengan kinerja. Pengendalian tersebut berupa pengendalian secara periodik oleh pimpinan OPD terhadap kinerja level jabatan di bawahnya dan berkomitmen serta bertanggung jawab terhadap capaian kinerja.

Dalam hal pelaporan, di mana pelaporan yang masih berorientasi pada penyerapan anggaran, belum pada tingkat capaian kinerja, diperbarui menjadi pelaporan yang

berorientasi pada tingkat keberhasilan sesuai tugas yang dibebankan. Adapun item perubahan di sini meliputi, a) pengukuran kinerja pada setiap level jabatan dilakukan secara periodik dengan memperhatikan target kinerja yang direncanakan, b) evaluasi internal terhadap kesesuaian tugas dan fungsi dengan kinerja yang diemban pada masing-masing level jabatan.

Dengan penerapan formula di atas itulah, Kabupaten Bondowoso di tangan Bupati Amin Said Husni berhasil menyabet penghargaan SAKIP Tahun 2017 karena meraih nilai BB. Bupati Amin pun mengakui bahwa terdapat banyak perubahan atau perbaikan yang didapat Pemerintah Kabupaten Bondowoso setelah menerapkan SAKIP.

Sngat berbeda dengan sebelum SAKIP diterapkan, di mana tidak sedikit program atau kegiatan yang tujuan dan hasil akhirnya tidak relevan dan amburadul. Namun setelah penerapan SAKIP, program atau kegiatan yang dilaksanakan semakin terukur dan terarah. Penilaian kinerja setiap OPD pun dapat dipantau dengan baik. Berbagai manfaat dari penerapan SAKIP tersebut juga pernah dipaparkan oleh Bupati Amin kepada Tim Independen Kementrian PAN RB, termasuk keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bondowoso pada 2018 yang telah mampu mengerucutkan sekian kegiatan dan dapat melakukan penghematan anggaran sebesar Rp 166 miliar.

PENGHARGAAN; Pemerintah Kabupaten Bondowoso Saat menerima Penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dengan Predikat BB. *(Foto/dokumen)*

KINERJA (INDIKATOR UTAMA)

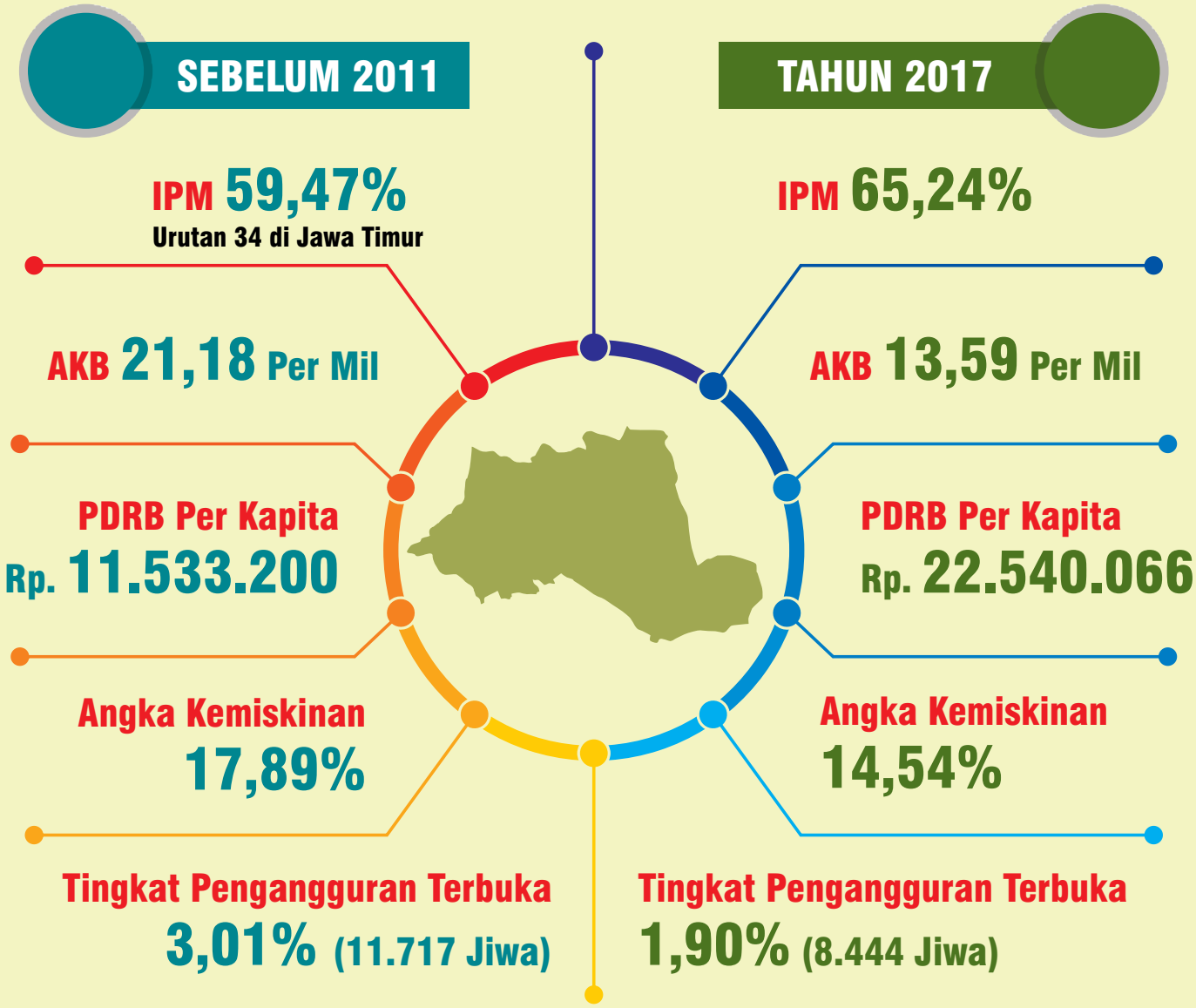

Birokrasi
Bebas Korupsi

ANTI KORUPSI; Komitmen pemerintah daerah dalam pencegahan korupsi berbuah penghargaan Aksi PPK 2017. *(Foto/dokumen)*

KABUPATEN Bondowoso kembali menyabet perestasi bergengsi yang membanggakan. Dalam forum Rapat Kordinasi dan Penandatanganan Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada 7 Maret 2018 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Gubernur Jawa Timur Pakde Karwo secara resmi memberikan penghargaan kepada Bupati Bondowoso Amin Said Husni atas komitmennya dalam mendukung program aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2017 dengan predikat nilai terbaik se Jawa Timur. Hal ini terjadi tanpa diduga-duga karena memang tidak ada pemberitahuan sebelumnya tentang raihan prestasi dan rencana pemberian penghargaan tersebut.

Dalam keterangannya kepada para awak media massa, Bupati Amin merasa sangat terharu dan bangga atas penggghargaan yang diraih tersebut. "Bagi saya, inilah penghargaan yang paling berharga di antara semua yang pernah saya terima. Betapa tidak, penghargaan tersebut dianugerahkan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso di tengah gemuruh badai operasi tangkap tangan (OTT) KPK di mana-mana" terangnya.

Diselenggarakannya Rapat Kordinasi dan Penandatanganan Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi pada 7 Maret 2018 itu adalah salah satu bentuk upaya nyata, bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara terus-menerus mendorong implementasi Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Renaksi PPK) bersama Kordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK. Terkait hal ini, Pemerintah Kabupaten Bondowoso pun menyambut upaya tersebut dengan penuh komitmen dan konsistensi. Bagi Bupati Amin, upaya tersebut merupakan pengorganisasian langkah pemberantasan korupsi secara bersama-sama dan terpadu (sinergis dan terintegrasi).

SPIP dan PIP

Untuk itu, menurut Bupati Amin, Pemerintah Kabupaten Bondowoso mewujudkan komitmen untuk mendukung program tersebut dengan serangkaian kebijakan. Pertama, memperkuat pengendalian interen pemerintah. Hal ini menyangkut sistem dan aparat pemerintah sekaligus. Karena itu, Bupati Amin senantiasa mendorong dan memperkuat peran dan fungsi Inspektorat Kabupaten Bondowoso sebagai aparat pengawasan intern pemerintah di tingkat daerah. Langkah Bupati Amin untuk memperkuat eksistensi inspektorat ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, bahwa inspektorat kabupaten/kota adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota (pasal 1 ayat 7).

Langkah yang dilakukan Bupati Amin itu pun merupakan elaborasi atas kewajibannya untuk melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Dalam PP tentang SPIP di atas ditegaskan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP (pasal 2 ayat 1 dan 2).

Inspektur Wahyudi pun menjelaskan bahwa ia selalu mendapatkan arahan dan dorongan dari Bupati Amin terkait sistem pengendalian intern pemerintah. “Bupati Amin selalu mewanti-wanti saya agar betul-betul mengefektifkan sistem pengendalian interen pemerintah (SPIP), tutur Wahyudi saat diwawancara di kantornya.

Terkait kewajiban pimpinan, PP tentang SPIP tersebut menegaskan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP salah satunya dengan penegakan integritas dan nilai etika (pasal 4). Selanjutnya, penegakan integritas dan nilai etika di sini sekurang-kurangnya dilakukan dengan lima hal yang salah satunya dilakukan dengan memberikan keteladanan tentang pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan instansi pemerintah (pasal 5 huruf b).

Keteladanan pimpinan inilah yang ternyata sangat berpengaruh terhadap penerapan SPIP di lingkungan pemerintah Kabupaten Bondowoso, khususnya keteladanan Bupati Amin dalam mengamalkan integritas dan nilai-nilai etika. Banyak pimpinan daerah atau pejabat pemerintahan Kabupaten Bondowoso yang memberikan testimoni akan keteladanan Bupati Amin dalam hal penerapan integritas dan nilai-nilai etika, salah satunya ialah Matsakur. Menurut Kepala Bappeda Kabupaten Bondowoso tersebut, Bupati Amin adalah sosok pemimpin yang berintegritas tinggi dan berakhlak baik. "Bupati Amin adalah pemimpin yang patut diteladani integritas dan etikanya. Dalam memberikan pembinaan atau pembelajaran kepada bawahannya, beliau tidak hanya memerintah tapi telah melakukan atau meneladankan terlebih adahulu", jelas Matsakur saat diwawancara di kantornya.

Keterangan Matsakur tersebut diafirmasi oleh Inspektur Wahyudi. Menurut kepala Inspektorat tersebut, keberhasilan Bupati Amin dalam menanamkan nilai-nilai etika kepada setiap pimpinan daerah atau OPD adalah keteladanan beliau yang tidak hanya menjelaskan, tapi sudah menjalankan atau mencotohkan terlebih dahulu, misalnya kewajiban bekerja secara amanah. Hal inilah yang kemudian menjadi pendorong bagi peningkatan Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Bondowoso secara signifikan.

Saat ini tingkat maturitas SPIP Pemkab Bondowoso sudah mencapai level 3 (tiga). Hal ini juga diikuti dengan peningkatan kapabilitas aparatur pengawasan interen pemerintah (APIP) secara terus menerus. Hingga kini, kapabilitas APIP Pemkab Bondowoso juga sudah mencapai level 3 (tiga). Ini berarti bahwa kemampuan dan keandalan aparat pengawasan dalam melaksanakan pengendalian interen sudah sangat baik.

Kedua, meningkatkan akuntabilitas dan transparasi pengelolaan keuangan dan aset daerah. Ini juga menyangkut sistem, aparatur, dan dukungan teknologi. Upaya perbaikan terus-menerus yang selama ini telah lakukan di semua satuan perangkat daerah atau OPD telah terbukti berhasil dengan cukup memuaskan. Dalam enam tahun terakhir, BPK telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas audit laporan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Bondowoso sebanyak enam kali. Sejak 2011 hingga 2017, nyaris tidak ada tahun tanpa WTP. Hanya pada 2013 Kabupaten Bondowoso mendapatkan Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Terkait hal ini, Kabupaten Bondowoso termasuk daerah yang berhasil menempati peringkat tertinggi dalam menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi BPK.

Ketiga, menerapkan manajemen pemerintahan berbasis kinerja (*performance based management*). Melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) yang konsisten, seluruh tahapan manajemen pemerintahan, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, harus dipastikan benar-benar berorientasi pada upaya memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi masyarakat. Berkat ketiga langkah itu, pada tahun 2018 ini hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 memperoleh nilai BB, mendekati sempurna.

Terkait hal tersebut, Bupati Amin Said Husni selalu menekankan kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Bondowoso, bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara amanah. Dalam pandangan Bupati Amin, amanah ialah kepribadian atau kompetensi melaksanakan tugas sampai tuntas dengan penuh tanggung jawab. Sikap amanah itulah yang nantinya, menurut Bupati Amin, akan membidani lahirnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Apa yang ditugaskan kepada saya itu adalah sebuah kepercayaan, dan kepercayaan itu harus dipegang benar-benar dan dilaksanakan sepenuh hati...

Drs. H. Amin Said Husni

KAGUM; Presiden kagumi beras organik Bondowoso *(Foto/dokumen)*

Revolusi Pertanian Organik

KABUPATEN Bondowoso adalah satu-satunya daerah di Tapal Kuda Jawa Timur yang tidak memiliki laut. Hal ini membuat kabupaten bermonumen Gerbong Maut ini tidak menjadi jalur lintas transportasi utama, baik jalur pantai utara (pantura) maupun pantai selatan. Fakta geografis ini lantas seakan membentuk dan membenarkan asumsi publik bahwa Kabupaten Bondowoso berada pada posisi yang tidak diuntungkan.

Dengan melihat posisi geografis yang demikian, banyak orang yang kemudian merasa pesimis ketika berbicara laju dan masa depan pembangunan Kabupaten Bondowoso. Sulit untuk dibayangkan, Kabupaten Bondowoso akan menjadi kota maju yang mengungguli beberapa kabupaten tetangga di sekitarnya. Dalam keadaan ini seakan sudah tidak ada jalan lagi untuk menuju "Roma".

AGRARIS; MoU Antara Pemerintah Kabupaten Bondowoso dengan PT Aksara Kecana Putra dan Gapoktan Al Barokah dalam rangka Ekspor Beras Organik. *(Foto/dokumen)*

Sepintas, keadaan itu memang tidak menjanjikan bagi Kabupaten Bondowoso karena tidak berada pada posisi atau jalur strategis. Namun di sini hukum alam senantiasa berlaku, bahwa masing-masing dari seluruh belahan bumi memiliki potensi unggulan yang berbeda antara satu sama lain. Dengan kata lain, tidak ada mahluk hidup (baca: manusia) yang mau berpijak di belahan bumi yang sama sekali tidak mengandung unsur-unsur kehidupan.

Anugerah Tuhan ternyata juga melimpah kepada kabupaten di Tapal Kuda yang tidak memiliki laut ini. Meski tidak dianugerahi laut dan jauh dari jalur strategis tansportasi, namun Kabupaten Bondowoso dikaruniai sebagai daerah pegunungan. Dengan kondisi geografis ini posisi Kabupaten Bondowoso berada dalam cekungan, sehingga terdapat begitu banyak sumber mata air. Adalah sumber daya (*resource*) pertanian dan perkebunan yang kemudian menjadi salah satu potensi unggulan Kabupaten Bondowoso. Dikatakan sebagai unggulan karena potensi pertanian dan perkebunan yang dikandung daerah ini begitu besar, bahkan dapat dikatakan jauh mengungguli potensi yang dimiliki beberapa kabupaten tetangga.

Dengan potensi geografis Bondowoso yang agraris, Bupati Amin Said Husni lantas berkomitmen untuk mengembangkan sektor pertanian. Sebab, tidak mungkin Kabupaten

ORGANIK; Botanik adalah salah satu inovasi Bupati Amin Said Husni di sektor pertanian. *(Foto/dokumen)*

Bondowoso menjadi daerah industri. Lebih dari 60 persen warga Bondowoso pun bekerja sebagai petani dan buruh tani. Dengan demikian, sektor pertanian merupakan wajah serta kekuatan utama daerah yang sangat menentukan terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bondowoso.

Kenyataan akan begitu potensialnya sektor pertanian Kabupaten Bondowoso ini terbukti dengan kesuksesan Gerakan Bondowoso Pertanian Organik (Botanik) yang sudah masyhur ke mana-mana. Kualitas beras organik yang merupakan produk Botanik pun telah mendapatkan pengakuan dan penghargaan bukan hanya di tingkat nasional, tapi juga di tingkat internasional. Beras organik kini telah menjadi komoditi pangan yang berkelas dunia.

Semakin tingginya permintaan masyarakat dunia akan ketersediaan beras organik Bondowoso bahkan nyaris tidak dapat dipenuhi. Pemerintah Kabupaten Bondowoso merasa harus bekerja lebih keras untuk meningkatkan produksi beras organik agar dapat memenuhi permintaan. Tantangan bagi pemerintah daerah yang terbilang tidak mudah ini diungkapkan oleh Karna Suswandi saat diwawancara di kantornya. Plt Sekretaris Daerah (Sekda) itu menuturkan bahwa permintaan atas beras organik dari mancanegara membuat pemerintah daerah merasa kewalahan. Permintaan tersebut tentu akan semakin meningkat seiring telah dikeluarkannya sertifikat internasional. Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa beras organik yang diproduksi dari sebagian besar la-

PERTANIAN; Meninjau lokasi pertanian organik. *(Foto/dokumen)*

han Botanik telah mengantongi sertifikat internasional dari Control Union Certification, Belanda.

Mutu atau kualitas beras organik yang telah diakui dunia tersebut lantas menunjukkan betapa potensi pertanian Kabupaten Bondowoso tergolong melimpah dan luar biasa. Sebab, tidak semua kabupaten/kota mampu menyabet pengakuan sekaligus penghargaan tersebut, meski kondisi alamnya mirip atau bahkan sama dengan daerah ini. Karena itu, capaian tersebut patut dijadikan cambuk oleh seluruh elemen, baik pemerintah daerah maupun masyarakat, Kabupaten Bondowoso. Semua pihak harus terus menguatkan keyakinan dan kepercayaan diri, serta meneguhkan komitmen untuk betul-betul menjadi masyarakat yang berdaya secara berkelanjutan melalui pengembangan sektor pertanian.

Sang Inisiator Gerakan

KEBERHASILAN beras organik mengantongi pengakuan sekaligus penghargaan di kancah dunia, tentu bukan berkat kualitas sumber daya pertanian Kabupaten Bondowoso yang subur dan melimpah semata. Akan tetapi keberhasilan ini diraih juga karena komitmen dan campur tangan pemerintah daerah serta para petani untuk mengeksplorasi potensi pertanian yang tersedia. Sebab seberapa pun potensi yang ada, tidak akan membawa nilai signifikansi tanpa intervesi (baca: eksplorasi) manusia.

Dalam hal ini, Gerakan Botanik adalah konfigurasi dari upaya eksplorasi dimaksud. Gerakan tersebut kemudian menempatkan Bupati Bondowoso Amin Said Husni sebagai sosok inisiator sekaligus pelopor Botanik. Pasalnya, Botanik adalah gerakan yang diinisiasi dan dielaborasi dengan penuh komitmen oleh Bupati Amin. Hal ini sebagaimana testimoni beberapa pejabat penting di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, di antaranya ialah Matsakur.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) tersebut menegaskan bahwa Gerakan Botanik adalah gagasan orisinil Bupati Amin. Lebih jauh Matsakur menceritakan secara singkat akan hal ini. “Awalnya, Bupati Amin hanya memberikan nama program ini dengan sebutan Bondowoso Pertanian Organik (Botanik) saja. Akan

tetapi, saya kemudian mengusulkan agar nama tersebut dibubuhi nama "gerakan". Sebab, sasaran kegiatan atau agenda ini adalah para petani, bukan *company*. Sang bupati pun menyetujui, hingga diputuskanlah agenda besar ini dengan nama Gerakan Bondowoso Pertanian Organik yang selanjutnya disingkat Gerakan Botanik", ungkap Matsakur .

Testimoni senada dikemukakan oleh mantan Asisten I Mohammad Erfan. Saat diwawancara di rumahnya, sosok bersahaja yang menjabat Kepala Dinas Pertanian pada 2004 sampai 2007 itu menuturkan bahwa Gerakan Botanik adalah murni bersumber dari gagasan Bupati Amin. Erfan menambahkan bahwa lahirnya Gerakan Botanik merupakan cerminan komitmen Bupati Amin untuk mengembangkan sektor pertanian. "Gerakan Botanik berangkat dari kesadaran Bupati Amin akan potensi daerah ini yang agraris, bukan industri. Karena itu Bupati Amin, melalui agenda besar ini, mengajak para petani untuk serius mengembangkan kekuatan pertanian yang dimiliki", imbuh Erfan.

Kedua kesaksian di atas diafirmasi dan dikuatkan oleh Karna Suswandi. Dalam pemaparannya kepada tim penulis, Pejabat Plt Sekda tersebut membenarkan keterangan Matsakur dan Mohammad Erfan di atas. "Memang benar bahwa Botanik adalah gerakan yang berangkat dari ide besar Bupati Amin tentang pengembangan pertanian Bondowoso. Realisasinya pun dikawal dan dikontrol langsung oleh beliau, tentu dengan melibatkan semua pihak terkait, termasuk para petani", tegasnya.

Lebih jauh, putera daerah yang menjabat sebagai Plt Sekda tersebut menjelaskan rencana besar Bupati Amin untuk mengembangkan potensi pertanian Kabupaten Bondowoso dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Terkait hal ini, Karna juga menyebutkan agenda pengembangan Botanik menjadi Istana Pertanian Organik. Karna mengungkapkan bahwa rencana besar tersebut pernah disampaikan oleh Bupati Amin dalam acara Gelar Teknologi dan Display Varietas bertajuk "Tanaman Pangan dan Holtikultura Tahun 2016".

Karna menambahkan, dengan menyadari betapa besarnya potensi pertanian Kabupaten Bondowoso, Bupati Amin bersama jajaran pemerintah daerah akan terus mengembangkan dan mengeksplorasi potensi yang ada secara maksimal,

ISTANA ORGANIK; Bupati Amin Said Husni memanen tomat hasil budidaya organik. *(Foto/dokumen)*

salah satunya dengan menjadikan Kabupaten Bondowoso berbasis pertanian modern. Sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi yang digunakan akan terus dikembangkan, sehingga mampu memproduksi bibit baru berkualitas dari berbagai varietas padi dan tanaman holtikultura.

Menurut Karna, selain diharapkan mampu mendongkrak ketahanan pangan nasional, Botanik juga diyakini dapat menambah lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebab, selain akan mendapatkan pemasukan atau penghasilan dari penjualan beras organik, masyarakat juga dapat memproduksi dan menjual pupuk organik. Di sini akan berlaku peribahasa "sekali mendayung, dua pulau yang terlampaui".

Demikian halnya dengan pernyataan Munandar, di mana Gerakan Botanik merupakan terobosan akseleratif pengembangan sektor pertanian Kabupaten Bondowoso. Saat diwawancara di kantornya, mantan Kepala Bagian Umum yang kini menjabat Kepala Dinas Pertanian tersebut menjelaskan bahwa agenda pemerintah daerah yang digagas Bupati Amin tersebut merupakan program pembangunan yang betul-betul berangkat dari corak atau karakter daerah ini, yaitu agraris. Menurut Munandar, sektor pertanian memang harus dijadikan pilar utama pembangunan daerah. Sebab, keadaan alam Bondowoso yang subur dan melimpah adalah kekuatan daerah yang tidak boleh didiamkan begitu saja, apalagi disia-siakan.

LUMBUNG BERAS; Bondowoso menjadi salah satu sentral penghasil beras. *(Foto/dokumen)*

Bagi Munandar, lahirnya Gerakan Botanik pun harus menjadi cambuk bagi pemimpin-peminpin Kabuaten Bondowoso ke depan untuk serius menggarap sektor pertanian sebagaimana yang telah dilakukan Bupati Amin. "Dengan Botanik, Bupati Amin telah membangun pondasi yang kokoh bagi pengembangan pertanian ke depan, selanjutnya tergantung pada visi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang", tegas Munandar. Karena itu, Munandar merasa sangat bersyukur atas berjalannya Gerakan Botanik. Dengan komitmen semua pihak terkait, Munandar meyakini Gerakan Botanik akan turut menjadi penentu utama terwujudnya masyarakat Bondowoso yang berdaya secara berkelanjutan.

Ketat dari hulu ke hilir

SEBAGAI agenda besar yang terencana, terukur, dan tertuju dengan baik, ide Gerakan Botanik tidak lahir dari angan-angan yang utopis dan spekulatif. Gerakan ini betul-betul berangkat dari suatu pembacaan kritis atas persoalan yang terjadi. Setalah direncanakan secara matang, gagasan atau rumusan Gerakan Botanik kemudian diimplementasikan sesuai perencanaan yang ditetapkan. Tentu hal ini dilakukan untuk mencapai visi atau tujuan yang diinginkan.

Secara garis besar lahirnya ide Gerakan Botanik berangkat dari hasil ilmiah terhadap persoalan yang terjadi di Kabupaten Bondowoso, yaitu fenomena rendahnya kualitas produksi pertanian. Angka produksi pertanian menurun drastis. Hal ini lantas mengundang keperihatinan semua pihak, salah satunya Politeknik Jember untuk menganalisa persoalan yang terjadi.

Hasil penelitian tersebut lantas mengungkapkan bahwa krisis produksi pertanian yang tengah melanda adalah akibat dari rusaknya kualitas tanah pertanian. Kerusakan ini pun merupakan akibat dari pemakaian pupuk anorganik yang berlebihan, sehingga tanah mengalami overdosis. Penggunaan pupuk yang awalnya dilakukan untuk memperbaiki kualitas tanah agar lebih subur justru menimbulkan kerusakan atau meracuni tanah itu sendiri. Keadaan PH tanah menjadi semakin rendah.

Tidak sedikit tanah pertanian di Kabupaten Bondowoso mengalami kerusakan justru karena kelebihan penggunaan pupuk. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Mantan Asisten I Mohammad Erfan, bahwa banyak tanah pertanian di Kabupaten Bondowoso

ALAMI; Kondisi tanah pertanian di Bondowoso di nilai cocok untuk pertanian organik. *(Foto/dokumen)*

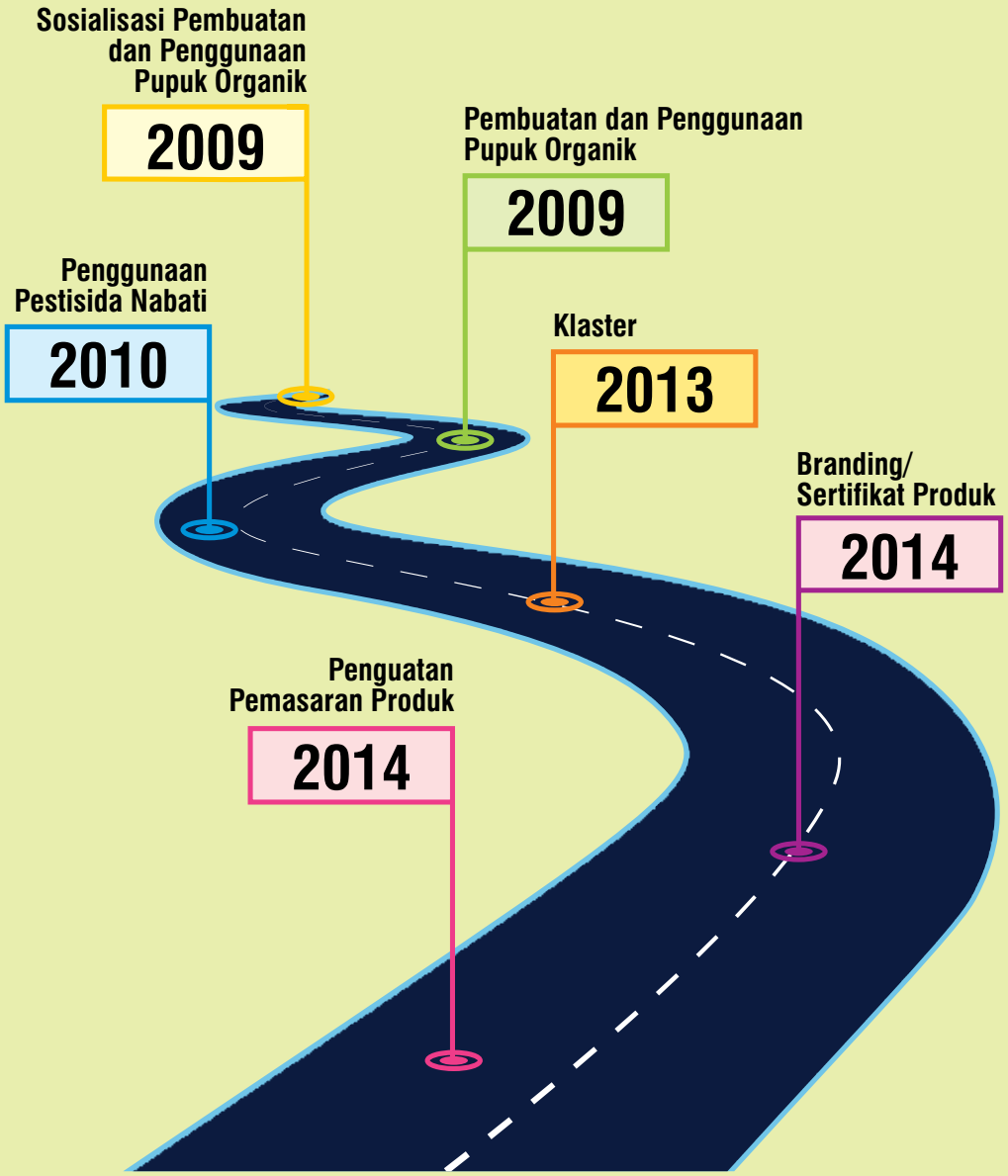

yang PH tanahnya hanya sekitas 4,5 karena penggunaan pupuk anorganik yang berlebihan dan terus menerus. Erfan menjelaskan, mestinya rata-rata PH tanah yang harus dipenuhi untuk produksi pertanian yang baik adalah sekitar 5,5 sampai 7. Dengan rata-rata tersebut, dapat dipastikan produktivitas pertanian akan berjalan dengan baik.

Senada dengan Erfan, Kepala Bappeda Matsakur memaparkan bahwa rendahnya produktivitas pertanian Kabupaten Bondowoso adalah akibat dari kondisi tanah di lahan pertanian yang "sakit" karena penggunaan pupuk anorganik yang berlebihan. Padahal, menurut Matsakur, penggunaan pupuk anorganik yang berlibahan dan secara terus menerus akan menyebabkan tanah mengalami "kecanduan", ibarat orang sakit keras yang mengalami ketergantungan pada obat-obatan. "Demikianlah persoalan pertanian yang terjadi di Bondowoso, di mana kerusakan tanah pertanian terjadi karena pola pemupukan yang melebihi takaran kebutuhan tanah", ungkap Matsakur.

Berangkat dari persoalan itulah Bupati Amin mencetuskan ide perlunya mengembalikan keadaan tanah menjadi normal dan sehat dengan penggunaan pupuk organik, namun juga tetap menggunakan pupuk anorganik secara proporsional. Upaya besar inilah yang kemudian menjadi emprio Gerakan Botanik. Dalam rumusannya, Botanik adalah gerakan yang bertujuan pada menin-

gkatnya kualitas produksi pertanian dengan teknologi ramah lingkungan untuk nilai tambah komoditi.

Secara garis besar, rumusan Gerakan Botanik dapat dilihat pada *roadmap* penerapannya. Mulai tahun 2009 sampai 2018, tahapan penerapan Gerakan Botanik meliputi sosialisasi pembuatan dan penggunaan pupuk organik, pembuatan dan penggunaan pupuk organik, penggunaan pestisida nabati, penentuan klaster, *branding* atau sertifikasi produk, dan penguatan pemasaran produk organik. Dalam hal ini terdapat tujuh pihak yang bergerak secara sinergis mengawal gerakan ini, yaitu Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Universitas Muhammadiyah Malang, Bank Indonesia, Bank Jatim, Lembaga Sertifikasi Organik Seloliman (LESOS), Bulog, dan paguyuban Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).

Adapun Kinerja Botanik diukur dengan menggunakan tiga indikator, yaitu penggunaan pupuk organik, penggunaan pestisida nabati, dan desa pengguna pupuk organik. Kinerja Botanik tersebut diukur mulai tahun 2011 hingga 2017. Hasilnya, kinerja Botanik dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan.

Berdasarkan *roadmap* di atas, Gerakan Botanik awalnya berangkat dari pendataan semua wilayah pertanian sampai ke tingkat desa. Di Kabupaten Bondowoso terdapat 7 wilayah pertanian yang di masing-masing

KUNJUNGAN; Bupati Amin Said Husni saat mengunjungi lokasi pertanian organik. *(Foto/dokumen)*

wilayah tersebut terdapat Balai Penyuluhan Pertanian (BPP). Tujuh wilayah itulah yang menjadi fokus dan diberikan tugas untuk meningkatkan produksi pertanian. Dalam tim penggerak pertanian ini, camat termasuk salah satu anggota tim yang bertugas memantau dan melaporkan penggunaan bahan organik yang kebanyakan di sini adalah dari kotoran sapi atau ternak. Jadi tim ini juga melibatkan camat meskipun fokus penanggung jawabnya adalah Dinas Pertanian yang didistribusikan ke setiap BPP di setiap wilayah pertanian. Di dalam tim tersebut juga ada penyuluh pertanian yang setiap bulannya bertugas memberikan laporan kepada sekretariat daerah bagian perekonomian.

Sebagai agenda besar yang diharapkan berjalan masif, Bupati Amin menginginkan suatu wilayah percontohan penerapan Botanik. Dari sinilah kemudian ditentukan klaster Botanik di beberapa desa di tiga kecamatan, yaitu Desa Lombok Kulon Kecamatan Wonosari, Desa Mrawan dan Taal Kecamatan Tapen, dan Desa Sulek Kecamatan Tlogosari. Beberapa desa tersebut diharapkan menjadi

TEKNOLOGI; Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso pada acara gelar teknologi dan panen jagung super hibrida. *(Foto/dokumen)*

pilot project yang dapat mengasilkan produk Botanik, yaitu beras organik.

Akan tetapi, tidak semua desa bisa menjadi penghasil beras organik karena tingginya standar atau kualifikasi program pertanian organik ini. Kondisi air yang digunakan mengairi sawah Botanik boleh tercemar oleh bahan kimia dari hulu sampai hilir. Sumber air yang menjadi aliran pertanian organik harus betul-betul terjaga sanitasinya dari segala bentuk bahan kimia, baik bahan kimia pertanian maupun bahan kimia dari rumah tangga.

Program pertanian organik ini pun didampingi langsung oleh Staff Ahli Bidang Pertanian Bank Indonesia Indah Priharti-ni. Sebab, pengembangan pertanian organik sangat membutuhkan kecermatan dari tingkat hulu sampai hilir. Kualitas bibit, bebet, dan bobot dari semua komponen yang digunakan sangat diperhatikan dan diutamakan. Hasil atau produk beras organik yang dihasilkan diuji di laboratorium. Ini dilakukan untuk mngetahui sekaligus mengontrol kadar bahan kimia yang terkandung di dalamnya agar tidak melampaui batas toleransi. Dengan tingginya kualifikasi yang demikian, tidak heran apabila tidak semua daerah (kabupaten/kota) memiliki pertanian organik.

Revolusi Pertanian

RESPON dan persepsi masyarakat petani awalnya memang masih kurang tertarik dengan Botanik. Hal ini dapat dimaklumi karena ini merupakan awal dari perubahan besar. Pasalnya para petani tidak akan mudah menerima sesuatu yang baru dan belum terbukti. Karena selalu dihantui perasaan takut gagal, para petani umumnya menginginkan suatu contoh keberhasilan terlebih dahulu.

Apabila sudah ada seorang petani yang berhasil, maka petani lainnya sulit dicegah untuk tidak menirukannya. Sebagai contoh, keberhasilan seorang petani semangka akan memancing atau menarik perhatian banyak petani lain untuk bertani semangka pula. Demikianlah kebiasaan petani pada umumnya yang belum memiliki semangat dan pengetahuan untuk melakukan perubahan. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari taraf pendidikan kebanyakan petani di desa yang relatif rendah.

Rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagian besar petani lantas menjadi persoalan yang tak luput dari bidikan Gerakan Botanik. Karena itu dalam perjalanannya, pemberian memberikan pelatihan dan pendampingan secara intesif kepada para petani merupakan bagian dari kegiatan utama Gerakan Botanik, utamanya kepada para petani dalam Gapoktan yang menggarap pertanian organik. Dengan kegiatan tersebut, para petani telah menyadari bahwa kualitas SDM petani akan berbanding lurus dengan kualitas produk pertanian yang dihasilkan.

INOVASI; Penerapan teknologi sebagai bagian integaral dari pembangunan sektor pertanian di Bondowoso. *(Foto/dokumen)*

Gerakan Botanik pada gilirannya dapat mengubah pola pikir kebanyakan petani. Semula, banyak petani yang meyakini bahwa bertani dilakukan, salah satunya, dengan memupuk tanaman. Namun kini mereka sudah menyadari bahwa tindakan yang benar dan haruis dilakukan ialah memupuk tanah. Dengan kata lain, jika sebidang tanah dipupuk dengan bahan organik, semua tanaman yang tumbuh di tanah itu adalah tanaman organik. Konsep inilah yang terkandung dalam peta jalan Gerakan Botanik yang harus utuh dari hulu sampai hilir. Semua komponen pertanian yang meliputi sumber air, agro *input*, sistem berusaha tani, dan pengolahan hasil harus terjaga kualitasnya.

Semua pihak menyadari bahwa memang tidak mudah untuk mengajak para petani untuk menjalankan Botanik. Sebab, hal ini masih tahap awal membangun kepercayaan publik, tentu dengan bukti keberhasilan. Namun berkat komitmen dan konsistensi semua pihak, dari tahun ke tahun Gerakan Botanik terus menuai keberhasilan. Lahan pertanian organik yang pada 2009 hanya selua 25

PANEN; Bupati Amin Said Husni bersama jajaran Forkopimda Bondowoso dalam acara panen dan ubinan. *(Foto/dokumen)*

hektar di Desa Lombok Kulon Kecamatan Wonosari, kini telah lebih dari 100 hektar secara keseluruhan.

Dalam hal ini, Karna menjelaskan bahwa luas lahan pertanian organik kini telah mencapai 130 hektar, sebanyak 125 terdapat di Desa Lombok Kulon dan 25 hektar di Desa Taal. Sekitar 75 hektar dari luas keseluruhan tersebut sedang dalam proses sertifikasi internasional. "Total keseluruhan lahan pertanian organik yang telah bersertifikat nasional dan lahan yang tengah dalam proses menuju sertifikasi internasional berjumlah 130 hektar", ungkap Plt Sekda itu. Sertifikasi nasional itu dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikat Organik Seloliman (LESOS), sebagaimana setifikat organik yang diberikan kepada Kelompok Tani Mandiri 1B Desa Lombok Kulon. Sedangkan sertifikat internasional tersebut ktengah diajukan kepada Institute for Marketecology (IMO) Swiss.

Selain lahan di atas, pada 2017 telah dilakukan penambahan atau pengembangan lahan pertanian organik sebanyak 61 hektar. Lahan pengembangan tersebut terletak di Desa Tegal Mijin seluar 1 hektar, di Desa Sulek seluas 20 hektar, di Desa Lombok Kulon seluas 20 hektar, dan di Desa Sumber Malang Kecamatan Sumber Wringin seluas 20 hektar.

Dinas Pertanian mencatat, dari 59 ribu hetar lahan pertanian di Kabupaten Bondowoso, 32 ribu di antaranya sudah menggunakan pupuk organik. Unsur hara tanahnya juga meningkat hingga 5 persen. Produktivitas lahan pertanian turut meningkat hingga 100 persen. Kondisi ini tentu saja merupakan *progress* yang sangat menggembirakan.

Dari seluruh lahan pertanian organik yang tersedia, di-

produksi beras organik sebanyak 3,07 ton perhektar. Dalam setahun produksi beras organik secara keseluruhan mencapai 1.234,35 ton. Adapun beras organik yang dihasilkan tersebut terdiri dari tiga jenis, yaitu beras putih, beras merah, dan beras hitam. Pada tingkat kelompok, beras putih dijual seharga Rp.17.000 perkilogram, beras merah dijual seharga Rp.20.000 perkilogram, dan beras hitam dijual seharga Rp.25.000 perkilogram.

Terkait hal itu Karna menerangkan bahwa ketiga jenis beras organik tersebut sudah menjadi komoditi atau banyak dinikmati masyarakat nasional dan bahkan internasional. "Ketiga jenis beras organik kita sudah dinikmati banyak pihak dan negara luar. Kita sudah ekspor ke banyak negara, salah satunya Jepang. Botanik kini bukan hanya untuk Indonesia, tapi juga untuk dunia", terangnya.

Karna lantas menghimbau para petani agar berlomba-lomba mengembangkan pertanian organik, mengingat beras organik produk Botanik sudah menjadi rebutan pangsa pasar. Produk yang dikembangkan pun diharapkan bukan hanya padi atau tanaman pangan, tapi juga tanaman palawija atau holtikultura. Karna bahkan meyakini bahwa pertanian organik akan meningkatkan kesejahtreraan para petani secara signifikan. Karena itu, menurut Plt Sekda tersebut, pemerintah daerah akan terus mendorong para petani guna mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan ini.

MONITORING; Plt. Sekda Bondowoso Karna Suswandi memantau proses penjemuran padi organik. *(Foto/dokumen)*

Indah Prihartini turut menegaskan akan pentingnya peran pemerintah derah dalam pengembangan pertanian organik. Upaya Bupati Amin dalam mengembangkan pertanian organik, baik melalui kebijakan maupun melalui kampanye pertanian, dinilai oleh Guru Besar UMM itu sebagagai langkah yang tepat. Baginya, pertanian organik akan sulit berkembang tanpa dukungan pemerintah. "Mayoritas petani di Bondowoso sudah menjadi organik berkat kebijakan Bupati Amin yang getol mengkampanyekan pertanian organik. Potensi pertanian organik ini sungguh luar biasa", ujarnya (Bondowoso Istana organik: 62).

Tentunya, sampai sekarang masih terdapat banyak pekerjaan rumah semua pihak terkai, utamanya pemerintah daerah, untuk terus mengembangkan botanik. Namun, melihat *progress* Botanik yang begitu akseleratif dan membanggakan, maka Gerakan Botanik dapat dikatakan sebagai revolusi pertanian. Gerakan ini dapat menjadi jalan alternatif menuju kesejahteraan secara akseleratif.

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Penggunaaan Pupuk Organik (Ha)	20.192	25.334	30.324	30.247	31.404	32.132	32.818
Penggunaan Pestisida Nabati Agensia Hayati & Musuh Alami (Ha)	786	1.041	1.580	1.600	2.450	2.760	3.028
Desa yang menggunakan Pupuk Organik (Ha)	194	199	219	219	219	219	219

Kopi
Itu Inspirasi

DI samping Gerakan Bondowoso Pertanian Organik (Botanik), penguatan kopi adalah salah satu upaya yang dijalankan Bupati Amin Said Husni dalam mengeksplorasi sumber daya alam Kabupaten Bondowoso. Eksplorasi di sektor perkebunan ini dilakukan dalam waktu yang hampir bersamaan dengan upaya di sektor pertanian (baca: Gerakan Botanik), yakni pada 2010. Sebagaimana Gerakan Botanik, upaya penguatan kopi bagian dari agenda pembangunan ekonomi daerah melalui pemanfaatan potensi lokal.

Tumbuhnya kopi di tanah Bondowoso merupkan anugerah Ilahi seiring dengan letak geografis daerah ini. Sekitar 48 persen atau hampir separuh wilayah Kabupaten Bondowoso adalah dataran tinggi atau perbukitan dengan ketinggian mulai 500 hingga 1000 meter di atas permukaan laut (dpl). Dengan ketinggian tersebut, kopi menjadi tanaman yang tumbuh subur di separuh wilayah Kabupaten Bondowoso.

Berdasarkan kondisi geografis tersebut, Bupati Amin pernah mengkampanyekan *tagline* "The Highland Paradise". Melalui *tagline* tersebut, secara implisit Bupati Amin menegaskan bahwa Kabupaten Bondowoso

tidak ubahnya surga yang penuh dengan anugerah luar biasa. Betapa tidak, di daerah ini terbentang perkebunan kopi seluas 4000 hektar. Perkebunan itu terletak di kawasan lereng Gunung Ijen dan Raung yang meliputi Desa Blawan, Desa Kalisat, dan Desa Jampit Kecamatan Ijen dan Desa Pancur Kecamatan Botolinggo.

Sejak zaman dulu, menanam kopi sudah menjadi mata pencaharian hampir semua penduduk di kawasan pegunungan Ijen dan Raung. Tanaman kopi telah menjadi denyut nadi kehidupan masyarakat setempat. Persoalannya, kehidupan mereka dalam bertani kopi belum membawa keberdayaan atau kesejahteraan ekonomi secara prospektif. Pasalya, kegiatan bertani kopi masyarakat setempat kala itu masih berjalan secara konvensional dan minim sentuhan teknologi modern. Kebanyakan dari mereka pun hanya bekerja sebagai buruh pemanen kopi.

Keadaan mulai berubah setelah Bupati Amin mencanangkan program penguatan kopi lokal dalam rangka pembangunan daerah. Para pekebun dan pekerja perkebunan kopi pun merasa diperhatikan dan diberdayakan oleh pemerintah daerah. Angin perubahan yang sejak dulu belum pernah didapatkan, kini sudah berhembus dan menggerakkan roda perekonomian masyarakat setempat.

Sebagaimana Gerakan Botanik, eksplorasi potensi kopi yang dielaborasi oleh Bupati Amin itu dalam perkembangannya banyak menuai prestasi yang gemilang. Selain menjadi aset yang menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), produk kopi Bondowoso yang kemudian dikenal dengan nama "Kopi Arabika Java Ijen-Raung" itu turut mengangkat nama Kabupaten Bondowoso di kancah nasional dan bahkan internasional. Dengan cita rasa yang spesial, Kopi Arabika ibarat mercusuar kenikmatan bagi para pecinta kopi di dunia. Kopi lokal berkelas dunia ini pun pada gilarannya turut mempromosikan pariwisata daerah.

Lahirnya agenda pengangkatan potensi kopi tersebut pada dasarnya merupakan cerminan dari konsistensi Bupat Amin dalam mengelaborasi dan merealisasikan misi pemerintah daerah. Dalam hal ini, salah satu misi Pemerintah Kabupaten Bondowoso di bawah kepemimpinan Bupati Amin ialah mewujudkan akselerasi kebangkitan ekonomi yang didukung dengan optimalisasi potensi pertanian dan pariwisata. Dengan kata lain, penguatan potensi kopi ini merupakan upaya aksleratif untuk mewujudkan kebangkitan ekonomi daerah. Alha-

UNGGULAN; Bupati Amin Said Husni menyerahkan kopi khas Bondowoso. *(Foto/dokumen)*

sil, kebangkitan ekonomi yang terwujud dalam waktu yang relatif cepat adalah buah dari kerja keras pemerintah daerah bersama semua pihak terkait.

Keberpihakan Kepada Masyarakat

KOPI Bondowoso sebenarnya sudah mulai dikenal sebagai suatu potensi sejak awal abad ke-19. Di masa penjajahan Belanda itu, perkebunan kopi di Kabupaten Bondowoso merupakan bagian dari perkebunan Besuki Raya penghasil Kopi Arabika. Produknya yang dikenal dengan nama Java Coffe pun sudah menjadi komoditas ekspor ke Eropa.

Pada masa itu kopi Bondowoso sudah dikenal dengan dua macam varietas, Arabika dan Robusta. Perusahaan kopi milik Belanda (sekarang: PTPN XII) lebih mengutamakan Kopi Arabika daripada Robusta untuk diekspor ke luar negeri karena nilai jualnya yang lebih tinggi. Kopi Arabika bernilai jual lebih tinggi karena kualitas dan proses produksinya di atas Robusta. Dalam hal ini Kopi Arabika hanya bisa ditanam di lahan atau tanah dengan ketinggian sekitar 800 meter dpl, sedangkan Robusta dapat ditanam di daerah yang lebih rendah dari lahan Arabika, seperti di daerah Sumber Wringin, Sumber Gading, dan sekitarnya.

Sepintas, tidak ada persoalan dengan pengelolaan perkebunan kopi yang dijalankan PTPN XII. Namun dalam hal kebermanfaatan, kehidupan para buruh tani kopi di tengah hamparan perkebunan yang begitu luas kurang begitu diuntungkan. Kekuasaan PTPN XII terhadap perkebunan kopi tidak banyak membawa nilai pemberdayaan bagi masyarakat setempat. Lebih dari itu, PTPN XII juga melarang masyarakat untuk menanam kopi dengan alasan-alasan tertentu. Warga yang melanggar larangan tersebut diberikan sanksi hukum yang tegas.

KHAS; Bupati Amin Said Husni menyeduh Kopi Arabika Bondowoso. *(Foto/dokumen)*

Persoalan itulah yang kemudian menjadi keperihatinan Amin Said Husni sebagai Bupati Bondowo. Sebgai orang nomor satu di Kabupaten Bondowoso, Bupati Amin meyakini perlunya perkebunan kopi di kawasan Ijen-Raung membawa implikasi pemberdayaan dan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh mantan Asisten I Mohammad Erfan bahwa Bupati Amin menginginkan adanya perubahan terkait pola penanaman kopi Arabika agar berpihak kepada rakyat. "Dalam suatu diskusi kecil Bupati Amin menyampaikan kepada saya perihal cita-cita beliau untuk memberdayakan para pekebun kopi melalui penguatan potensi kopi Ijen-Raung", tegasnya.

FESTIVAL; Bupati Bondowoso mengunjungi salah satu stand kopi di acara festifal Kopi Nusantara. *(Foto/dokumen)*

Berangkat dari persoalan di atas, Bupati Amin lantas mengajak beberapa pejabat penting di Kabupaten Bondowoso untuk meruuskan agenda tersebut menjadi program unggulan. Selain Mohammad Erfan, Matsakur adalah salah satu pejabat daerah yang turut merumuskan agenda tersebut. Menurut Matsakur, Bupati Amin adalah sosok pemimpin yang jeli membaca potensi daerah. "Melihat potensi kopi yang begitu besar, Bupati Amin menetapkan penguatan kopi lokal sebagai program prioritas dalam pembangunan daerah", terang Matsakur.

Secara garis besar, terdapat beberapa rumusan penting yang dihasilkan dalam diskusi kecil para pimpinan daerah tersebut. Pertama, perlunya melakukan perundingan dengan PTPN XII. Perundingan ini adalah upaya negosiasi terkait pentingnya ruang perkebunan bagi masyarakat untuk bertani kopi. Sebagaimana dipaparkan oleh Mohammad Erfan, bahwa perundingan itu akhirnya menghasilkan kesepakatan dengan beberapa catatan penting, salah satunya ialah tanaman kopi yang ditanam warga dilarang mengganggu atau merusak tanaman kopi milik PTPN XII.

Kedua, penguatan potensi kopi akan berangkat dari pegembangan model klaster. Model pengembangan tersebut kemudian mulai dijalankan pada 2011 dan ditargetkan rampung pada 2015. Sejalan dengan itu, disusunlah suatu rumusan atau *roadmap* tentang penguatan klaster kopi. Dalam panduan langah tersebut terdapat tiga tahap pengembangan, yaitu tahap inisiasi yang dimulai pada 2011 sampai 2015, tahap penumbuhan pada 2016 smpai 2020, dan tahap pemantapan pada 2020 sampai 2025.

Ketiga, penguatan klaster kopi perlu dilakukan dengan membangun kemitraan strategis dengan beberapa pihak terkait. Di sini terdapat tujuh pihak yang harus bekerja secara sinergis dalam rangka pengembangan ini, yaitu Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Bank Indonesia Jember, Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia (PUSLIT KOKA), PT Bank Jatim Cabang Bondowoso, Perum Perhutani KPH Bondowoso, PT Indokom Citra Persada, dan Asosiasi Pekebun Kopi Indonesia (APEKI) Kabupaten Bondowoso. Kemitraan strategis ini sangat diperlukan mengingat pengembangan klaster kopi harus dijalankan dari tingkat hulu sampai hilir.

Dalam satu kerangka kerja, ketujuh pihak tersebut bergerak sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Pemerintah Kabuaten Bondowoso berperan sebagai repre-

sentasi negara yang memiliki program pengembangan klaster Kopi Arabika. Pemerintah daerah pun dapat menerbitkan regulasi berupa peraturan daerah atau perbup terkait segala sesuatu tentang Kopi Arabika.

Bank Indonesia dan PT Bank Jatim berperan sebagai penyedia modal usaha. Hal ini mengingat persolan mendasar yang melilit para pekebun kopi ialah keterbatasan modal untuk meningkatkan usahanya. Terkait hal ini, masih rendahnya kemampuan bertani atau SDM adalah persoalan internal yang juga dialami kebanyakan para pekebun kopi. Di sinilah kemudian pentingnya kehadiran PUSLIT KOKA, yakni sebagai "guru" bagi para pekebun kopi, termasuk dalam penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dalam produksi kopi.

Terkait pengembangan kawasan perkebunan kopi, APEKI dan Perum Perhutani adalah dua pihak yang harus terlibat aktif. Keduanya merupakan pemilik lahan perkebunan kopi yang akan mendapatkan keuntungan secara langsung. Dalam hal ini, APEKI berperan sebagai ujung tombak untuk memberikan

BRK

pendampingan kepada para pekebun kopi. Sedangkan peran Perum Perhutani adalah pemberi izin terhadap penanaman dan pengembangan oleh pekebun kopi karena sebagian besar lahan perkebunan kopi adalah tanah milik Perhutani. Izin penanaman diberikan dengan catatan bahwa para pekebun kopi tidak merusak tanaman hutan milik perhutani dan tetap menjaga kualitas kopi. Dengan diperbolehkannya warga menanam kopi di lahan perhutani, pihak Perhutani memperoleh keuntungan berupa keamanan tanaman Perhutani dari pencurian pohon dan kebakaran hutan karena pekebun kopi setiap hari datang ke kebun kopi. Selain itu, pihak Perhutani mendapatkan bagi hasil dari pekebun kopi sebesar 30 persen.

Di bagian hilir, keterlibatan PT Indokom sangat dibutuhkan sebagai agen pemasaran produk kopi. Sebab tanpa agen pemasaran yang profesional, tentu produk Kopi Arabika dan Robusta akan sulit menembus pasar dunia. Melalui PT Indokom, Kopi Arabika memulai debut sebagai komoditas ekspor dunia pada 10 Juni 2011 sebanyak atau sekitar 17 ton kopi oce. Swiss adalah negara tujuan ekspor perdana ini. Meski jumlah yang diekspor belum begitu banyak, tapi menurut Bupati Amin, ini merupakan awal yang baik untuk meniti keberhasilan.

KOMITMEN; Pembangunan sektor kopi di seriusi dengan membangun kemitraan strategis dengan pelbagai pihak. *(Foto/dokumen)*

Pembinaan dan Pengawasan

BERDASARKAN *roadmap* yang telah dirumuskan, upaya pengembangan Kopi Arabika diawali dengan pembentukan kalster. Langkah ini berjalan sejak medio 2010, di mana Bupati Amin merekrut para pekebun kopi di kawasan agropolitan, yaitu kawasan di lereng Gunung Ijen dan Raung di wilayah Kecamatan Sumber Wringin, untuk mengembangkan suatu kawasan yang disebut Klaster Kopi Arabika Rakyat. Klaster ini merupakan kawasan perkebunan kopi milik rakyat, bukan milik PTPN XII, yang kemudian ditetapkan sebagai perkebunan kopi binaan oleh Pemerintah kabupaten Bondowoso. Bupati Amin menjelaskan, melalui rekrutmen tersebut, para pekebun dihimpun menjadi suatu kelompok tani dan diberikan pembinaan secara intensif oleh pemerintah daerah.

Tidak hanya itu, para pekebun kopi yang menjadi kelompok binaan juga diberi bantuan bibit, pupuk, dan sarana prasarana pendukung lainnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bondowoso, Provinsi, dan anggaran pusat. Target utamanya ialah menjadikan kopi sebagai produk unggulan daerah sekaligus pengembagan agro-tourism dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya pekebun kopi.

Tentunya, pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri dalam melakukan

KERJASAMA; Bersama Forkopimda Bondowoso menikmati kopi Bondowoso. *(Foto/dokumen)*

upaya pembinaan kepada pekebun kopi. Keterlibatan pihak-pihak terkait sangat dibutuhkan untuk mengerjakan pekerjaan besar tersebut. Karena itulah kemudian lahir Nota Kesepakatan Bersama Tujuh Pihak yang ditanda tangani pada 21 Maret 2011. Ketujuh pihak tersebut, sebagaimana telah disebutkan di atas, bergerak sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Dala perjalanannya, Nota Kesepakatan Bersama tersebut ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman Enam Pihak, yakni antara Pemerintah Kabupaten Bondowoso dengan BI Jember, Puslitkoka, Bank Jatim Cabang Bondowoso, Perhutani, dan APEKI tentang pengembangan Klaster Kopi Arabika di Kabupaten Bondowoso pada 25 Mei 2016. Setahun kemudian, pengembangan Klaster Kopi Arabika di Kabupaten Bondowoso semakin dikuatkan dengan ditandatanganinya Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Bondowoso dengan Puslitkoka, Bank Jatim Cabang Bondowoso, Perhutani, dan APEKI pada 5 Juni 2017.

Pembinaan kepada pekebun kopi merupakan suatu keharusan karena untuk menghasilkan kopi yang berkualitas prosesnya tidaklah mudah. Pasalnya, kualitas kopi bukan tergantung pada mutu bahan baku atau bahan mentah semata, tapi juga tergantung pada kualitas proses pengolahannya (*processing*). Seberapa pun tingginya mutu bahan baku atau bahan mentah kopi tidak akan menjadi kopi yang berkelas tinggi tanpa proses produksi yang berkelas pula.

Terkait hal tersebut, Mohammad Erfan menjelaskan bahwa Kabupaten Bondowoso memang memiliki potensi alam (baca: kopi) yang bagus, namun selama ini lemah dalam pengolahannya. Dikatakan potensi kopi Bondowoso sangat menjanjikan karena pada zaman dulu Belanda sudah berhasil mengekspor ke luar negeri. Artinya, kala itu, kopi Bondowoso sudah menjadi permintaan dan selera masyarakat dunia. Persoalannya, menurut Erfan, kualitas kopi Bondowoso kerap terancam oleh ketidakteguhan pekebun kopi itu sendiri. Sering kali terjadi kasus, di mana pekebun kopi melanggar aturan-aturan proses pengolahan kopi.

Proses pengolahan pascapanen sangat menentukan terhadap kualitas kopi. Lebih

jauh Mohammad Erfan menjelaskan secara singkat proses tersebut. "Buah kopi yang dipetik atau dipanen harus yang sudah berwarna merah. Buah kopi yang dipanen hari ini, pengolahannya tidak boleh ditunda sampai keesokan hari. Artinya, buah kopi yang sudah dipanen harus langsung dipecah kulit. Setelah itu dicuci dan kemudian direndam untuk fermentasi. Di tingkat ini, teknologi yang dibutuhkan sebenarnya tergolong sederhana", jelasnya.

Dalam ketentuan Puslitkoka, proses fermentasi itu harus dilakukan minimal selama 18 jam dan maksimal 36 jam. Di sinilah yang rentan terjadi pesoalan jika pekebun tidak teguh menjaga dan mematuhi aturan-aturan pengolahan karena suatu permintaan dari pembeli. Pasalnya, banyak pembeli yang mengiming-imingi pekebun dengan membayar harga lebih mahal agar pekebun mau menjual kopi tanpa harus difermentasi selama 24 jam atau memenuhi standar minimal, misalnya 10 jam saja.

Tentunya, ketidakpatuhan pekebun kopi terhadap aturan-aturan atau standar pengolahan akan merusak cita rasa kopi untuk kepentingan jangka panjang. Oleh karena itu, dalam hal ini harus dilakukan pendampingan dan pengawasan secara ketat terhadap proses pengolahan kopi. Sebab, yang mesti dijual adalah kualitas, bukan hanya kuantitas. Hal ini lantas menjadi arah transisi atau perubahan dari *mindset* yang senang menjual kuantitas menuju kesadaran untuk mempertahankan dan selalu menjual kualitas. Dalam perkem-

LANDMARK; Bondowoso Republik Kopi menjadi landmark baru Kabupaten Bondowoso. *(Foto/dokumen)*

bangannya, pekebun kopi kini mulai menyadari akan pentingnya menjaga mutu atau cita rasa kopi.

Sebelum dilakukan pengembangan klaster kopi, produksi kopi pascapanen di sini dilakukan dengan model racutan dan oleh kering yang kemudian dijual secara gelondongan dengan harga basah sebesar Rp 3500 perkilogram dan harga kering Rp 17000 perkilogram. Pemasarannya pun hanya berkutat di tingkat lokal. Namun setelah dikembangkan menjadi klaster kopi, produksi kopi pascapanen di sini dilakukan dengan pola petik merah dan olah basah yang kemudin dijual secara pecah kulit (*horn skin*) dengan harga basah Rp 9000 perkilogram dan harga kering Rp 60000 perkilogram. Pemasarannya pun sudah mencapai level ekspor.

Berkat upaya serius yang dilakukan pemerintah daerah bersama pihak-pihak terkait, termasuk konsistensi dalam mengedepankan kualitas daripada kualitas, Kabupaten Bondowoso mendapatkan sertifikat Indikasi Geografis (IG) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Mnusia pada 2013 dengan nama Kopi Arabika Java Ijen-Raung. Sertifikat tersebut semacam hak paten bagi Kabupaen Bondowoso untuk memproduksi kopi. Ini merupakan suatu keberhasilan sekaligus kebanggaan karena Kabupaten Bondowoso adalah satu-satunya peraih sertifikat IG di bidang perkebunan kopi di Jawa Timur. Kabupaten lain di Jawa Timur yang meraih sertifikat serupa adalah Kabupaten Sidoarjo untuk bidang perikanan, Bandeng.

Dalam perkembangannya, produksi kopi Bondowoso setiap tahunnya terus meningkat seiring dengan bertambahnya lahan atau luas tanam. Melihat *progress* di lapangan, Bupati Amin meyakini bahwa klaster Kopi Arabika akan terus berkembang pesat. Faktanya, pada 2017 luas tanam Kopi Arabika sudah hampir mencapai 14000 hektar.

Sejalan dengan itu, dalam rangka memperkuat pembinaan dan pengawasan secara intensif dan sistemik, Bupati Amin Said Husni lantas menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Tata Kelola dan Tata Niaga Produk Kopi Arabika Java Ijen-Raung. Adapun maksud perbup tersebut ialah memberikan perlindungan secara menyeluruh terhadap kawasan, kegiatan produksi, kelembagaan, dan produk Kopi Arabika (pasal 2). Sedangkan tujuannya ialah melestarikan kawasan dn produk Kopi Arabika, meningkatkan kesejahteraan pekebun dan pelaku usaha kopi, sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah (pasal 3).

Dalam hal budidaya tanaman, pihak yang secara langsung bertugas memberikan pembinaan teknis kepada pekebun kopi ialah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bondowoso dan Puslitkoka (pasal 5). Pelaksanaan panen dan pascapanen kopi juga harus sesuai dengan Standar Operasional Proseur (SOP) yag telah direkomendasi oleh Puslitkoka (pasal 6). Kegiatan perdagangan kopi pun diatur secara jelas dalam pasal 7 perbup tersebut, di antaranya perdagangan Kopi Arabika dilakukan melalui koperasi yang bergerak di bidang komoditi kopi di wilayah Kabupaten Bondowoso dalam rangka memperkuat posisi tawar petani kopi (ayat 3). Produk kopi yang dijual dalam bentuk *horn skin* dan kopi biji serta dalam bentuk kopi sangrai dan bubuk harus memenuhi persyratan mutu fisik sesuai SNI dan mutu citarasa spesialti (pasal 5 dan 6).

Dengan beberapa kalausul perbup di atas, pengembangan kopi ini sebenarnya sangat bernafaskan spirit pemberdayaan masyarakat dan pelestarian alam. Hal ini sebagaimana botanik yang hanya akan dihasilkan secara maksimal dari proses pengolahan yang steril dari segala macam zat kimia dari hulu sampai hilir. Pengambangan kopi di Bondowoso pun secara nasional telah diakui sebagai konsep agroforestri, di mana usaha budidaya kopi dijalankan dengan menjaga iklim mikro serta mempertahankan kelestarian hutan. Sebagai mantan Kadishutbun, Mohammad Erfan menjelaskan bahwa pengembangan kopi di Bondowoso berbeda dengan yang dilakukan di daerah-daerah lain, salah satunya seperti di Aceh yang pepohonan banyak ditebang agar penyinaran matahari dapat meningkatkan produktivitas kopi.

Potensi Berbuah Prestasi

BERKAT keberhasilan (*sucsess story*) dalam mengembangkan Klaster Kopi Arabika Ijen-Raung, sederet prestasi dan penghargaan telah disabet oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Atas nama Pemerintah Kabuaten Bondowoso, Bupati Amin mendapatkan penghargaan Otonomi Award dari JPIP pada 2011, Penghargaan KPDT pada 2012, Penghargaan Inovasi Perkebunan dari Kementerian Perta-

EKSPOR; Kopi Bondowoso sudah di ekpor ke Eropa. *(Foto/dokumen)*

nian pada 2013, Penghargaan Produk Unggulan Kabupaten dari Kemeterian Desa dan PDT, dan beberapa penghaargaan lainnya. Sejalan dengan itu Klaster Kopi Arabika juga selalu tampil sebagai juara dalam berbagai ajang festival kopi, di antaranya sebagai Juara 2 dalam Festival Kopi Indonesia di Banyuwangi pada 2015, Juara 1 dalam Festival Kopi Nusantara I di Bondowoso pada 2016, Juara 2 dalam Fesival Kopi Nusantara II di Bondowoso pada 2017, dan Juara 2 dalam Jakarta Coffee Week 2017 di Jakarta.

Selaras dengan spirit perkopian yang kian menguat di Kabupaten Bondowoso, Bupati Amin kemudian mendeklarasikan Bondowoso Republik Kopi (BRK) pada 22 Mei 2016 di Halaman Arabica Homestay Sempol sebagai rangkaian dari pegelaran Ijen Festival Bondowoso 2016. Dengan melihat sisi historis

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT INDIKASI-GEOGRAFIS

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek jo Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi-Geografis, memberikan Hak Indikasi-Geografis kepada :

Nama dan Alamat Pemilik Indikasi-Geografis	: Perhimpunan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (PMPIG) Kopi Arabika Java Ijen - Raung Jl. Mastrip No. 237 Bondowoso, Jawa Timur
Untuk Indikasi-Geografis dengan Nama	: KOPI ARABIKA JAVA IJEN - RAUNG
Nama Produk	: Kopi Arabika
Tanggal Penerimaan	: 14 Maret 2013
Nomor Pendaftaran	: ID G 000000023
Tanggal Pendaftaran	: 10 September 2013

Perlindungan Hak Indikasi-Geografis tersebut diberikan selama karakteristik khas dan kualitas yang menjadi dasar bagi perlindungan atas Indikasi-geografis tersebut masih ada. Sertifikat Indikasi-Geografis dilampiri dengan buku persyaratan yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Prof. Dr. Ahmad M. Ramli,SH.,MH.,FCBArb.
NIP. 196107041987011001

perkopian Bondowoso yang sebenarnya sudah dikenal sejak awal abad ke-19, semakin luasnya lahan tanam kopi, semaki meningkatnya jumlah dan nilai ekspor kopi, serta Bondowoso sebagai satu-satunya daerah yang menjadi lokasi kebun percobaan milik Puslitkoka, maka Bondowoso Republik Kopi dideklarasikan untuk memperkuat *branding* kopi rakyat Bondowoso.

Sebagai Presiden BRK, Bupati Amin Said Husni menanamkan suatu falsafah "kopi itu inspirasi". Bahasa sederhana namun penuh makna tersebut menjadi ungkapan yang menarik khalayak untuk lebih mengenal BRK. Alhasil, Bondowoso Republik Kopi kini telah menjadi ikon daerah yang membawa *multiplier effect*. Di samping mampu meniptakan dn mengangkat destinasi wisata baru di Kabupaten Bondowoso, BRK telah menggerkkan roda perekonomian masyarakat di sektor pertanian, perkebunan, dan perdagangan serta menjadi potensi baru bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bondowoso.

Sederet keberhasilan di atas lantas mengispirasi Bupati Amin untuk mengembangkan potensi kopi di kawasan lain. Sebagaimana keterangan Bupati Amin dalam pengantarnya atas buku "Bondowoso Republik Kopi, Meracik Inspirasi untuk Kejayaan Negeri", bahwa Bupati terinpirasi untuk mereplikasi keberhasilan tersebut di kawasan lereng Gunung Argopuro di wilayah barat Bondowoso. Apalagi di kawasan ini sudah lama terbentang kebun kopi percontohan milik Puslitkoka. Di wilayah utara, pekebun kopi di lereng Gunung Biser dan Alassereh pun sudah mengacungkan tangan meminta pembinaan kepada pemerintah daerah. Ke depan, ini menjadi salah satu garapan yang akan dilakukan. Semoga, rencana yang sudah mulai digarap ini dapat terealisasi dengan baik dalam rangka mewujudkan masyarakat Bondowoso yang berdaya secara berkelanjutan.

Republik Kopi

Akselerasi
Peternakan Modern

PETERNAKAN; Bupati Bondowoso dalam acara kontes ternak sapi 2017. *(Foto/dokumen)*

KABUPATEN Bondowoso secara geografis mempunyai potensi yang sangat besar untuk pengembangan peternakan, baik ruminansia (ternak besar) seperti sapi, kerbau, kuda, dan semacamnya maupun nonruminansia (ternak kecil) seperti aya, bebek, kelinci, puyuh, dan semacamnya. Sebagai salah daerah yang memiliki potensi peternakan yang cukup besar, Kabupaten Bondowoso berada di posisi ke-4 sebagai penyuplai danging sapi di Jawa Timur. Poisi tersebut pada gilirannya menjadikan kabupaten bermonumen Gerbong Maut ini sebagai salah satu tumpuan untuk terus meningkatkan suplai daging sapi.

Budidaya ternak sapi potong dapat dijadikan sebagai instrumen keberhasilan dalam menggerakkan ekonomi masyarakat, terutama di pedesaan. Sesuai data yang dihimpun oleh tim penulis dapat dikemukakan bahwa populasi ternak di Kabupaten Bondowoso terus mengalami perkembangan yang signifikan. Hal ini tentu akan berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam limatahun terakhir, geliatpeningkatan populasi hewan ternak di Kabupaten Bondowoso berjalan mulai 2012 sampai 2017. Beberapa hewan ternak dimaksud adalah jenis sapi potong, sapi perah, kuda, kambing, domba, ayam buras, ayam ras, dan itik. Meski pada 2013 terjadi penurunan jumlah populasi untuk semua jenis ternak tersebut, namun pada tahun-tahun berikutnya sampai 2017 kembali mengalami peningkatan yang relatif tinggi.

Peningkatan populasi ternak di atas tentu membawa peningkatan terhadap produksi hasil peternakan, yaitu daging, telur, dan susu. Sama halnya dengan angka populasi ternak setiap tahunnya, jumlah produksi hasil peternakan pun mengalami penurunan pada 2013. Namun pada tahun-tahun berikutnya sampai 2017 mengalami peningkatan cukup signifikan.

Peningkatan populasi ternak dan produksi hasil peternakan sebagaimana dalam kedua tabel di atas tidak lepas dari kesuksesan program pembangunan peternakan yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Bondwoso. Melalui Dinas Pertanian, pemerintah daerah mencanangkan program

Kawasan Mandiri Peternakan (KMP). Program tersebut diimplementasikan melalui pengembangan ekonomi peternakan, kawasan budidaya peternakan, pemberdayaan masyarakat peternakan, membangun kemitraan dengan pihak ketiga, penguatan modal usaha peternkan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Ruminansia dan Nonruminansia

POPULASI ternak di Kabupaten Bondowoso tersebar di beberapa kecamatan, yaitu Bondowoso, Cermee, Botolinggo, Maesan, Wringin, Curahdami dan Tapen. Sebelum adanya program Kawasan Mandiri Peternakan (KMP), pola pengembangan peternakan di beberapa kecamatan tersebut masih dilakukan secara konvensional atau tradisional. Namun sejak diprogramkannya KMP, pengembangan peternakan mulai dujalankan dengan pola peternakan modern. Pola ini berupa pengelolaan ternak secara berkelompok atau berkoloni.

Penerapan pola peternakan modern di Kabupaten Bondowoso telah berjalan di beberapa kecamatan yang menjadi lumbung populasi ternak, salah satunya di Desa Karanganyar Kecamatan Tegalampel. Di desa tersebut telah didirikan kampung ternak komunal Mitra Suburoleh masyarakat setempat pada tahun 2015. Adanya kampung ternak di desa tersebut ditandai dengan bangunanKandang Komunal yang terletak di Dusun Song Tengah.

Kandang Komunal yang merupakan pusat penggemukan sapi ternak itu dikelola secara bersama-sama oleh enam kelompok peternak di desa tersebut. Pengelolaannya dijalankan dengan sistem koperasi, di mana anggota kelompok peternak merupakan penanam modal. Dengan pola pengembangan yang modern, sapi-sapi yang dipelihara di kandang tersebut dalam jangka waktu empat bulan mengalami peningkatan berat badan (penggemukan) secara signifikan. Kesejahteraan ekonomi anggota kelompok peternak Mitra Subur pun semakin meningkat seiring dengan semakin tingginya harga jual sapi yang dipanen dari kandang milik kelompok tersebut.

Sebagai bentuk apresiasi dan untuk menodorong pertumbuhan kelompok ternak Mitra Subur tersebut, Bupati Amin Said Husni memberikan bantuan kandang dan 13 ekor sapi. Bantuan tersebut diberikan dalam agenda kujungan kerja Bupati Amin ke lokasi kampung ternak dimaksud pada 22 Januari 2018. Melalui sambutannya dalam agenda kunjungan kerja itu, Bupati Amin berharap bantuan yang telah diberikan dapat mendorong peningkatan produktivitas pengembangan peternakan di Desa Karanganyar, bahkan dapat menjadi salah satu sentra peternakan daerah.

Di samping itu, Bupati Amin mendorong kelompok peternak Mitra Subur untuk menjadi pelopor perubahan, utamanya perubahan pola pikir peternak dari *mindset* peternakan yang konvensional menuju modern. Sebab, lebih jauh Bupati menjelaskan, bahwa peternakan modern tidak hanya memperhatikan peningkatan produktivitas dalam bertenak, tapi juga sangat mementingkan kebersihan atau kesehatan lingkungan. Hal ini sebagaimana modelpeternakan konvensional yang identik dengan tumpukan kotoran ternak berserakan di sekitar rumah peternak karena letak kandang berdekatan dengan dapur dan halaman rumah.

Selain pengembangan ternak sapi potong, di Kabupaten Bondowoso juga dikembangkan ternak sapi perah yang terletak di Desa Curahpoh Kecamatan Curahdami dan Desa Kembang Kecamatan Bondowoso. Meski produksi susu yang

dihasilkan masih mampu mencukupi kebutuhan pasar lokal, namun ini merupakan suatu potensi yang perlu dikembangkan menjadi produk unggulan daerah. Di samping itu, pentingnya pengembangan sapi penghasil susu ialah terciptanya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.

Sebagai upaya pembibitan sapi yang bermutu, Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso telah melakukan terobosan berupa pemberian iseminasi buatan (IB) secara gratis kepada peternak melalui program Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (UPSUS-SIWAB). Program tersebut digulirkan untuk mendorong peningkatan populasi ternak dengan target 70.000 ekor pertahun. Hal ini dalam rangka mendukung program swasembada daging di Kabupaten Bondowoso dan Jawa Timur.

Terkait hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam dua tahu terakhir, yakni 2016 dan 2017, menggelar kontes ternak sapi. Kontes tersebut digelar sebagai upaya pemerintah daerah mendorong para peternak sapi untuk terus meningkatkan mutu genetik ternak sapi melalui teknologi IB. Dalam beberapa even atau kontes pun sapi asal Bondowoso telah beberapa kali meraih prestasi. Sapi asal Bondowoso pernah meraih juara 1 kategori Sapi Kremen dalam kontes ternak tingkat Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan di Kabupaten Blitar pada 2013. Pernah pula meraih juara 1 kategori sapi ekstrem dalam kontes ternak tingkat Karesidenan Besuki

pada 2015. Pada 2017, sapi asal Bondowoso menyabet juara 1 kategori sapi ekstrem dalam kontes ternak tingkat Provinsi Jawa Timur yang digelar di Kabupaten Situbondo.

Sapi Bondowoso yang berprestasi tersebut adalah sapi yang dihasilkan dari program IB. Teknologi IB dapat menghasilkan ternak sapi yang berkualitas dengan bobot di atas 1 ton. Bertambahnya bobot sapi tersebut nantinya akan turut meningkatkan harga jualnya di pasar. Hal ini selaras dengan tujuan teknologi IB, yakni memperbaiki mutu genetik ternak, optimalisasi penggunaan bibit pejantan unggul dalam jangka waktu yang lebih lama, meningkatkan angka kelahiran secara cepat dan teratur, mencegah penularan penyakit kelamin, menyejahterakan peternak, dan terbukanya lapangan pekerjaan.

Lebih jauh, pencarian bibit unggul dilakukan oleh Dinas Pertanian (Sektor Peternakan) melalui kerja sama dengan Balai Embrio Ternak Cipelang Bogor. Adapun agenda kerja sama ini ialah melakukan rekayasa genetik melalui teknologi transfer embrio. Upaya rekayasa genetik itu pun telah diterapkan di beberapa kecamatan yang menjadi lokasi pengembangan ternak, yaitu Kecamatan Klabang, Prajekan, Curahdami, dan Wringin.

Selain program di atas, Dinas Pertanian juga telah memberikan program Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) kepada para peternak. Dengan program tersebut, para petenak sapi mendapatkan asuransi sebesar Rp200.000 untuk satu ekor sapi pertahun, di mana Rp160.00 disubsidi oleh pemerintah daerah dan Rp40.000 ditanggung peternak dengan harga pertanggungan sebesar Rp 10.000.000 untuk satu ekor sapi pertahun. Adapun pemberian pertanggungan dalam AUTS meliputi sapi mati karena penyakit, sapi mati karena kecelakaan, sapi mati karena beranak, dan sapi mati karena pencurian. Semua jasa asuransi tersebut diberikan melalui Jasa Asuransi Indonesia (JASINDO).

Di samping ternak sapi, Kabupaten Bondowoso juga memiliki potensi ternak kambing, baik peranakan etawa maupun borawa. Populasi ternak kambing peranakan etawa dan borawa di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2017 berjumlah 44.399 ekor. Populasi atau pusat ternak kambing etawa terpusat di Ke-

camatan Ijen, Cermee, Botolinggo, dan pakem untuk pengembangan produksi susu kambing etawa. Sedangkan populasi ternak kambing borawa dipusatkan di Kecamatan Sumberwringin.

Sebagaimana pengembangan kawasan ternak sapi, pegambangan ternak kambing diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pasar akan daging kambing dan menjadikan Kabupaten Bondwoso sebagai salah satu sentra kambing berkualitas di Jawa Timur. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan indukan, Dinas Pertanian juga telah melakukan IB sebagaimana pada peternakan sapi. Pembibitan melalui IB ini dilakukan untuk meningkatkan bibit, bebet, dan bobot kambing lokal agar tidak kalah dengan kambing luar daerah. Sampai saat ini, Dinas Pertanian telah memeberikan IB jenis kambing sebanyak 3000 ekor.

Adapun pengembangan budidaya ternak domba meliputi semua kecamatan di wilayah Kabuaten Bodnowoso. Penegmbangan ternak ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sebagaimana tercatat dalam tabel populasi terak di atas, populasi ternak jenis domba telah mencapai 41.156 pada 2017. Meski sejauh ini masih mampu memcukupi permintaan pasar lokal, namun hal ini perlu terus dikembangkan karena berternak domba sudah menjadi pekerjaan sebagian masyarakat di pedesaan. Karena itu Dinas Pertanian terus melakukan upaya pengembangan, salah satunya dengan teknologi penggemukan domba (*fatening*) sebagaimana yang telah dilakukan di Kecamatan Tenggarang dengan target domba 1000 ekor. Dengan kualitas yang sangat baik, pemasaran domba hasil *fatening* tersebut sudah merambah ke wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabotabek).

KAMPUNG TERNAK; Bupati meninjau lokasi penggemukan kambing di kampung ternak Desa Karanganyar-Tegalampel. *(Foto/dokumen)*

Terkait pengembangan ternak kecil atau nonruminansia, pertumbuhan populasi ternak ayam ras mengungguli rata-rata pertumbuhan populasi jenis ternak kecil lainnya. Sebagaimana data dalam tabel populasi ternak di atas, populasi ternak jenis ayam ras telah mencapai 2.051.539 pada 2017, padahal angka populasi pada 2012 sebesar 505.912. Melalui tebel populasi di atas dapat diperbandingkan dan dikemukakan bahwa pertumbuhan populasi ternak ayam ras dalam lima tahun terakhir jauh melebihi rata-rata populasi ternak kecil lainnya.

Rekayasa Pakan

PENGEMBANGAN KMP tentu tidak mungkin dipisahkan dari penyediaan pakan ternak yang sehat dan berkualitas. Sebab, pengembangan ternak bukan hanya berbicara tentang pentingnya bibit unggul, tapi juga keharusan menyediakan pakan ternak yang bergizi dan bermutu. Kualitas pakan akan turut menentukan pertumbuhan hewan ternak. Mutu pakan yang tidak sehat pasti akan berpengaruh terhadap pertumbuhan atau kesehatan ternak.

Sebagaimana manusia, hewan ternak pun memerlukan pakan yang sehat dan seimbang (proporsional). Oleh karena itu, dalam pengembangan KMP, Dinas Pertanian telah melakukan upaya diversifikasi pakan melalui rekayasa pakan. Penerapan teknologi ini berupa fermentasi pakan, silase, dan pembuatan pakan kering sebagai cadangan pada waktu musim kemarau. Rekayasa pakan di sini merupakan bagian dari rekayasa teknologi pertanian yang kini sudah mulai diterapkan secara masif oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso.

Program rekayasa pakan telah dipamerkan oleh Dinas Pertanian dalam acara Gelar Teknologi (Geltek) yang menjadi bagian dari agenda Ijen Festival 2018 pada Mei lalu. Dalam acara tersebut publik dapat melihat langsung hasil penerapan rekayasa pakan berupa hijauan pakan ternak yang merupakan bagian dari teknologi rekayasa pertanian. Hal ini diharapkan dapat menggugah kesadaran para peternak di Kabupaten Bondowoso akan pentingnya pemanfaatan teknologi.

Masyarakat sudah perlu membuka mata, bahwa pengembangan peternakan kini sudah harus berbasis teknologi, salah satunya dalam hal pengadaan paka ternak. Adanya sentuhan teknologi merupakan salah satu ciri dari peternakan modern.Dengan senuhan teknologi, produksi pakan akan lebih terjamin kualitas da kuantitasnya. Basis teknologi inilah yang sebenarnya juga menjadi agenda dalam pengembangan KMP.

Tercapainya *progress* di bidang peternakan, tentu saja akan menopang kesuksesan program Bondowoso Pertanian Organik (Botanik). Sebab, meningkatnya populasi ternak akan meningkatkan produksi pupuk organik. Kesuksesan Botanik pun akan mendongkrak produksi beras sehingga dapat memenuhi kebutuhan beras atau di level Jawa Timur bahkan nasional (surplus).

Gugusan Gerakan *Pendidikan*

Peningkatan IPM

KEMISKINAN masih menjadi persoalan pelik bagi pembangunan Kabupaten Bondowoso. Rendahnya taraf pendidikan sebagian besar masyarakat disinyalir sebagai fenomena yang melatarbelakangi lahirnya kemiskinan di kabupaten bermonumen Gerbong Maut ini. Pasalnya, dengan tingkat pendidikan yang rendah, masyarakat hanya bisa bekerja sebagai buruh tani atau kuli bangunan. Dengan pendapatan dari kuli atau buruh yang tak seberapa, maka tingkat ekonomi masyarakat sulit beranjak dari bawah garis kemiskinan. Demikianlah gambaran kenyataan yang masih menjadi pekerjaan rumah dalam agenda pembangunan daerah.

Secara teoretis, terdapat banyak pandangan dan pendapat ahli tentang kemiskinan. Kartasasmita mengemukaan bahwa masyarakat miskin pada umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi. Hal tersebut senada dengan yang dikatakan Friedmann (1992:123) bahwa kemiskinan sebagai akibat dari ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuatan sosial. Bagi Masyarakat Bondowoso, faktor geografi menjadi salah satu faktor vital yang mengkonstruk kemiskinan di Bondowoso.

Gambaran kemiskinan di Bondowoso, bisa diklasifikasikan menjadi kemiskinan natural, kemiskinan kultural, dan kemiskinan struktural yang juga dikenal *man made poverty* (Kartasasmita, 1996: 235, Sumodiningrat, 1998: 67, dan Baswir, 1997: 23). Dulu Kabupaten Bondowoso sudah lama dikenal sebagai kota tertinggal. Namun, sejak tahun 2018 secara *de facto* Bondowoso sudah memastikan diri keluar dari predikat daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2017 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sempat menempatkan kabupaten "Rebuplik Kopi" ini

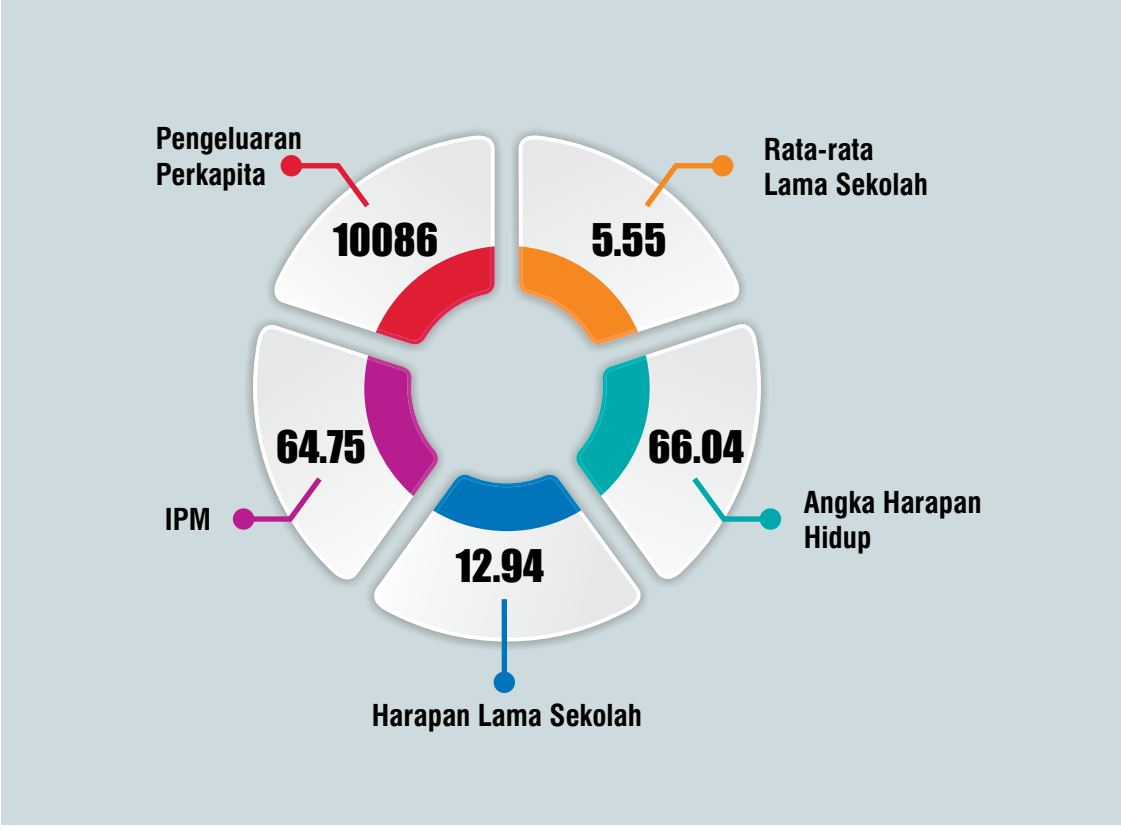

pada peringkat 31 di Jawa Timur. Progres kenaikan peringkat Kabupaten Bondowoso yang akseleratif mengunggguli beberapa kabupaten tetangga seperti Jember, Probolinggo, Lumajang dan Situbondo. Sebelumnya kabupaten di Tapal Kuda yang tidak memiliki laut ini selalu bersanding dengan Kabupaten Sampang di *great* 35. Capaian IPM ini bisa dilihat dari peningkatan komponen dasar kualitas hidup masyarakat Bondowoso yang meliputi aspek kesehatan, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut terukur dari beberapa indikator yang faktual. Bidang kesehatan diukur dari angka harapan hidup waktu lahir dan peningkatan kesehatan, Standar pengetahuan dilihat dari progesifitas angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah dan kelayakan hidup terlihat dari kemampuan daya beli masyarakat atas kebutuhan pokok, hal ini bisa diukur dari besarya rata-rata pengeluaran perkapita.

Tabel
Tabel Indeks Pembangunan Manusia (Metode Baru)

Tahun	IPM	AHH	EYS	MYS	Pengeluaran
2010	59.47	64.94	11.27	4.97	8064.31
2011	60.46	65.08	11.72	4.97	8418.39
2012	62.24	65.22	12.42	5.31	8855.86
2013	63.21	65.36	12.76	5.48	9138.26
2014	63.43	65.43	12.85	5.52	9176.22
2015	63.95	65.73	12.86	5.53	9518.93
2016	64.52	65.89	12.87	5.54	10007
2017	64.75	66.04	12.94	5.55	10086

Keberhasilan ini tidak lepas dari terobosan-terobosan yang telah diupayakan oleh pemerintah Kabupaten Bondowoso, di bawah kepemimpinan Bupati Amin Said Husni, untuk meningkatkan mutu pembangunan daerah. Dalam hal ini, Bupati Amin Said Husni sangat mementingkan pembangunan manusia daripada pembangunan ekonomi yang menekankan pada pertumbuhan (*economic growth*), kebutuhan dasar (*basic needs*), kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), atau pengembangan sumber daya manusia (*human resource development*) semata. Sebab, konsep pembangunan manusia yang dikenal dengan *Human Development Indeks* (HDI) mengandung empat unsur, yaitu produktivitas (*productivity*), pemerataan (*equity*), kesinambungan (*sustainability*), dan pemberdayaan (*empowerment*).

Keberhasilan yang dicapai tentu bukan hasil kerja keras pemerintah dearah saja melalui program-program prioritas, tapi juga berkat dukungan dan partisipasi masyarakat dalam setiap agenda

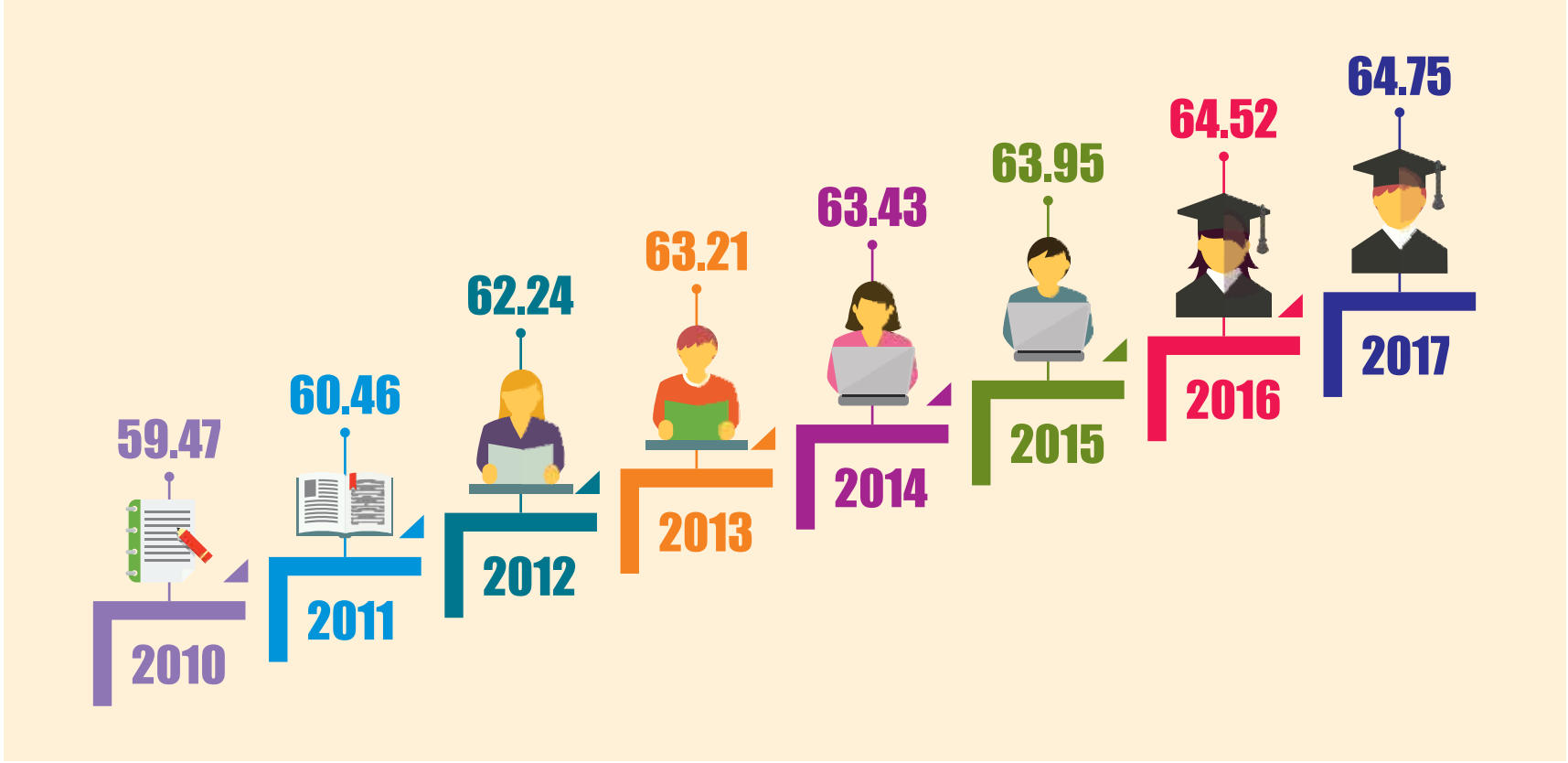

pembangunan daerah. Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Bondowoso baru mencapai 5,55 tahun (2017). Padahal di Jawa Timur sudah mencapai 7,1 tahun. Hal ini lantas menjadi salah satu penghambat Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bondowoso sehingga mendapat nilai 64,75 % (peringkat 31 di Jawa Timur) dengan pertumbuhan pembangunan tercepat ke tiga di Jawa Timur.

Salah satu teori berpendapat bahwa investasi sumber daya manusia mempunyai pengaruh yang besar terhadap peningkatan produktivitas. Menurut Becker (1964) peningkatan produktivitas tenaga kerja ini dapat didorong melalui pendidikan dan pelatihan serta peningkatan derajat kesehatan. Teori *humancapital* ini selanjutnya diperkuat dengan berbagai studi empiris yang dilakukan oleh Kendrick (1976).

Melalui berbagai program prioritas, pemerintah Kabupaten Bondowoso di bawah pimpinan Amin Said Husni telah terbukti mampu meningkatkan angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan hidup masyarakat.

Kampus UNEJ dan Polije

KUALITAS sumber daya manusia menjadi faktor determinan bagi keberhasilan pembangunan dan kemajuan suatu bangsa (Tilaar, 1999). Berangkat dari pemikiran tersebut, pemerintah Kabupaten Bondowoso selama dinahkodai Bupati Amin Said Husni melakukan berbagai terobosan dalam memajukan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia masyarakat Bondowoso. Cita-cita luhur ini tentu tidak lepas dari peran sentral seorang pemimpin dan partisipasi semua elemen masyarakat dalam setiap agenda pembangunan daerah.

Seorang tokoh aliran progresivisme John Dewey (1987) berpandangan, bahwa belajar bukan merupakan penerimaan dan penerapan terhadap pengetahuan terdahulu yang telah ada, melainkan rekonstruksi pengetahuan yang terus-menerus sesuai dengan dinamika pengetahuan.

UNIVERSITAS; Bupati Amin Said Husni menyerahkan buku Bondowoso Republik Kopi kepada Menristek Dikti M. Nasir. *(Foto/dokumen)*

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) yang pesat akan berdampak pada timbulnya persaingan yang ketat di semua aspek kehidupan, sehingga untuk meraih sukses dan memenangkan kompetisi tersebut dibutuhkan sikap profesionalisme dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan. Hal ini disadari oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso, bahwa untuk menghadapi tantangan tersebut, lembaga-lembaga pendidikan di Kabupaten Bondowoso dituntut untuk memiliki keunggulan kompetitif. Sebab bila tidak, maka *output* pendidikan atau generasi muda di Kota Tape ini tidak akan mampu menghadapi persaingan globalisasi yang kian kompetitif.

Bila hal itu terjadi, maka secara alamiah lembaga-lembaga pendidikan di Kabupaten Bondowoso lulusannya akan memiliki daya saing yang rendah. Hal ini nantinya akan berdampak pada tidak terciptanya pemberdayaan penduduk. Apabila kondisi ini dibiarkan, maka dalam waktu jangka panjang akan berdampak pada pengembangan daerah otonomi yang juga rendah. Di

samping itu, dalam era persaingan yang ketat tersebut lembaga pendidikan harus dikelola secara efektif dan efisien serta didukung oleh tenaga pendidik, pengelola dan pengawas sekolah yang profesional, kurikulum yang efektif dan akomodatif, sarana dan prasarana yang memadai, sumber belajar yang memadai, pembiayaan yang memadai, kontrol kualitas yang baik, serta sistem pengelolaan yang efektif.

Untuk dapat mewujudkan cita-cita luhur tersebut, maka di Kabupaten Bondowoso telah memfasilitasi dibangunnya Perguruan Tinggi di Pusat Pengembangan Pendidikan (*Education Development Center*). Bentuk program yang dilakukan yaitu membuka akses pendidikan tinggi dengan fasilitasi Universitas Negeri Jember (UNEJ) di Kabupaten Bondowoso. Program ini sudah terlaksana mulai tahun akademik 2016/2017. Kehadiran program ini diharapkan dapat memfasilitasi dan mengembangkan seluruh potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Kabupaten Bondowoso, sehingga ke depan diharapkan hasil pendidikan di kabupaten Bondowoso akan memiliki daya kompetitif yang tinggi, mampu bersaing, baik secara lokal, regional, nasional, maupun internasional.

KAMPUS II; Mendistek Dikti M. Nasir menandatangani prasasti peresmian kampus II Unej Bondowoso. *(Foto/dokumen)*

Awalnya, program ini kerjasama program ini tertuang dalam *Momerandum of Understanding* (MOU) antara pemerintah kabupaten Bondowoso dengan Kampus Universitas Jember di Bondowoso Nomor: 180/12.C/430.6.2/2016 dan Nomor: 14010/UN25/DN/2016 tentang Pelaksanaan Pendidikan Program Sarjana Universitas Jember di Bondowoso, yang ditandatangani oleh Amin Said Husni yang bertindak atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Bondowoso, dan dengan Moh. Hasan. Rektor Universitas Jember Periode 2012-2016, bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Jember (UNEJ) pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2016. Seiring berjalannya waktu, akhirnya EDC secara resmi menjadi Kampus II UNEJ di Bondowoso.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten

Bondowoso juga menjalin kerjasama dengan Politeknik Negeri Jember, sesuai naskah Perjanjian Kerjasama Nomor: 180/5/430.4.2/2017 dan Nomor: 6720/PL.17/LL/2017 Tentang Pelaksanaan Program Pendidikan Politeknik Negeri Jember di Bondowoso, yang ditandatangani oleh Amin Said Husni yang bertindak atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Bondowoso, dan dengan Nanang Dwi Wahyono yang bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Politeknik Negeri Jember pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2017.

Terobosan bupati yang pernah menjabat Dewan Perwakilan Rakyat RI ini bertujuan untuk mencetak sumber daya manusia yang profesional dan berkarakter sesuai kompetensi keilmuan. Dalam hal ini perguruan tinggi tersebut diharapkan dapat menanamkan konsep *successskills* pada generasi muda Bondowoso. Sebab, *successskills* merupakan keterampilan yang dibutuhkan seseorang untuk dapat terus mengembangkan dirinya. Dengan mengacu pada tiga pilar keterampilan utama, yaitu *learningskills* (keterampilan belajar), *thinkingskills*(keterampilan berpikir) dan *livingskills* (keterampilan hidup) sebagaimana dirumuskan oleh Broling (1989).

Sejak diresmikan mulai tahun akademik 2017/2018 program pendidikan yang diselenggarakan kampus UNEJ kabupaten Bondowoso terdiri 3 Fakultas dan 6 Prodi dengan Jumlah Mahasiswa 244 orang. Sedangkan kampus POLIJE di Bondowoso terdiri dari 3 Prodi dengan jumlah mahasiswa 98 orang. Ke depan program-program pendidikan yang ada akan terus ditingkatkan dalam rangka memberikan akses pendidikan seluas-seluasnya untuk putra-putri daerah Bondowoso.

Alhasil, hingga kini tujuan program tersebut sudah berkonstribusi positifdalam meningkatkan SDM masyarakat Bondowoso yang otomatis menopang peningkatan Indeks Pembanguna Manusia (IPM). Di samping itu, di tahun 2018 usia rata-rata lama sekolah penduduk sudah mulai merangkak naik ke 5.57 serta peningkatan Akses dan Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk Pendidikan Tinggi di Kabupaten Bondowoso.

Getar Desa

PERIODE kedua kepemimpinan Amin Said Husni banyak menuai prestasi yang membanggakan. Termasuk berbagai progam-program unggulan yang mampu medongkrak SDM masyarakat Bondowoso. Di bidang pendidikan Pemerintah Kabupaten Bondowoso meluncurkan program inovatif yakni Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (GETAR DESA).Tujuan program ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Rebuplik Kopi ini serta ikhtiar Bupati Amin Said Husni dalam rangka memperluas akses pendidikan kepada seluruh masyarakat. Akselerasi program melalui Geraka Pendidikan Kesetaran Berbasis Desa (GETAR DESA) ini akhirnya menjadi salah satu sektor mengantarkan Bondowoso memiliki tiketbebas dari status daerah tertinggal karena peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang sangat signifikan.

Program ini lahir sebagai respon atas rendahnya angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bondowoso yang masih bertengger di level 5,57 tahun. Artinya masyarakat Bondowoso banyak yang tidak lulus SD, tidak bersekolah meskipun di Kabupaten Bondowoso sudah mulai bermunculan putra daerah yang bergelar Doktor. Bupati Amin Said Husni menyadari betul problematika ini merupakan pekerjaan rumah Bondowoso yang harus segera diselesaikan apalagi diakhir pengabdian beliau sebagai Bupati Bondowoso. Untuk itu, Pemerintah Bondowoso melakukan berbagai upaya agar angka lama sekolah bisa merangsek naik sehingga bisa berdampak pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bondowoso.

Implementasi program ini dikemas dengan penyelenggaraan pendidikan pada peserta Wajib Belajar (WB) melalui paket A untuk peserta Wajib Belajar yang setara dengan Sekolah dasar (SD), paket B setara pendidikan ditingkat menengah (SMP) dan paket C yang diterapkan kepada mereka yang belum lulus pendidikan ditingkat menengah atas (SMA). Getar Desa ini dilaksanakan secara berkelanjutan bagi peserta didik Wajib Belajar yang telah menuntaskan

Paket A dipacu untuk melanjutkan pada paket B demikian seterusnya hingga menuntaskan paket C. Kegiatan ini didampingi oleh para tutor yang berasal dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Tentunya, tutor yang bisa mengampu merupakan guru yang telah memperoleh sertifikasi dalam asosiasi PGRI sehingga nantinya bisa memberikan pelajaran dan pembinaan yang baik kepada para wajib belajar.

Gebrakan awal pasca program ini di*launching*, peserta didik yang terjaring di periode atau tahun ajaran semester awal sudah mencapai 23.714 orang calon warga belajar. Kondisi ini potensi besar dalam mendongkrak kualitas pendidikan yang berimplikasi pada IPM Bondowoso.

Menariknya, terobosan yang ditempuh pemerintah Daerah bersumber dari anggaran Dana Desa (DD) serta kerjasama dengan pihak perbankan yag tergabung dalam forum CSR. Bupati Amin Said Husni juga menggaet berbagai unsur sebagai suksesor atas program Getar Desa tersebut, diantaranya Dewan Pendidikan Bondowoso, Polres Bondowoso, Kodim 0822 Bondowoso, MUI Bondowoso, PGRI, PKK Bondowoso, perbankan, Kepala Desa bahkan menjadikan Babinka dan Babinsa dilibatkan sebagai tutor.

BERDAYA; Bupati Amin Said Husni saat memberikan arahan dalam kegiatan Getar Desa di Desa Gadingsari-Binakal 2017. *(Foto/dokumen)*

Sinergitas menurut Bupati Bondowoso merupakan bentuk gotong royong semua pihak untuk menuntaskan buta aksara serta meningkatkan angka lama sekolah disamping memupuk kecintaan masyarakat pada ilmu pengetahuan. Sebagai wujud komitmen Pimpinan Daerah dalam beberapa kunjungan program Getar Desa ini, Kapolres Bondowoso AKBP Taufik HZ, Dandim Bondowoso Letkol Tarmuji, Kepala Dinas Pendidikan Hj. Endang Hardiyanti serta Kepala Desa turut serta untuk melakukan pemantauan program ini di lapangan. Beliau sangat berharap setiap Kepala Desa memiliki kepekaan dan responsif untuk melahirkan terobosan dan mengelola potensi yang ada di wilayah kerjanya masing-masing terutama yang berkaitan dengan pengembangan SDM.

Saat ini program Getar Desa dilaksanakan di seluruh kecamatan dan desa

FOKASI; Tidak hanya keterampilan nonteknis (*soft skill*) Getar Desa juga di perkaya dengan keterampilan teknis (*hard skill*). *(Foto/dokumen)*

di Kabupaten Bondowoso. Sebagai suplemen kegiatan dalam menstimulus motivasi belajar WB, Program ini juga dikolaborasikan dengan materi keterampilan (vokasi).Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso menjelaskan pendidikan vokasi yang diberikan meliputi cara pembuat olahan dari tape, berupa suwar-suwer, keripik tape, prol tape dan sejenis makan berbahan baku dari tape. Selain itu, mereka juga diajarkan membuat kue berbahan baku kelapa. Membuat kripik pisang, kripik talas, budidaya jamur tiram, membatik kain, dan diajari membuat anyaman berbahan baku bamboo, seperti membuat besek dari bambu, membuat tempat ikan pindang dari bambu.

Keseriusan pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam kegiatan ini, tidak hanya membekali Warga Belajar den-

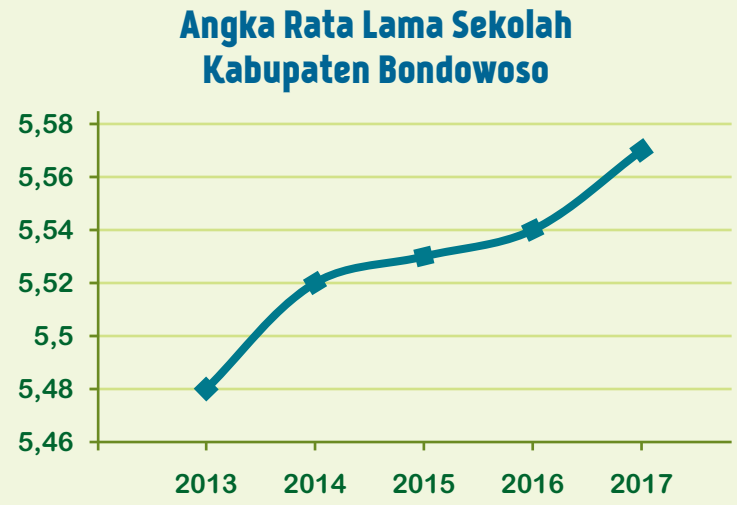

gan skill. Namun, Dinas Pendidikan berupaya memfasilitasi dalam mencarikan peluang pengembangan modal dari dinas-dinas terkait untuk mendukung dan membantu memberikan bantuan permodalan, baik untuk membeli peralatan, dan bahan baku, agar kegiatan mereka benar-benar berefek kepada peningkatan ekonomi keluarganya. Pemkab Bondowoso melalui dinas pendidikan, akan menfokuskan materi vokasi keterampilan yang akan dibagi menjadi 6 macam keahlian, diantaranya, pengolahan kopi, pembuatan kripik dengan bermacam-macam jenis bahan baku, pembuatan batik kain, pengolahan jamu bubuk instan, dan rempah. Tentuhal ini dengan memperhatikan potensi lokal masing-masing desa. Dengan demikian, kedepan alumni dari program Getar Desa ini memiliki kemandirian dalam bidang ekonomi sehingga mereka memiliki kecakapan hidup dan kemandirian terutama dalam memasuki dunia kerja yang kian kompetitif.

Pendidikan 24 Jam

PENDIDIKAN karakter bertujuan membentuk manusia berkarakter secara holistik yaitu insan yang mampu mengembangkan aspek fisik, emosi, sosial, kreativitas, spiritual dan intelektual siswa secara optimal (Heritage Foundation, 2003). Karakter adalah tujuan tertinggi dalam sebuah pendidikan, unsur-unsur pendidikan karakter yang terdiri atas tiga korelasi antara lain *moral knowing*, *moral feeling*, dan *moral behavior* (Thomas Lickona, 2004). Bangsa kita tentu menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa yang menjadi karakter khas dan adat ketimuran. Karena kesejahteraan sebuah bangsa bermula dari karakter kuat warganya (Lickona, 2004)

Ironisnya, pendidikan karakter saat ini banyak menjadi sorotan karena banyak hal, salah satunya adalah kegagalan pendidikan sebelumnya banyak mencetak manusia yang hanya terdidik secara intelektual namun juga tidak diiringi kecapakan spiritual, akhlaq dan moral. Bupati Amin Said Husni memberikan perhatian bagaimana memupuk dan menerapkan nilai-nilai karakter dari hal-hal yang sangat sederhana, namun pada akhirnya akan memberikan dampak yang sangat besar dimasa yang akan datang, tentunya bagi setiap individu yang mampu melaksanakan nilai-nilai karakter dengan baik.

Upaya yang dilakukan yaitu terobosan dalam memformulasikan pendidikan 24 jam. Menurut Syaeful Bahar selaku Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Bondowoso, program P24 jam ini merupakan ide orisinil dari hasil perenungan panjang Bupati Amin Said Husni setelah melakukan refleksi atas realitas sosial pendidikan karakter di Bondowoso. Program ini merupakan manifestasi konkrit dan respon Amin Said Husni atas maraknya prilaku remaja yang diluar kontrol, meskipun di kota Republik Kopi ini kasus deviasi moral yang teridentifikasi tidak sampai pada level akut.

Namun, Bupati yang sudah dua kali memimpin Bondowoso ini menganggap bahwa peran pendidikan harus dikembalikan pada ruh asalnya yakni tugas pendidikan tidak hanya terbatas di sekolah. Namun, perlu peran orang tua dan masyarakat. Pada prinsipnya bupati mengharapkan bahwa pendikan harus memanfaatkan kekuatan tiga pilar pendidikan sebagai segitiga emas pendidikan yakni masyarakat, keluarga dan sekolah. Karena keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak-anak, hal ini senada dengan pendapat Mohamad Mustari (2014:152) yang menyatakan bahwa keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan paling utama dalam proses sosialisasi anak

Beliau tidak menginginkan pendidikan hanya terjadi disekolah. Beliau justru menginginkan bahwa pendidikan juga berkelanjutan terjadi dirumah dan masyarakat sebagai ruang belajar yang lebih luas. Oleh karena itu bupati beranggapan bahwa sekolah, masyarakat, dan keluarga harus terintegrasi dalam proses pendidikan. Sehingga beliau memiliki suatu harapan dan semangat besar mensukseskan pendidikan Bondowoso melaluirealisasi gerakan pendidikan 24 jam.

Oleh kerena itu, seperti biasaya Bupati Bondowoso mengajak diskusi dengan Kepala Kemendiknas Hj. Endang Hardiyantidan Ketua Dewan pendidikan yang diketua oleh H. M. Syaeful Bahar. Beliau memaparkan harapan dan pandangannya untuk menemukan*win-win solution*dalammeningkatkan pendidikan di Bondowoso. Beliau berharap keberhasilan terobosan ini menjadi amal jariyah untuk para pemegang kebijakan di Bondowoso.Tentu program ini diharapkan menjadi ladang kebaikan bersama bagi siapapun yang terlibat untuk kemajuan masyarakat Bondowoso.

Singkatnya, pasca dicetuskan program P24 ini makaDinas Pendidikan, Dewan Pendidikan, dan Komisi IV DPRD Bondowoso melakukan studi banding untuk menemukan potret konkrit sekaligus sebagai acuan merancang *prototype* dalam mengimplementasikan program sejenis di Bondowoso. Dari berbagai *searching* referensi, akhirnya disepakati Yogyakarta sebagai rujukan karena telah lebih dahulu menerapkannya. Disana terdapat kampung masyarakat dan orang tua bersinergi dengan baik, bahkan ada jam tertentu semua orang tua mendampingi anaknya untukbelajar.

Menariknya sejak jam 18.00 sampai 21.00 semua masyarakat berkumpul bersama yang kegiatannya langsung dipimpin oleh perangkat kelurahan. Misalnya ada satu kompleks perumahan, maka diumumkan jam belajar sudah mulai melalui pengeras suara di musholla-musholla dan semua keluarga tidak boleh keluar rumah. Kecuali ada kebutuhan mendesak serta sudah mendapat ijin dari RT atau RW. Perangkat kampung seperti hansip atau pihak keamanan berjalan untuk memastikan bahwa program tersebut terlaksana. Jika ada keluarga yang terbukti nonton televisi maka mereka akan dapat teguran dari kelurahan RT atau RW.

Selepas itu, maka dinas pendidikan menindak lanjuti dengan melakukan *workshop* bersama bahwa pendidikan 24 yang telah diinisiasi oleh Bupati Bondowoso ini penerapannya harus disesuai dengan kearifan dan kebutuhan lokal di Bondowoso. Karena kesulitan bila harus mengadopsi sama persis seperti yang diterapkan di Yogyakarta. Karena di Bondowoso jam tertentu para orang tua belum ada dirumah dan setelah maghrib sampai isyak anak-anak masih melaksanakan pengajian sehingga harus ada beberapa yang berbeda. Akhirnya diputuskanlah, maka disepakati untuk membentukKampung Sinau di

Pondok Indah (PBI) RT. 16, 17, 18, 19 RW 5 kelurahan Nangkaan Kecamatan Bondowoso dengan Ketua Achmat Prajitno, Kampung Pintar beralamat di Griya Kembang Permai RT. 30, 31 RW X Desa Kembang Kecamatan Bondowoso ketua Sigit Hindarum, Kampung Santri berlokasi di Desa Ramban Kulon RT. 13, 14, 15 16 17 Kecamatan Cermee Bondowoso ketua Bapak Suwito, Kampung Belajar bertempat di Jl. Jend. Pol. RT. 2 RW 5 Keluarahan Kota Kulon Bondowosodengan ketua Dwi Putri Wahyuni Hamsin, Kampung Cerdas diselenggarakan di Perum Taman Nangkaan RT. 20 RW. 01 Kelurahaan Nangkaan Bondowoso Idi Yulis Pratiwi dan Kampung Ngajih dilakukan di Kelurahan Kademangan RT. 2 RW. 9 Bondowoso ketuaHafidz Wahyudi.

Kampung tersebut sebagai *pilot project*dalam mengimplentasikan program ini. Menariknya program tersebut juga mengajak beberapa tokoh agama dan masyarakat Bondowoso untuk terlibat dalam pelaksanaannya.Sampai saat ini, 6 titik tersebut telah melaksanakan program ini dengan optimal, dan alhamdulillah mendapat respon, sambutan dan dukungan yang luar biasa dari masyarakat. Karena pendekatan kegiatan ini, bersifat *Participatory Action*, maka dikemudian hari diharapkantumbuh kesadaran dari warga masyarakat dalam suatu komunitas untuk melakukan aksi-aksi transformatif, tugas pemerintah daerah hanya memberi stimulus dan inisiator untuk menyadarkan masyarakat.

Intinya, dalam pendidikan 24 jam ini peran masyarakat, sekolah dan keluarga bisa terintegrasi untuk memajukan pendidikan dalam menanamkan karakter, hingga timbul kesadaran bahwa pendidikan menjadi tanggung jawab bersama. Bupati Bondowoso tidak menginginkan terjadi *miscommunication*-antara pendidikan di sekolah, keluarga dan masyarakat. Di sekolah mendapat pendidikan baik-baik, ternyata di masyarakat justru menghadapi kenyataan yang berbeda atau sebaliknya. Oleh karena itu, pendidikan 24 jam pada prinsipnya mencari formulasi dalam mengkolaborasikan trilogi pendidikan antara di sekolah, keluarga, dan masyarakat

Gerakan Kembali Ke Mushalla

GERAKAN kembali ke musholla merupakan upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam memperkuat pendidikan karakter sekaligus tindak lanjut dari ide bupati tentang pendidikan 24 jam. Jadi, bupati berkesimpulan bahwa salahsatu faktor penyebab meningkatnya deviasi moral disebabkan karena gagalnya pendidikan karakter di negara ini. Program ini tentu, tidak lepas dari Visi dan Misi Bupati Amin Said Husni dalam membangun Masyarakat Bondowoso yang Beriman, Bermartabat, Berdaya secara Berkelanjutan. Untuk mencapai tiga pilar tersebut, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) harus menjadi prioritas. Menurut Tilaar membangun SDM yang berkualitas harus menyiapkan sumber daya manusia yang unggul, sadar akan identitasnya, serta sadar akan wawasan nusantara. Pandangan lain menurut Azyumardi Azra, bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas adalah manusia yang memiliki kualitas seimbang, beriman, berilmu (beriptek) dan beramal, cakap secara lahiriyah maupun batiniah. Tentu dengan tetap tidak tercerabut dari karakter bangsa yang telah menjadi identitasnya.

Pendidikan karakter yang didengung-dengungkan oleh pemerintah sejak beberapa tahun kebelakangan ini sejatinya adalah harapan untuk menyiapkan SDM yang berkualitas sebagaimana diimpikan oleh nusantara, ti-

dak terkecuali warga Bondowoso. Sejak Ki Hajar Dewantoro bahkan tokoh-tokoh kemerdekaan sebelum beliau, sampai *Founding Father* bangsa Indonesia, Sukarno yang mencanangkan *Nation and Character Building.* Maka, tak ayal sejak dulu bangsa kita dikenal karena karakter dan sifat serta kepribadiannya, persis seperti yang dikatakan oleh Ahmad Syauqi dalam bait syairnya: "*Sesungguhnya keberadaan suatu bangsa (dikenal oleh bangsa-bangsa lain) ditentukan oleh karakter/akhlaknya, jika karakter/akhlaknya hilang, maka lenyaplah keberadaan bangsa tersebut".*

Beliau berpikiran bahwa bangsa ini, khususnya Kabupaten Bondowoso memiliki bekal sejarah untuk diterapkan pada generasi bangsa, salah satunya yaituperan musholla dan guru ngaji. Sayangnya menurut Amin Said Husni, hari ini anak-anak sudah mulai menjauh dari musholla. Dalam hitungan matematis anak-anak yang mengaji di Musholla umumnya mereka yang masih berada di Sekolah Dasar. Pasca sekolah dasar umumnya mereka enggan ke Musholla. Selain itu, bila dulumengaji di musholla atau Madrasah Diniyah muatan kurikulum dan materi yang diajarkan sudah mencakup agama, fiqh, akhlak, dan tauhid serta pemahaman keagamaan dasar lainnya. Namun, belakangan in-

imuatan materi pembelajaran telah mengalami pergeseran, dengan hanya menekankan pada proses belajar baca tulis Alquran.

Lebih memprihatinkan lagi di waktu-waktu belajar mereka tidak berada di tempat yang baik misalnya berada di jalan atau di tempat hiburan, padahal pada saat itu mereka seharusnya berada di tempat yang baik. Misalnya ketika setelah maghrib seharusnya mereka tidak turun dari musholla sejak Maghrib sampai Isya'. Tapi, kondisi saat ini dengan alasan sudah bisa membaca al Qur'an, anak-anak tidak mau lagi ke musholla (mengaji). Akhirnya Bupati Amin Said Husni meminta banyak pihak untuk membuat sebuah tawaran program praktis agar anak-anak mau untuk kembali ke musholla atau ke Madin/ TPQ. Oleh karena itu, Bupati Bondowoso meminta Dinas pendidikan dan Dewan Pendidikan serta banyak pihak untuk melakuan beberapa kali pertemuan termasuk melibatkan persatuan Guru Ngaji (Persada Agung) ditambah juga Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), guru-guru Baca Tulis Al Qur'an (BTQ) dan Pendidikan Agama Islam (PAI).

Akhirnya muncul gerakan kembali ke musholla. Obsesi dan harapan yang tinggi dari berbagai pihak, maka program ini harus dirancang se-idealis mungkin. Untuk itu, intensitas kajian dalam berbagai diskusi dan workshop ditingkatkan dalam rangka menyerap aspirasi dan gagasan. Sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam mengelola program ini, maka gerakan kembali ke musholla dikuatkan oleh landasan yuridis dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 9 tahun 2017tentang gerakan kembali ke Musholla.

Karena tujuan gerakan ini bukan sekedar untuk bisa mengaji Alquran, tetapi lebih dari itu inti gerakan ini untuk menanamkan karakter. Ide brilian inilahir jauh sebelum Presiden Jokowi membuat perpres tentang pendidikan penguatan karakter tahun 2017. Hal ini mengindikasikan, kepemimpinan visioner Bupati Bondowoso untuk membentuk karakter sudah membaca jauh ke depan. Tentunya, program ini harus di*backup* dan difasilitasi oleh pemerintah daerahsebagai bagian mewujudkan pendidikan yang optimal.

Keinginan dalam menyelenggarakan program ini, diawali obsesi untuk mengintegrasikan secara kolaboratif dan holistik antara tiga komponen pendidikan yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat. Program ini, didesain agar sekolah memiliki kewajiban untuk menggiring peserta didiknya ke musholla dengan cara memerintahkan untuk mengaji kembali ke musholla dengan memastikan akan ada penilaian yang juga dimasukan kedalam nilai guru agama atau guru BTQ.Apabila mereka tidak mengaji, maka nilai tidak akan diberikan. Artinya intensitas sekolah dan guru ngaji harus berkoordinasi dengan baik.

Implementasi gerakan ini, dilakukan pertama kali dengan mengundang wali murid untuk memberikan nama serta mendata guru ngaji mereka. Kemudian sekolah mengundang guru-guru ngaji tersebut untuk bekerjasama dengan sekolah. Artinya sekolah akan menitipkan peserta didiknya kepada guru ngaji. Bagaimana kelanjutnya? Guru ngaji dan sekolah akan berkoordinasi melalui buku penghubung untuk turut serta memberikan nilai dengan batas 30% dan sisa nilainya menjadi tanggung jawab sekolah. Dengan ini diharapkan antara guru ngaji, masyarakat dan sekolah terintegrasi dengan baik.Demikian juga orang tua memiliki hak untuk memberikan penilaian akhlak kepada anak-anaknya. Sekolah diberi kebebasan dalam mengimplementasikan program

ini, misalnya SMPN 1 Bondowoso memilih dengan cara mengundang guru-guru datang ke sekolah dan peserta didik mendapatkan tambahan materi di materi wajib sekolah sedangkan sebagian lain misalnya di SMPN 2 Tenggarang dilakukan dengan cara sekolah dan guru medatangi langsung guru-guru dan menitipkan peserta didiknya kepada beliau. Meskipun konsepnya berbeda-beda namun pada prinsipnya semua komponen menunjukan efektifitas dalam penerapan program gerakan ke musholla.

Gerakan Bondowoso Menghafal

PROGRAM Bondowoso menghafal Alquran adalah salah satu program pemerintah untuk membumikan Al Quran. Sebagaimana disampaikan Kepala Bagian Kesra program Bondowoso Menghafal Al Qur'an (BMA) merupakan upaya Pemkab Bondowoso untuk membina dan mencetak Tahfidz-tahfidz baru di Kabupaten Bondowoso. Program ini sejatinya merupakan implementasi dari Visi dan Misi Bupati Bondowoso dalam mencetak generasi emas Qurani bagi masa depan Bondowoso. Karena negara dan nilai agama ini merupakan pilar yang saling mengokohkan sendi-sendi pembangunan bangsa.

Program ini telah dicanangkan sejak 20 Oktober 2014 dan realisasi Wisuda perdana dilangsungkan pada hari Senin, 2 Novermber 2015 dengan jumlah peserta wisuda 958 peserta. Kehadiran program ini mendapat respon dan antusias yang tinggi dari masyarakat Bondowoso, menurut Bupati Bondowoso semangat putra putri daerah Bondowoso untuk menghafal al Qur'an sangat tinggi meski ditengah hiruk pikuk modernisasi. Hal ini terbukti pada tahun 2016 tercatat sebanyak 1.219 wisudawan mengikuti prosesi wisuda yang diselengggarakan di aula Ijen View. Sedangkan tahun 2017Pemerintah Kabupaten Bondowoso mewisuda 1741 Tahfidz Quran atau penghafal Al Quran yang tergabung dalam program Bondowoso Menghafal Al-Quran (BMA). Pelaksanaan program ini dikemas dalam lima paket hafalan, yakni paket I yang meliputi Juz 30, paket II yang meliputi Juz 1-3, paket III yang meghafal surat Yaasin, Ar Rahman dan Al Waqiah dan paket IV yang menghafal surat Al Mulk dan Al Kahfi serta Paket V yang menghafal diluar paket I hingga paket IV

Kehadiran program ini sekaligus menanamkan kegemaran membaca dan mempelajari al-Qur'an kepada putera-puteri Bondowoso sejak dini. Tentunya melalui sinergitas lingkungan sekolah, masyarakat dan keluarga sebagai wadah yang harus dimanfaatkan secara efektif dan masif untuk memberikan pembelajaran al-Qur'an kepada generasi muslim.

Terkait hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bondowoso terus mendorong para orang tua dan guru untuk memaksimalkan penerapan Peraturan Bupati Nomor Bondowoso Nomor 28 Tahun 2011 tentang Muatan Lokal Baca Tulis al-Qur'an Kabupaten Bondowoso tentang Baca Tulis al-Qur'an untuk siswa pada pendidikan dasar dan menengah. Di samping itu, pemerintah daerah juga mendorong para orang tua dan guru ngaji untuk terlibat aktif dalam penerapan Peraturan Bupati Nomor 9 tahun 2017 tentang Gerakan Kembali ke Mushalla. Kedua regulasi tersebut diterbitkan dalam rangka penguatan pendidikan keagamaan bagi

generasi muda di Kabupaten Bondowoso, utamanya melalui pembelajaran dan progam menghafal al-Qur'an di lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat. Maka tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Bondowoso sangat optimis dengan menargetkan wisudawan wisudawati lebih dari 2500 pengahafal al-Qur'an. Semoga program ini akan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Safari Pendidikan

SAFARI pendidikan menjadi ajang silaturrahim Bupati Amin Said Husni dengan praktisi pendidikan di kabupaten Bondowoso. Program ini sekaligus menjadi agenda tahunan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyampaikan segala persoalan pendidikan yang mereka alami dengan tujuan meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan dimasa kini dan masa yang akan datang.

Kegiatan ini bertajuk untuk menguatkan pendidikan dan memajukan kebudayaan di Kota Tape ini. Karena para guru dalam pandangan beliau adalah pewaris para nabi. Oleh karena itu, diharapkan guru tidak hanya melakukan *transfer of knowledge* (transfer pengetahuan) tetapi juga sebagai pendidikan yang melakukan *transfer of value*

(transfer nilai) berupa pendidikan karakter, budi pekerti dan akhlak untuk putra putri daerah di Kabupaten Bondowoso.

Melalui safari pendidikan ini, beliau terus memberikan motivasi bagi semua guru untuk menanamkan tekad dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Prestasi dan capaian pendidikan yang sudah diraih dalam 10 tahun kepemimpinan beliau diharapkan bisa terus di tradisikan dalam sistem pendidikan di Bondowoso. Meskipun, beliau menyadari masih banyak pekerjaan rumah yang perlu untuk diperbaiki. Namun, setidaknya tatanan dan regulasi dunia pendidikan yang sudah tertata ini, bisa dilanjutkan oleh kepemimpinan berikutnya. Menurut kepala Dinas Pendidikan Bondowoso beberapa program dan kebijakan

yang sudah dilaksanakan, selama kepemimpinan Bupati Amin Said Husni. Diantaranya, pendidikan 24 jam atau P24, gerakan kembali ke musholla, peningkatan kompetensi dan profesinalisme guru, dan meningkatan capaian kinerja pendidikan untuk meningkatkan angka rata-rata lama sekolah. Beliau berharap kedepan semua elemen harus bahu membahu, agar capaian kinerja pendidikan bisa sampai ke tingkat maksimal. Tentu cita-cita tersebut bisa tercapai bila semua pihak bisa bersinergi untuk memajukan dan meningkatkan dunia pendidikan di kabupaten Bondowosoyang tentunya sesuai dengan kondisi adat dan budaya Bondowoso tanpa mengesampingkan aturan dan kebijakan dari Pemerintah pusat

Dalam safari pendidikan, Bupati juga memaparkan 'Resolusi Tuntas' tahun 2018. Resolusi ini diharapkan mampu menyelesaikan semua tugas Pemerintah Kabupaten Bondowoso bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di akhir masa kepemimpinan Bupati Amin Said Husni.

Kota Layak Anak

KABUPATEN Layak Anak (KLA) adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintahan, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. (Pasal 1 angka 3 Permen PP dan PA No. 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak).

Kabupaten/kota Layak Anak dikonstruk diatas sendi-sendi sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak

Pemenuhan kebutuhan pendidikan anak diperlukan adanya intervensi pencegahan terjadinya bahaya terhadap anak di tempat tinggal mereka, yaitu dengan melakukan modifikasi di lingkungan tempat tinggal (Bartlett, 2002). Kabupaten Bondowoso telah berkomit-

men mewujudkan KLA, Artinya Bupati Amin Said Husni berkontribusi dalam mendukung terwujudnya Indonesia Layak Anak dan memastikan anak-anak di Kabupaten Bondowoso bisa tumbuh dan berkembang secara optimal, terlindungi dan aktif berpartisipasi. Prestasi ini ditandai dengan adanya kelayakan dan kecukupan infrastruktur, sarana dan prasarana bermain bagi anak di Bondowoso agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Dengan adanya KLA ini berarti Pemerintah Kabupaten Bondowoso telah menerapkan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Akselerasi perkembangan zaman di era globalisasi ini diperlukan pengembangan dan pemahaman paradigma baru untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia harus dilakukan dan dipelihara sejak dini dengan membangkitkan motivasi dan kemauan untuk maju. Kondisi ini, sangat disadari dibawah kepemimpinan Bupati Bondowoso Amin Said Husni. Berbagai inovasi dan terobosan digagas dalam rangka mengeksplorasi kemampuan dan memberikan dorongan positif untuk bangkit dari keterpurukan yang disematkan pada Kota Tape ini. Dibawah kepemimpinan beliau pulalah kesadaran dengan terus bekerja keras suatu prestasi bisa diraih terutama sektor pendidikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan untuk terus meraih masa depan yang progresif. Hal ini selaras dengan teori progresivisme John Dewey (1987)yang berpandangan, bahwa belajar bukan merupakan mereproduksi pengetahuan yang telah ada, melainkan belajar merupakan rekonstruksi yang terus menerus sesuai dengan penemuan-penemuan baru.

Tahun 2017 Kabupaten Bondowoso kembali menorehkan prestasi di kancah Nasional dengan meraih predikat sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menetapkan Kabupaten Bondowoso.Prestasi ini tidak lepas dari kerja keras dan komitmen yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Bondowoso dalam mewujudkan desa layak anak sebagai salah satu langkah menekan tingginya pernikahan anak. Terdapat beberapa terobosan yang telah dilakkan yaitu memben-

PAUD; Seminar membangun generasi platinum yang diadakan Disdikbud bekerjasama dengan forum Paud 2015. *(Foto/dokumen)*

tuk 7 desa layak anak di Bondowoso, membentuk Forum Anak Kabupaten yang bertugas memberi konseling kepada anak. Program ini juga bertujuan untuk menekan tingginya angka pernikahan anak, karena didalam program juga dilakukan berbagai penyuluhan termasuk meminimalisir terjadinya kekerasan pada anak baik fisik maupun psikis. Prestasi ini sekaligus membuktikan bahwa Kabupaten Bondowoso memiliki keunggulan dan potensi dalam sumber daya alam dan sumber daya manusia. Keberhasilan pelaksanaan KLA di Bondowoso tidak lepas dari adanya integrasi dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan disetiap level dalam membangun.

Paud Prestasi

GENERASI masa depan bangsa tidak terjadi begitu saja, tetapi melalui suatu proses melalui pendidikan. Menyiapkan generasi bangsa tentu harus dimulai dari pendidikan dini terutama *golden age* peserta didik. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam menyiapkan generasi emas di Bondowoso. Berupaya mengenalkan dan memupuk peserta didik sejak usia dini. Karena melalui program inilah kesadaran pendidikan masyarakat Bondowoso kian tertanam. Dalam rangka memberikan akses pendidikan kepada anak-anak usia dini maka pemerintah Kabupaten Bondowoso mendirikan 46 lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Pendirian lembaga ini pula yang mengantarkan Kabupaten Bondowoso menjadi Kabupaten PAUD Nomor Dua di Indonesia. Tujuan didirikannya lembaga ini tentunya untuk memberikan akses pendidikan seluas-luasnya kepada anak-anak di Bondowooso serta sebagai komitmen dalam menciptakan Kabupaten Layak Anak (KLA). Konsep pendidikan PAUD di Kabupaten Bondowoso menerapkan gerakan PAUD holistik-integratif yang penyelenggaraannya melibatkan tujuh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yakni Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabuapten Bondowoso yang dinahkodai Bunda PAUD Bondowoso, Faizah Amin Said Husni.

Semua elemen tersebut bersinergi seusuai peran dan program masing-masing dalam mewujudkan dan menyelenggarakan PAUD holistik-integratif dengan berupaya semaksimal mungkin membedayakan potensi dan sumber daya masing-masing untuk membina dan mengembangkan PAUD. Sehingga pada tahun 2016 Bunda PAUD Kabupaten Bondowoso Ibu Hj. Faizah Amin Said Husi mendapatkan kembali anugerah PAUD Tingkat Nasional. Pada tahun sebelumnya Bupati Bondowoso bapak Amin Said Husni terpilih sebagai peringkat ke II dalam pengelolaan Program Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini. Sedangkan Tim FasilitatorMasyarakat menempati peringkat ke III dalam program Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini.

Prestasi tersebut tentunya bukti keseriusan pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam bidang pendidikan. Bahkan di akhir kepemimpinannya sebagai bukti besarnya perhatian dan komitmen terhadap pendidikan usia dini, bapak Amin Said Husni mendirikan Lembaga Pendidikan untuk Anak Usia Dini bernama Alifiya yang berlokasi di Tamansari Bondowoso.

Pendidikan karakter itu adalah inti dari pendidikan yang sesungguhnya. Mau mendidik orang itu, harus dimulai dari pendidikan karakter.

Drs. H. Amin Said Husni

PERESMIAN
PONDOK KESEHATAN
KALITAPEN
KECAMAT
Kalitapen,

Gugusan Gerakan *Kesehatan*

PEMERINTAH Kabupaten Bondowoso memiliki komitmen yang tinggi dalam memberikan akses dan layanan kesehatan kepada masyarakat, terutama masyarakat miskin. Berbagai program kesehatan serta terobosan terus dilakukan dalam berbagai bentuk program kesehatan. Hal ini sebagai wujud nyata bahwa kesehatan merupakan hak semua lapisan masyarakat. Mutu pelayanan kesehatan merupakan gabungan dari dua dimensi yaitu : *quality* (mutu) dan *health service* pelayanan kesehatan. Menurut Tjiptono (2000), mutu merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Sedangkan menurut Depkes RI menyebutkan bahwa mutu adalah kesempurnaan atau tingkat kesempurnaan yang diidamkan atau yang ditetapkan (standar). Dengan demikian untuk mengukur mutu pelayanan kesehatan bisa dilakukan dengan membandingkan penampilan pelayanan kesehatan dengan standar pelayanan yang ditetapkan

Upaya kesehatan ibu dan anak adalah upaya di bidang kesehatan yang menyangkut pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu menyusui, bayi dan anak balita serta anak prasekolah. Pemberdayaan masyarakat bidang KIA masyarakat dalam upaya mengatasi situasi gawat darurat dari aspek non klinik terkait kehamilan dan persalinan.

Stop Berduka

ANGKA Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Bondowoso menjadi perhatian serius oleh pemerintah Kabupaten Bondowoso. Keseriusan Bupati Bondowoso tertuang dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 25 Tahun 2017 tentang keterpaduan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan non-OPD dalam upaya percepatan penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (AKI/AKB). pemerintah Kabupaten Bondowoso memformulasikanterobosan program untukmenekan angka kematian ibu dan bayi dengan meluncurkan program Sinergi Total Pencegahan Bersalin di Dukun Bayi dan Selamatkan Ibu

(STOP BERDUKA). Ikhtiar pemerintah daerah ini membuahkan hasil, karena Bupati Bondowoso mampu meningkatkan kesehatan masyarakat melalui peningkatan angka harapan hidup, karena semakin tinggi angka harapan hidup, maka semakin tinggi pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Dampak dari keberhasilan ini mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang akhirnya berdampak secara *de facto* pada lepasnya status daerah tertinggal yang lama disematkan pada Kabupaten Bondowoso.

Sejatinya, program ini sudah lama dikampanyekan termasuk Persalinan Aman Inisiasi Menyusui Dini (Persamida), tujuannya tentu, untuk mendorong persalinan kesehatan para bidan serta mitra dukun bayi. Kehadiran Program STOP BERDUKA dilatarbelakangi oleh tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) per Seratus Ribu kelahiran hidup dan Angka Kematian Bayi (AKB) per Seribu kelahiran hidup sehingga pemerintah kabupaten Bondowoso merumuskan program STOP BERDUKA sebagai *win-win solution* atas problematika yang selama ini terjadi.

Pelaksanaan program ini melibatkan seluruh *stakeholder* mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai desa. Pemerintah Bondowoso juga membangun kemitraan dengan dukun bayi untuk tidak melakukan tindakan persalinan dan membawa ibu bersalin ke tenaga medis terdekat. Wujud kemitraan dengan dukun bayi dengan memberikan insentif sebesar Rp 50.000 bagi setiap dukun bayi yang membawa ibu bersalin ke tenaga kesehatan, termasuk meminta dukun bayi agar menganjurkan setiap ibu memeriksakan kepada tim medis setempat untuk mengecek kondisi kandungannya secara rutin. Karena penanganan yang dilakukan oleh tim medis yang sudah memiliki kualifikasi tentu lebih efektif dan efisien.

Bupati Bondowoso menggenjot semua elemen bisa bersinergi secara total, karena tugas ini tidak hanya milik Dinas Kesehatan, bidan, petugas puskesmas, tapi juga tugas kepala desa, camat, dan tokoh masyarakat. Sinergitas peran seluruh jajaran Organisasi Perang-

Tabel AKI dan AKB mulai tahun 2008 – 2018 :

Tabel I (Periode I):

Uraian	2008	2009	2010	2011	2012	2013
AKB	16,55	20,05	21,00	17,57	17,43	19
AKI	109,17	197,68	184,15	148,00	109,50	206,44

Tabel II (Periode II):

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
AKB	17,09	16,52	17,22	13,59	29,92*
AKI	156,18	188,00	196,00	146,63	434,36*

*Tahun 2018 data per bulan maret

kat daerah Kabupaten Bondowoso menjadi instrumen kunci dalam mewujudkan keberhasilan programini. Upaya tersebut dilakukan dengan mengidentifikasi dan memaksimalkan peran masing-masing OPD. Semangat dan komitmen untuk terus bersinergi terus dibangun dalam rangka memaksimalkan prorgram bidang kesehatan ini.Alhasil, sejak MoU Stop Berduka dilakukan pada tahun 2017 angka persalinan pada dukun bayi turun sebesar 50 persen. Bila melihat data AKI/AKB di Bondowoso semakin tahun semakin rendah Tahun 2015 itu ada 19 ibu dan 167 bayi yang meninggal, tahun 2016 ke tahun 2017 yaitu 195,81/100.000 kelahiran hidup (20 kasus) menjadi 148,93/100.000 kelahiran hidup (15 kasus), indikator lain terjadi penurunan AKB (Angka Kematian Bayi) dari tahun 2016 ke tahun 2017 yaitu 17,42/1000 kelahiran hidup (178 kasus) menjadi 13,9/1000 kelahiran hidup (140 kasus), penurunan jumlah persalinan yang ditolong oleh dukun bayi dari tahun 2016 ke tahun 2017 yaitu 510 menjadi 316 persalinan.

Dengan menekan angka kematian ibu dan bayi, Bupati Amin Said Husni optimis bisa meningkatkan harapan hidup masyarakat, Kedepan angka harapan hidup terus mengalami peningkatan yang signifikan. Dari data tersebut angka kematian semakin menurun apalagi ditahun 2017 mengalami penurunan drastis. Jika 2016 ada 20 ibu meninggal karena melahirkan, 2017 menurun menjadi 15 orang, dan ditargetkan di 2018 kembali menurun menjadi <10 orang. Sedangkan untuk angka bayi meninggal, juga mengalami penurunan, jika 2016 ada 178 bayi meninggal, tahun 2017 telah terjadi menurun menjadi 138 dan diharapkan di 2018 tidak lebih dari 100 bayi yang meninggal akibat salah penanganan.

Bupati Bondowoso Amin Said Husni juga berharap program Stop Berduka ini menjadi langkah solutif Pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui Dinas Kesehatan dalam memberikan pelayanan persalinan agar pelayanan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Hal ini dilakukan agar Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Bondowoso mampu diminimalisir. Sebab, AKI/AKB yang tinggi menjadi salah satu indikator suatu daerah masuk dalam kategori tertinggal.

Sebagaimana disampaikan Mohammad Imron, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso, angka kematian ibu dan bayi bergantung pada kondisi saat masa kehamilan, saat persalinan dan nifas. Mayoritas kasus kematian ibu dan bayi di Bondowoso didominasi oleh pendarahan dan keracunan kehamilan. Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa kasus kematian ibu dan anak diakibatkan oleh pendarahan dan keracunan saat hamil. Untuk itu, pemantauan dan pemeriksaan kepada para ibu baik saat masa kehamilan dan pasca persalinan perlu diintensifkan.

Selain itu, upaya peningkatan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau perlu dilakukan secara berkesinambungan. Salah satunya melalui peningkatan akreditasi puskesmas sebagai fasilitas kesehatan pertama masyarakat. Peningkatan SDMK (baik kuantitas dan kualitas) dan sarana prasana kesehatan juga perlu mendapat perhatian.

GESIT

SEKTOR sanitasi di pedesaan akan mengalami perubahan dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat untuk capaian*outcome* yang lebih baik. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa pendekatan konvensional yang hanya difokuskan pada pencapaian target rumah tangga melalui subsidi fisik belum berdampak signifikan pada perubahan kesehatan dan sosial masyarakat. Penelitian Rogers (1974) menunjukan bahwa sebelum seseorang mengadopsi perilaku baru, di dalam diri orang tersebut harus terjadi beberapa proses berurutan, *awarness* (kesadaran), *interest* (merasa tertarik), *evaluation* (menimbang-nimbang), *trial*, *adoption*.

Untuk mewujudkannya, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bondowoso meluncurkan program Gerakan Sanitasi Total (GESIT) sebagai upaya mewujudkan Bondowoso bebas dari Buang Air Besar (BAB) sembarangan atau *Open*

Defication Free (ODF). Kehadiran program ini diharapkan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya untuk tidak membuang air sembarangan. Realisasi program ini menurut Kepala Dinas Kesehatan Bondowoso terdiri dari dua hal yang saling berkaitan yakni jamban dan ketersediaan air bersih. Dalam program GESIT ini, akan dilibatkan tiga pilar di kecamatan maupun desa serta memanfaatkan dana desa (DD) dan pendanaan dari Pemerintah Kabupaten (PEMKAB).Program Gerakan Sanitasi Total (GESIT) ini merupakan bentuk ikhtiar dalam memformulasikan peningkatan akses terhadap sarana yang menunjang hidup sehat masyarakat Bondowoso.

Program ini direalisasikan dalam bentuk jambanisasi yang melibatkan organisasi profesi mulai dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI),Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Perawat serta Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), harapannya untuk membantu pembuatan jamban dibeberapa wilayah di Bondowoso. Bupati Bondowoso Amin Said Husni memberikan support yang tinggi pada program Gesit yang diinisiasi oleh Dinkes Bondowoso. Bahkan beliau, memberikan sebagian gajinya sebagai bupati untuk pembuatan jamban tersebut. Saat ini, prosentase penggunaan jamban di Bondowoso masih sebesar 55,22 persen. bahkan pada tahun 2017, masih ada 20 dusun dari delapan desa di lima kecamatan yang dinyatakan ODF.

Sasaran program GESITini yaitu masyarakat yang belum mempunyai akses terhadap sarana jamban yang sehat. Melalui stimulus yang dilakukan pemerintah kabupaten Bondowoso, masyarakat dapat mengubah perilaku secara kolektif untuk mempunyai akses terhadap jamban sesuai kemampuan dan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di wilayah masing-masing. Guna mencapai sasaran yang lebih luas, metode ini akan memanfaatkan seluruh potensi yang ada, seperti sekolah, organisasi massa, kelembagaan sosial termasuk prasarana, adat budaya dan kebiasaan masyarakat. Semua elemen masyarakat diharapkan terlibat dalam

proses pemberdayaan dan berkontribusi untuk mendorong terciptanya wilayah yang bebas dari buang air di sembarang tempat.

Tantangan yang dihadapi Kabupaten Bondowoso terkait pembangunan kesehatan, khususnya bidang sanitasi masih sangat besar. Untuk itu perlu dilakukan intervensi terpadu melalui pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Sebagai upaya mewujudkan sanitasi total di Kabupaten Bondowoso dalam menyediakan akses jamban.Pemerintah Kabuapten Bondowoso terus melakukan peningkatan alokasi anggaran untuk penyediaan akses jamban kepada masyarakat dan inovasi program sanitasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso.Selain itu, pelaksanaan program ini juga dilakukan dengan melibatkan peran serta sektoral seperti Dinas PUPR.

Gebrak Meja

KESEHATAN individu maupun kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu: lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan keturunan (karakteristik individu) (Hendrik L. Blum, 1974). Keempat faktor tersebut selain berpengaruh langsung kepada kesehatan, juga saling berpengaruh satu dan lainnya. Status kesehatan akan tercapai secara optimaljika keempat faktor tersebut secara bersama-sama mempunyai kondisi yang optimal pula.Bila salah satu faktor kondisinya terganggu (tidak optimal), maka status kesehatan akan tergeser di bawah optimal.

Menurut Azwar (2007), faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap dapat dibedakan menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi jenis kelamin, umur, pendidikan, pengalaman pribadi dan emosi. Faktor eksternal meliputi media massa, institusi pendidikan, institusi agama dan masyarakat.

Demam Berdarah Dengue (DBD) membutuhkan perhatian serius dari masyrakat dan pemerintah dalam mengubah pola hidup sehat masyarakat. Karena umumnya saat musim hujan atau pun pancaroba datang, masih terdapat beberapa wilayah yang masih terkena serangan penyakit demam berdarah.

DBD memiliki korelasi dekat dengan pola hidup sehat masyarakat. Karenanya, pemerintah harus proaktif mewujudkan pengelolaan lingkungan yang baik guna mencegah dan mengurangi munculnya jentik nyamuk *Aedes Aegepty* yang menjadi pemicu munculnya DBD.

Untuk menanggulangi hal tersebut, Dinas Kabupaten Bondowoso berupaya melakukan perubahan kultur masyarakat untuk hidup bersih dengan menggalakanprogram Gerakan Bersama Masyarakat dan Karyawan Mengendalikan Jentik Aedes (GEBRAK MEJA). Program ini bertujuan untuk mengendalikan penyebaran penyakit demam berdarah di Kabupaten Bondowoso. Program Gebrak Meja ini merupakan inovasi Dinas Kesehatan Bondowoso guna meningkatkan angka bebas jentik melalui konsep satu rumah satu Jentik sehingga dapat mengurangi insiden serta angka kematian akibat dari demam berdarah. Tujuannya program ini sekaligus melakukan pemetaan terhadap penularan demam berdarah

Menurut Pasidi Shidiq, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Bondowoso, program Gebrak Meja ini merupakan tindak lanjut dari gerakan Satu Rumah Satu Jumantik (Juru Pemantau Jentik) yang digalakkan di seluruh Indonesia oleh kementrian Kesehatan.Jumantik merupakan anggota masyarakat yang dilatih oleh Puskesmas setempat untuk memantau keberadaan dan perkembangan jentik nyamuk.Pengendalianangka bebas jentik melalui konsep 1 rumah 1 jumantik akibat DBD (Demam Berdarah Dengue) perlu mendapatkan dukungan dan peran serta berbagai komponen masyarakat untukmemberdayakan masyarakat dengan melibatkan setiap keluarga dalam pemeriksaan, pemantauan dan pemberantasan jentik nyamuk untuk mengendalikan penyakit DBD di suatu lingkungan dengan cara Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dan 3M plus.

Dalam praktiknya, setiap warga menjadi jumantik di rumah masing-masing. Kemudian setiap minggunya mereka

diminta untuk melapor ke kader Jumantik di masing-masing Desa. Selanjutnya, Jumantik ini memeriksa kondisi rumah yang punya resiko perkembangbiakan nyamuk. Gerakan ini di masing-masing daerah dibentuk kelompok Gebrak Meja yang diseleggarakan di setiap kecamatan dengan struktur organisasi melibatkan unsur Muspika dan Puskesmas di setiap desa. Hasil dari realiasasi program ini menurut Pasidi kasus DBD mengalami penurunan yang signifikan. Pada 2017 hingga bulan Mei ini tercatat 255 kasus DBD, dengan dua kasus kematian. Sedangkan pada tahu lalu 2016, pada periode yang sama (Januari – Mei) terjadi 530-an kasus kematian enam orang.

Tak ayal, prestasi yang telah diraih pemerintah Kabupaten Bondowoso ini mendapatkan apresiasi positif dari dr Kohar Santoso selaku Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Propinsi Jawa Timur (Jatim), karena Gerakan Bersama Masyarakat dan Karyawan Mengendalikan Jentik Aedes (Gebrak Meja) berhasil dalam mencegah dan mengurangi angka kasus demam berdarah dengue (DBD) di Kabupaten Republik Kopi ini. Bahkan, beliau berharap Kabupaten Bondowoso bisa menjadi referensi dalam mengurangi dan mencegah kasus DBD oleh kabupaten lain dalam mewujudkan sinergitas yang baik antara pemerintah hingga level desa, karena kaberhaslan program ini tidak lepas dari peran serta dan dukungan antara pemerintah daerah dengan melibatkan Camat, Kades dan Jumantik yang rutin melakukan advokasi kepada masyarakat tentang pola hidup sehat.

Prestasi Bidang Kesehatan

PROGRAM – program dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas yang telah berhasil mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2017 salah satu contohnya adalah berhasilnya terakreditasi 25 Puskesmas dengan rincian sebanyak 12 Puskesmas Akreditasi Madya dan 13 Puskesmas Akreditasi Dasar. Untuk dari segi peralatan kesehatan bahwa seluruh Puskesmas sudah menggunakan radiomedik dan bisa terakses dengan UGD RSUD Koesnadi Bondowoso

Beberapa capaian program yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bondowoso di bidang kesehatan yaitu pembangunan sistem melalui pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan, peningkatan layanan ibu dan bayi serta pengadaan dan pengelolaan obat esensial generik masyarakat serta menyediakan obat dan perbekalan di Puskemas dan sarana pelayanan kesehatan dibawahnya dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pelayanan dasar lainnya. Realisasi dalam menyediakan sarana prasarana juga menggembirakan, pasalnya tren yang positif dari tahun 2008 sampai tahun 2012 jumlah posyandu purnama mandiri terus bertambah sehingga pelayanan kesehatan khususnya bagi ibu dan balita menjadi lebih luas, merata dan terjangkau hingga ke seluruh pelosok desa.

Progres yang positif lainnya pemerintah Kabupaten Bondowoso mampu meminimalisir angka kematian bayi dan ibu hamil serta ibu bersalin pada tahun 2012 lebih rendah dari tahun 2011. Capaian realisasi kinerja pada program ibu dan anak ini secara umum telah melampaui target yang diharapkan diantaranya cakupan kunjungan neonatus, cakupan kunjungan ibu hamil, cakupan kunjungan bayi, dan jumlah ibu hamil mendapatkan Fe, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk menjaga kehamilan dan kesehatan anak semakin tinggi. Layanan lainnya yaitu peningkatan layanan pada pasien gangguan jiwa, cakupan rawat jalan, cakupan rawat inap, dan jumlah desa beryodium. Berdasarkan data statistik kesehatan capaian indikator cenderung naik serta menunjukkan adanya peningkatan cakupan pasien tertangani tentu ini didukung oleh peningkatan sarana prasarana kesehatan menjadi perhatian serius pemerintah daerah Bondowoso. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan, kualitas hidup dan kesejahteraan sosial yang tinggi. Pelaksanaan program dilakukan untuk peningkatan kapasitas laboratorium, pengawasan obat, melakuan perbaikan gizi masyarakat, dan pengembangan lingkungan sehat dengan menyelenggaraan kesehatan lingkungan dan percepatan pembangunan sanitasi permukiman study EHRA.

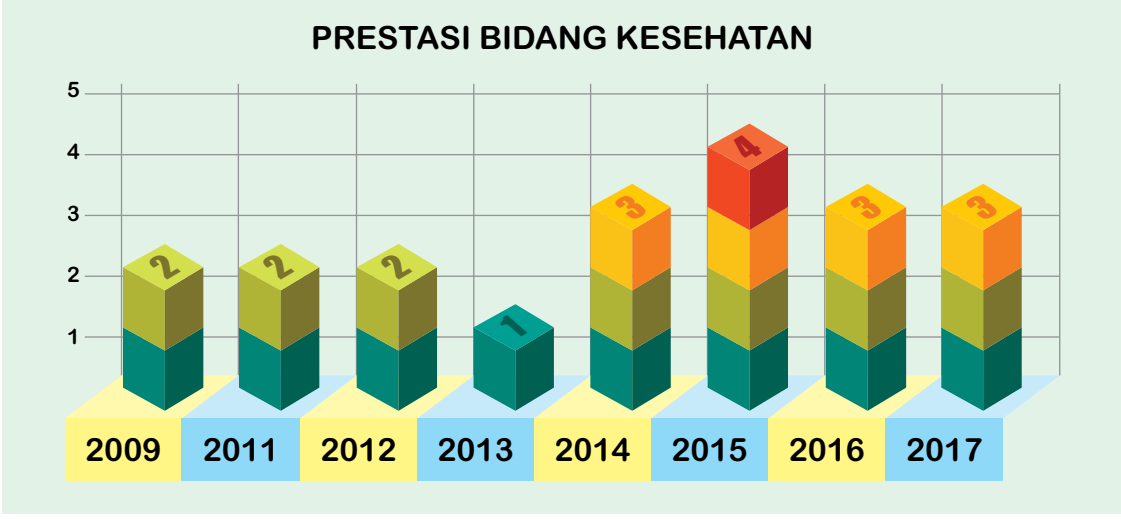

Kinerja kesehatan lingkungan juga ditunjukkan dengan meningkatnya capaian kinerja jumlah akses dan kepemilikan air bersih perkotaan, perdesaaan, jamban perkotaan dan perdesaan, SPAL perkotaan dan perdesaan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Akses untuk air bersih perkotaan pada tahun 2008 sebesar 94,26% meningkat menjadi 97,25% pada tahun 2012 sedangkan di daerah perdesaan juga terjadi peningkatan dari 79,85% (tahun 2008) menjadi 81,31% (tahun 2012). Persentase akses jamban di perkotaan sebesar 77,11% jauh lebih tinggi dibanding dengan perdesaan yang hanya mencapai 34,62%, hal ini dikarenakan pola hidup masyarakat di perdesaan yang masih mengandalkan sungai sebagai tempat buang air besar. Persentase jumlah kepemilikan SPAL baik di perkotaan maupun di perdesaan juga terus mengalami kenaikan setiap tahun, yang digambarkan dalam grafik berikut.

Selain itu, peningkatan layanan kesehatan penduduk miskin kian ditingkatkan termasuk pemeriksaan dan pengobatan gratis kepada kaum lanjut usia pada posyandu lansia. Barometer dalam mengukur keberhasilan program ini yaitu dengan peningkatan persentase penduduk miskin yang terjangkau dalam Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).Persentase penduduk miskin yang terjangkau dalam jaminan kesehatan masyarakat miskin melampaui target yang direncanakan, karena adanya tambahan kuota layanan kesehatan masyarakat miskin, seperti Jamkesda dan fasilitasi Surat Keterangan Miskin untuk layanan kesehatan.

Disamping beberapa capaian program tersebut, melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso melakukan langkah preventif dan antisipatif terhadap penyebaran penyakit menular. Kegiatan yang dilakukan peningkatan imunisasi dan peningkatan *surveillance* epidemiologi dan penanggulangan wabah.

Progres Program Bidang Kesehatan

No	Prestasi Program
1	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
2	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
3	Program Pengawasan Obat dan Makanan
4	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
5	Program Perbaikan Gizi Masyarakat
6	Program Pengembangan Lingkungan Sehat
7	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
8	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
9	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
10	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
11	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
12	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
13	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
14	Program Pemberdayaan Kader Kesehatan
15	Program Peningkatan Pelayanan Kasus Dampak Pelayanan Kasus Dampak Zat Berbahaya Yang Terkandung Dalam Asap Rokok
16	Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
17	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja

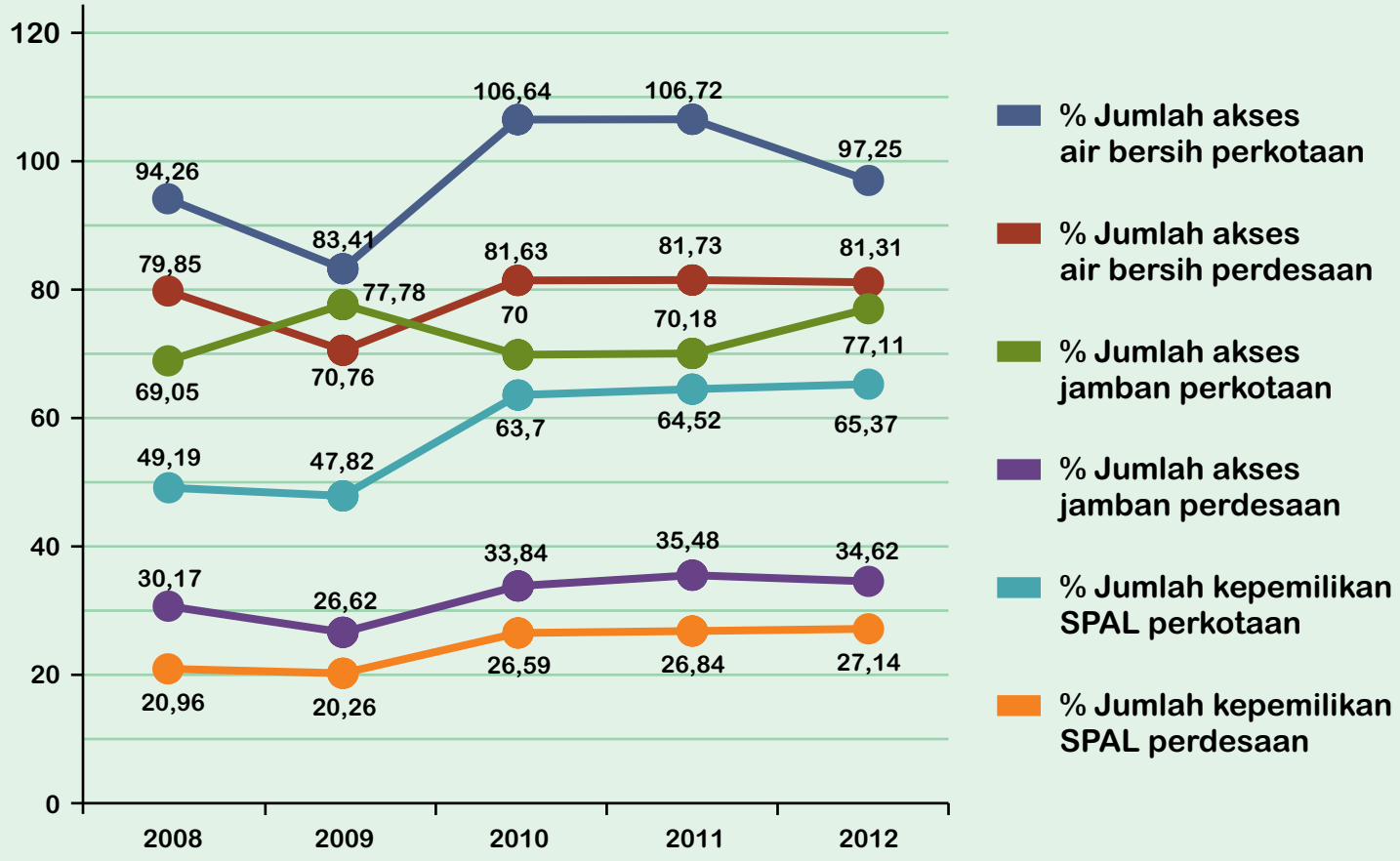

Grafik
Capaian Indikator Kinerja Persentase Jumlah Akses dan Kepemilikan Air Bersih Perkotaan, Pedesaaan, Jamban Perkotaan dan Pedesaan, SPAL Perkotaan dan PedesaanTahun 2008-2012

Merawat

Kohesi Sosial

PEMERINTAH daerah memiliki peran penting dalam menjaga kohesi sosial, salah satunya melalui pemenuhan hak-hak sipil politik, serta ekonomi sosial budaya (sipol & ekosob) masyarakat. Pemerintah daerah tidak hanya dituntut untuk mewujudkan kualitas perekonomian daerah, tetapi juga memastikan bahwa kesejahteraan masyarakat menyentuh aspek vital lain dari kehidupan mereka seperti stabilitas sosial, kebebasan, pemenuhan kebutuhan mereka terhadap ekspresi keagamaan serta kearifan lokal, dan lain sebagainya.

Tentu secara formal, peran pemerintah daerah dalam beberapa urusan pemerintahan memiliki keterbatasan. Misalnya dalam konteks urusan keagamaan, undang-undang pemerintah daerah nomer 23 tahun 2014 yang telah disempurnakan dengan undang-undang nomer 9 tahun 2015 mengatur, bahwa agama menjadi bagian dari urusan pemerintahan absolut yang berada

di bawah kewenangan langsung pemerintah pusat. Meski demikian, peran pemerintah daerah sebagai teritori kekuasaan politik administratif di bawah pemerintah pusat, tetaplah vital dalam rangka menyukseskan agenda pembangunan nasional.

Terpenuhinya semua hak-hak tersebut sejalan dengan cita-cita pembangunan dalam pengertian luas. Sebagaimana dikatakan Todaro (2000), tujuan dari proses pembangunan meliputi tiga hal yang merupakan prasyarat terpenuhinya kesejahteraan sosial. *Pertama*, peningkatan standard hidup. *Kedua*, menciptakan pelbagai kondisi yang memungkinkan setiap masyarakat memiliki kepercayaan diri *(self esteem)*. *Ketiga*, peningkatan iklim kebebasan. Dengan demikian, pembangunan yang dicanangkan daerahpun pada akhirnya akan bermuara pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat dalam arti yang sebenarnya.

Kepercayaan diri sebagai anggota satu masyarakat tumbuh, manakala pemerintah mampu menghidupkan iklim daerah yang membuat setiap orang marasa aman dan nyaman. Daerah harus nyaman ditinggali, sehingga setiap orang memiliki kepercayaan diri untuk mengidentifikasi diri sebagai bagian darinya, yang memilikinya, dan yang bangga terhadapnya.

Di samping itu, pemerintah daerah juga wajib menjamin setiap orang bebas melaksanakan hak-hak sosial, politik dan agamanya. Pemerintah yang baik dapat ditandai salah satunya dengan keberhasilannya dalam mewujudkan iklim kebebasan, sehingga setiap entitas sosial yang berada di bawahnya merasa mendapatkan perlakuan yang sama.

Dalam kondisi tersebut, gejolak sosial bisa diredam. Harmoni sosial bisa diwujudkan, dan damai bisa ditegakkan.

Kondisi sosial seperti inilah yang hingga batas tertentu

SINERGI; Bupati Bondowoso menjamu investor kopi, Saudi Arabia Abdullah al-Qohtani. *(Foto/dokumen)*

Tabel 5.1
Umat Pemeluk Agama di Bondowoso

No.	Agama	Populasi
01	Islam	772.015
02	Protestan	4.692
03	Katolik	2.347
04	Hindu	223
05	Budha	192
06	Lainnya	1

Sumber : Kementrian Agama Kabupaten Bondowoso 2016

berhasil direalisasikan oleh pemerintah Kabupaten Bondowoso selama sepuluh tahun dipimpin Bupati Amin Said Husni. Di bawah beliau, situasi sosial, politik dan keagamaan relatif kondusif..

Secara sosial demografis, masyarakat Bondowoso bukanlah masyarakat monolitik. Terdapat beberapa etnis dan kelompok keagamaan yang mendiami Bondowoso, di mana masing-masing tentu memiliki atribut kulltural yang juga berbeda-beda. Berdasarkan data Kementrian Agama 2016, terdapat 5 (lima) agama besar yang dianut oleh masyarakat Bondowoso. Agama Islam adalah agama terbesar yang dianut oleh 772.015 warga Bondowoso (BPS, 2017).

Di samping perbedaan agama mayor tersebut, perbedaan di internal masing-masing entitas agama tersebut juga sangat mungkin terjadi. Sebutlah misalnya Islam yang dianut oleh sekitar 99 % masyarakat Bondowoso, bukanlah entitas homegen. Terdapat beberapa kepercayaan berbeda yang berafiliasi dengan organisasi keagamaan tertentu di mana masing-masing memiliki karakteristik sosial budaya yang tidak sama. Hal ini membuat masyarakat Bondowoso terbentuk sebagai masyarakat yang plural.

Tantangan yang muncul adalah

BUPATI BONDOWOSO; Drs. H. Amin Said Husni, saat bersantai mengendarai sepeda jadul di Pendopo. *(Foto/dokumen)*

bagaimana integrasi dan harmoni di antara masing-masing entitas terjaga. Di sinilah peran pemerintah daerah untuk turut memastikan hak-hak sosial dan politik masing-masing entitas terpenuhi secara adil dan proporsional wajib hukumnya. Hanya dengan jalan ini, kecemburuan soosial, sentiment sosial bahkan antipati sosial sebagai peletup potensial konflik *(potential trigger of conflict)*, dapat dihindarkan.

Adil berarti bahwa entitas sosial yang dari sisi jumlah merupakan minoritas, mendapatkan hak-hak yang setara kualitasnya dengan yang diperoleh mayoritas. Pemerintah berkewajiban memenuhi kebutahan-kebutuhan dasar *(basic needs)* setiap kelompok masyarakat sebagai subjek pembangunan yang dijalankan pemerintah. Sementara proporsional berkaitan dengan distribusi hak-hak dengan mempertimbangkan proporsi yang seimbang.

Oleh karena itu, keberhasilan Bupati Bondowoso menciptakan iklim sosial dan politik yang kondusif, menjadi salah satu prestasi penting di antara sederet prestasi pembangunan sektor lain. Keberhasilan Bupati Amin mewujudkan harmoni di tengah-tengah masyarakat tentu tidak lahir secara kebetulan. Ada proses perencanaan yang terukur dan terencana yang sedari awal ditekankan oleh bupati. Pendek kata, ada mekanisme rekayasa sosial *(social engineering)* yang dijalankan oleh bupati untuk mentransformasikan beragam perbedaan sosial secara positif.

Bagaimana perencanaan itu dibangun sehingga situasi sosial yang kondusif dapat terwujud di Bondowoso?. Ada dua hal setidaknya yang menjelaskannya. *Pertama*, kebijakan bupati dalam konteks sosial, politik dan agama, didasarkan atas pembacaan yang matang dan jujur terhadap realitas faktual di Bondowoso. Apa yang dicanangkan oleh bupati, memiliki

basis justifikasinya dalam realitas masyarakat Bondowoso yang mejemuk dan terdiri dari banyak entitas sosial yang berbeda. *Kedua*, perencanaan pembangunan tidak hanya diorientasikan untuk mengejar keberhasilan parameter makro, yang lebih penting lagi adalah bagaimana lokalitas menjadi kekuatan utama *(driving force)*. Lokalitas yang dimaksud misalnya berkaitan dengan karakteristik sosiologis masyarakat Bondowoso seperti kepercayaan dan nilai-nilai lokal.

Dari paradigma tersebut, kita bisa memahami alasan bupati dan jajarannya membangun sinergi yang kuat dengan tokoh-tokoh agama yang secara sosial berpengaruh. Berangkat dari paradigma itu juga, lahirlah beberapa produk regulasi daerah yang berorientasi sosiologis lokalistik seperti Peraturan Daerah tentang Baca Tulis al-Quran (Perda BTQ), Peraturan Daerah tentang Zakat (Perda Zakat), termasuk beberapa kebijakan lain yang sifatnya khas Bondowoso. Meski berorientasi lokal, namun semuanya tetap diselaraskan dengan konsep pembangunan nasional sehingga sinkronisasi antara kebijakan daerah dengan kebijakan nasional tetap menjadi pertimbangan utama.

SINERGI; Pemerintah Kabupaten Bondowoso berupaya menjalin sinergi yang positif dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat. *(Foto/dokumen)*

Sinergi dengan Tokoh Agama

ADA sebuah hadits Nabi Muhammad SAW. yang sering dikutip oleh bupati Bondowoso, *"Dua kelompok dari umatku, jika keduanya bagus, maka manusia menjadi bagus. Jika keduanya rusak, maka manusia juga rusak, yaitu ulama dan umara"*. Hadits ini menyiratkan pentingnya sinergi ulama dan umara. Kutipan ini begitu mempengaruhi strategi bupati dalam upayanya menciptakan kesejahteraan sosial di Bondowoso. Bupati Amin Said Husni sadar, bahwa keberhasilan pembangunan akan berhasil manakala terdapat dukungan dan partisipasi positif dari para tokoh berpengaruh di Bondowoso.

Sebagai daerah agraris, masyarakat Bondowoso adalah masyarakat yang memberikan penghormatan kepada tokoh-tokoh tertentu yang dianggap berpengaruh. Para tokoh agama terutama kiai, merupakan unsur yang paling penting di dalamnya. Karena itulah, dukungan dari para tokoh agama

PENDOPO; Bupati Amin Said Husni menyambut KHR. Moh. Kholil Asad dalam sebuah acara di Pendopo Bondowoso. *(Foto/dokumen)*

sangat menentukan bagai keberhasilan pembangunan daerah.

Aspirasi mereka khususnya di bidang keagamaan, adalah cerminan otentik dari kehendak masyarakat. Para tokoh agama menjadi penyambung lidah rakyat yang akan dengan jujur mentransmisikan kehendak masyarakat luas. Maka menjadi wajar jika keterlibatan mereka dalam proses pembangunan tidak dapat dikesampingkan.

Dalam setiap kebijakan yang dibuatnya, bupati Bondowoso selalu menampatkan suara para tokoh agama khususnya para kiai sebagai salah satu parameter utama. Hal ini kemudian membuat relasi Bupati dan tokoh agama terjalin dengan intim.

"Hubungan bupati amin dengan para tokoh agama sejak awal memiliki hubungan yang sangat harmonis", kata KH. Abdul Qadir Syam, Ketua PCNU Bondowoso menggambarkan relasi yang terjalin antara bupati dan tokoh agama.

Upaya membangun sinergi dengan para tokoh agama dilakukan secara intensif. Rekam jejak dan personalitas bupati menjadi salah satu kekuatan penting dalam keberhasilan sinergi ini. Seperti diketahui, Bupati Amin Said Husni adalah figur yang lahir dan besar di lingkungan pesantren; salah satu komunitas muslim dengan atribut religiusitas yang kental.

"Bupati Amin ini pada bulan-bulan tertentu itu memiliki jadwal yang sangat padat untuk mengunjungi pesantren-pesantren, entah itu karena inisiatif bupati Amin atau karena diundang oleh pesantren-pesantren" kata Kiai Qadir melanjutkan.

Maka bergaul dengan lingkungan para tokoh agama Islam bukanlah susuatu yang asing. Dengan bekal pengetahuannya yang dalam di bidang agama, genetika kiai yang mengalir dalam dirinya, Bupati Amin Said Husni cukup berhasil mengokohkan sinergi pemerintah dengan tokoh agama khususnya kiai.

Bagi bupati, para kiai adalah sosok yang harus dihormati. Keberadaan mereka sebagai benteng kohesi sosial penting untuk dilibatkan dalam pembangunan di Bondo-

KOLEKTIVITAS; Ramah tamah bupati bersama jajaran Forkopimda Bondowoso. *(Foto/dokumen)*

woso. Karena itu, Bupati Amin menempatkan kiai pada posisi yang sangat penting sebagai penopang keberhasilan pembangunan daerah.

"Beliau hanya ingin para kiai itu didudukkan pada tempat yang terhormat, orang-orang yang sudah semestinya diposisikan terhormat sebagaimana umat menghormati mereka" kata Dr. Moh. Saeful Bahar, dosen UIN Sunan Ampel Surabaya. Cara bupati menghormati kiai ini menjadi faktor yang membuat hubungan pemerintah daerah dengan tokoh agama semakin harmonis.

Sinergitas yang terjalin erat dengan tokoh agama lokal ini berdampak signifikan terhadap pembangunan Bondowoso. Sebab, visi kepemimpinan yang diusung bupati sedari awal memimpin, sudah menyentuh sisi-sisi keagamaan yang pada implementasinya mau tidak mau akan bersentuhan juga dengan para tokoh agama itu sendiri. Visi yang dimaksud adalah visi beriman yang menjadi salah satu cetak biru perencanaan dan program pembangunan di Bondowoso.

Forpimda-Toga Tomas

UNTUK melembagakan sinergi yang intensif dengan tokoh agama, pemerintah kabupaten Bondowoso sejak lama mencanangkan program silaturahmi triwulan bertajuk 'Forpimda-Toga Tomas' atau Forum Pimpinan Daerah-Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat. Acara silaturahmi ini dilakukan secara rutin sebagai bagian dari ikhtiar memperkuat hubungan unsur-unsur pimpinan pemerintah daerah dengan tokoh agama dan masyarakat.

Selain sebagai media silaturahmi, forum ini menjadi vital keberadaannya sebagai sumber perencanaan dan penyusunan kebijakan daerah yang tidak hanya berkaitan dengan dimensi keagamaan, tetapi juga sosial dan ekonomi.

Dalam kegiatan ini, tidak hanya Bupati Bondowoso yang hadir. Seluruh unsur Forkopimda juga turut hadir seperti Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso, Dandim 0822 Bondowoso, Kapolres Bondowoso, serta beberapa unsur lainnya seperti Kejari Bondowoso, pimpinan yudikatif, pengurus ormas, dan Majlis Ulama' Indonesia (MUI). Mereka bertemu sapa sekaligus serap aspirasi dengan para tokoh agama dan masyarakat dari pelbagai elemen seperti pengasuh

pesantren, guru ngaji dan seterusnya.

"Jadi mulai Kapolres, Dandim, Kejaksaan, Pengadilan, beliau sendiri, Pak sekda, itu ketemu dengan para tokoh agama untuk mendapatkan input, mendapatkan masukan mendapatkan kritik" ungkap Kiai Qadir sebagai salah satu tokoh agama yang sering hadir dalam kegiatan dimaksud.

Signifikansi kegiatan ini terletak dalam aspirasi dan kritik yang disampaikan kepada pemerintah dalam rangka mengatasi pelbagai permasalahan yang timbul di pelbagai bidang kehidupan masyarakat. Melalui aspirasi maupun kritik yang mereka sampaikan juga, pemerintah dapat merumuskan kebijakan dan program yang berbasis pada kepentingan dan kebutuhan komunitas. Di sinilah mekanisme *bottom up* dalam proses pembangunan berjalan.

Dengan demikian, pemerintah kabupaten Bondowoso memperluas saluran penyerapan aspirasi masyarakat dari yang bersifat formal semata seperti forum Musawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) ke dalam forum kultural yang melibatkan para *stakeholders* utama yaitu tokoh agama dan masyarakat sebagai representasi masyarakat. Di samping itu, forum ini juga menjadi mekanisme kontrol langsung yang dilakukan masyarakat melalui toga dan tomas terhadap kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah daerah.

Harmoni Eksekutif-Legislatif

DALAM konteks demokrasi langsung, Bupati yang dipilih secara langsung memiliki tanggungjawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya kepada rakyat. Rakyat memiliki wawenang untuk mengawasi dan turut merumuskan berbagai kebijakan yang semestinya dilakukan oleh bupati. Inilah manifestasi dari adagium demokrasi 'dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat'.

Fungsi pengawasan rakyat dilakukan melalui mekanisme representasi di mana para wakil rakyat di legislatif yang menjalankannya. Inilah demokrasi representatif. Di level pemerintah kabupaten, para wakil rakyat bernaung di bawah lembaga legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten.

Tabel 5.1
Umat Pemeluk Agama di Bondowoso

No.	Partai	Jumlah Kursi
01	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	12
02	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P)	8
03	Partai Persatuan Pembangungan (PPP)	5
04	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	5
05	Partai Golongan Karya (Golkar)	5
06	Partai Demokrat	3
07	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	3
08	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	3
09	Partai Amanah Nasional (PAN)	1
	Jumlah	**45**

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Bondowoso 2016

EKSEKUTIF LEGISLATIF; Bupati berjabat tangan dengan Ketua DPRD Bondowoso 2018-2019 H. Tohari. *(Foto/dokumen)*

Pemerintah daerah dalam hal ini bupati dan para pembantunya, wajib menjalin kemitraan yang positif dengan DPRD, demikian juga sebaliknya. Jalinan relasi yang intim dan harmonis mutlak diperlukan untuk menyukseskan pembangunan daerah sejak dari hulu hingga hilir.

Di bawah Bupati Amin Said Husni, sinergi yang positif ini terjalin erat. "Komunikasi beliau dengan legislatif berjalan dengan sangat harmonis" demikian testimoni Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso Tohari. Menurutnya, keberhasilan menjalin hubungan yang baik dengan legislatif menjadi salah satu bukti kepiawaian bupati dalam menjalankan kepemimpinannya.

Dalam menjalin hubungan dengan para anggota DPRD yang berasal dari ragam partai dengan kepentingan yang juga beragam, bupati Bondowoso menekankan mekanisme yang bersih. Kepentingan rakyat harus menjadi titik temu yang mempersatukan semua kepentingan masing-masing elemen perwakilan partai di legislative dengan eksekutif. Kepiawaian menjalin komunikasi positif tanpa harus melalui jalan-jalan yang tidak baik terbukti dari rangkaian apresiasi yang diberikan negara kepada pemerintah Bondowoso sebagai daerah yang pengelolaan keuangannya bersih.

"Hal ini dibuktikan dengan anugerah yang beliau raih yaitu kabupaten Bondowoso menjadi daerah dengan penggunaan keuangan yang bersih dari unsur-unsur korupsi" lanjut Tohari. Salah satu penghargaan yang dimaksud adalah pemberian status Wajar Tanpa Pengcualian (WTP) dari BKP RI selama enam tahun berturut-turut.

Imbas dari hubungan kedua institusi yang harmonis ini, tahapan penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Bondowoso selalu berjalan lancar. Di samping itu, berbagai regulasi yang diperlukan sebagai basis yuridis program-program unggulan pemerintah juga berhasil ditetapkan relatif tanpa hambatan. Dan yang lebih panting lagi, stabili-

tas politik yang terbangun ini turut menciptakan iklim ekonomi, sosial dan keagamaan yang kondusif.

Penguatan Program Keagamaan

GENCARNYA komunikasi yang dijalin oleh pemerintah daerah dengan para tokoh agama dan tokoh masyarakat, berkontribusi terhadap lahirnya pelbagai kebijakan yang memiliki keunggulan pada dua aspek berikut. *Pertama*, beberapa kebijakan penting yang dirumusakan oleh pemerintah daerah bisa dipastikan memiliki basis legitimasinya dalam realitas faktual masyarakat Bondowoso. *Kedua*, kebijakan dan program pemerintah tidak mengalami disparitas dengan kebutuhan riil masyarakat. Dengan demikian terjadi kesinambungan antara ekspektasi masyarakat dengan program dan kebijakan pemerintah.

Sebagai implikasi dari intensitas silaturahmi yang terjalin dengan para tokoh agama, di samping juga sinergi positif dengan lembaga legislatif daerah, lahirlah banyak kebijakan pemerintah daerah yang selaras dengan karakteristik dan tantangan problematika masyarakat, khususnya di bidang keagamaan. Pada masa Bupati Amin, pemerintah memang memberikan perhatian khusus terhadap penguatan program-program keagamaan. Selain karena visi beriman yang diusung oleh bupati, partisipasi tokoh agama dan masyarakat yang dilembagakan melalui forum-forum silaturahmi intensif, menjadi faktor yang melatari lahirnya pelbagai produk legislasi, program maupun kebijakan di bidang keagamaan.

Di bidang legislasi, pemerintah Bondowoso bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menelorkan Peraturan Daerah (Perda) nomer 11 tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat. Secara hierarkis, perda ini lahir sebagai regulasi operasional yang berpijak di atas undang-undang nomer 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

Secara sosiologis, lahirnya perda zakat ini berkaitan erat dengan komposisi

sosial masyarakat Bondowoso yang sebagian besar adalah umat Islam. Sekitar 99 % penduduk Bondowoso adalah umat Islam yang secara teologis memiliki kewajiban untuk menunaikan zakat setiap tahunnya, baik itu berupa zakat harta *(mal)* atau zakat jiwa *(fitrah)*. Dengan jumlah umat Islam yang sedemikian besar, maka potensi zakat di Bondowoso juga sangat besar.

Sekadar gambaran, khusus di lingkungan aparatur sipil negara (ASN) saja, potensi zakat setiap tahunnya mencapai sekitar 6 miliar rupiah. Dalam realisasinya, tidak semua potensi tersebut memang dapat dikelola oleh badan zakat daerah. Menurut keterangan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Bondowoso, pada tahun 2015 misalnya, dari seluruh potensi zakat ASN, yang terserap adalah sebesar 1.2 miliar rupiah.

Karena itu, pemerintah daerah memiliki tanggungjawab untuk memastikan, bahwa potensi zakat yang besar itu dapat dikelola secara professional, transparan dan akuntabel. Zakat yang dikelola secara professional, dapat menjadi salah satu instrument untuk meningkatkan kemaslahatan dalam bentuk kesejahteraan masyarakat. Di sinilah pemerintah perlu hadir untuk mewadahi pengelolaan zakat yang bisa berdaya guna secara tepat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah menjadi institusi yang paling berkepentingan untuk menjaga idealisme zakat sebagai sarana peningkatan kesejehtaraan sosial. Sebab upaya menghadirkan kesejahteraan sosial juga menjadi salah satu tujuan dibentuknya suatu negara atau pemerintahan. Keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan zakat melalui perangkat kelembagaan yang dibentuknya diharapkan dapat memastikan bahwa pengelolaan zakat tetap berpijak di atas salah satu fungsi dasarnya yaitu kemaslahatan rakyat (Mas'udi, 2010).

Secara eksplisit sebagaimana tertuang dalam pasal 5 perda tersebut, ada empat tujuan yang ingin diwujudkan melalui pengelolaan zakat yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. *Pertama*, meningkatkat pelayanan kepada masyarakat dalam menunaikan zakat, infaq dan sedekah sesuai ketentuan agama. *Kedua*, meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat, infaq dan sedekah. *Ketiga*, meningkatkan kesadaran dalam

melaksanakan ketentuan agama. *Keempat*, menumbuhkan solidaritas sosial dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial di Kabupaten Bondowoso.

Dalam implementasinya, pengelolaan zakat daerah dilaksanakan oleh satu badan khusus bernama Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Bondowoso maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) di wilayah kabupaten Bondowoso. Sasaran perda ini tidak hanya ditujukan kepada wajib zakat *(muzakki)* kalangan birokrat daerah, melainkan seluruh masyarakat muslim di wilayah Bondowoso yang dibebani kewajiban menunaikan zakat.

Perbup Baca Tulis Alquran

PENDIDIKAN karakter menjadi istilah yang paling sering muncul dalam diskursus pendidikan nasional. Terutama pasca reformasi tahun 1998. Munculnya kesadaran akan pentingnya pendidikan karakter *(character building)* didasari oleh adanya pandangan bersama bahwa ada persoalan yang mendera dunia pendidikan kita; penguatan kapasitas inteligensia SDM di lembaga pendidikan ternyata tidak berbanding lurus dengan penguatan budi pekerti yang baik.

Korupsi, kolusi, tawuran, dan segenap anomali prilaku lainnya adalah pemandangan umum yang jelas mencederai integritas generasi bangsa. Jika ditelusuri hingga ke hulu, sekolah diyakini memiliki peran vital dalam membentuk integritas para calon generasi bangsa itu. Untuk itulah, perlu dilakukan reorientasi pendidikan , dan disadarilah bahwa pendidikan karakter inilah yang semestinya menjadi kompas pembangunan pendidikan nasional.

Reorientasi demikian tampak dalam perubahan fundamental dalam amandemen UUD 1945 ke-IV, di mana pada pasal 31 ayat 3 disebutkan secara eksplisit "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang". Bandingkan dengan ketentuan sebelum amandemen yang tidak satupun dari point pasal 31 yang menyebut pendidikan ahlak mulia. Un-

dang-undang nomer 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional kemudian mempertegas wajah pendidikan nasional yang berorientasi penguatan pendidikan karakter.

Di Bondowoso, di mana visi kepemimpinan Bupati Amin Said Husni menekankan dimensi keberimanan, upaya penguatan pendidikan karakter seperti pepatah *gayung bersambut, kata berjawab*. Bahkan, visi beriman yang digagas Bupati Amin adalah wujud keprihatinan akan dekadensi moral yang dirasakannya semakin tampak. Karena itu, dibangunlah konsep pengembangan pendidikan karakter yang dikodifikasikan sesaat ketika Bupati Amin memimpin Bondowoso.

"Saya ketika pertama kali dilantik menjadi bupati tahun 2008, yang pertama-tama saya gagas untuk segera dilaksanakan itu adalah membuat sebuah peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bondowoso" kata Bupati Amin Said Husni.

Lahirlah kemudian Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso nomer 6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Perda ini menjadi landasan yuridis operasional bagi, salah satunya, pengembangan pendidikan karakter di Kabupaten Bondowoso, meski dalam perkembangannya, aturan ini dievaluasi oleh Kementrian Dalam Negeri. Selanjutnya, untuk memberikan acuan yang lebih teknis di bidang pengembangan pendidikan karakter, Bupati Bondowoso menekeen Peraturan Bupati nomer 28 tahun 2011 yang sering disebut sebagai Perbup Muatan Lokal Baca Tulis Alquran atau BTQ.

Karena ditegaskan sebagai muatan lokal, maka pembelajaran BTQ ini tidak menggantikan pelajaran agama yang memang sudah diatur dalam bangunan sistem pendidikan nasional. Melainkan memperkuat formula pembelajaran agama tersebut dengan berpijak di atas karakteristik lokalitas Bondowoso yang mayoritas muslim.

BTQ dilaksanakan di jenjang pendidikan formal sejak dari bangku sekolah kasar

hingga sekolah menengah di seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Bondowoso. Perbup BTQ ini adalah terobosan serta ikhtiar konkrit yang dilakukan pemerintah daerah untuk memperkuat pendidikan karakter siswa. Kenapa harus dengan ikhtiar pembelajaran baca tulis Alquran?

"Karena pendidikan karakter itu kan bersumber dari nilai dasariah yang diyakini oleh masyarakat" jelas Bupati. Menurutnya, Karakter itu harus bersumber dari nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat, dalam hal ini masyarakat bondowoso yang mayotitas beragama Islam, meyakini nilai dasarnya itu bersumber dari Alquran. Karena itu, agar masyarakat bisa memiliki dan menginternalisasi nilai dasariyah yang ada di dalam Alquran, maka harus dilakukan pengenalan sejak dini kepada setiap peserta didik.

Dengan terbitnya Perbup BTQ ini, sebagai implementasi dari undang-undang dan perda, maka perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan penguatan pendidikan karakter, bisa berjalan maksimal. Sebagai catatan, pada tahun 2016, untuk program pengembangan budi pekerti dan ahlak mulia, pemerintah Bondowoso menggelontorkan anggaran sebesar enam ratus tiga belas juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah (Rp. 613.163..950,00), dimana lebih 32 persen diantaranya dialokasikan untuk kegiatan baca tulis alquran. Data ini menunjukkan kuatnya keberpihakan pemerintah Bondowoso terhadap penguatan pendidikan karakter atau ahlak mulia.

APRESIASI; Bupati saat memberikan penghargaan kepada anak-anak berprestasi di Pendopo Bondowoso. *(Foto/dokumen)*

GERDU BERSINAR

SEBAGAI daerah yang memegang teguh nilai-nilai keislaman, Pemerintah Kabupaten Bondowoso turut berupaya memastikan bahwa aktualisasi nilai-nilai tersebut tercermin dalam potret kehidupan sosial masyarakat. Salah satu manifestasinya adalah dengan memberikan perhatian terhadap pencegahan dan penanggulangan kriminalitas dan perbuatan maksiat di tengah-tengah masyarakat.

Perhatian pemerintah daerah di bi-

dang pencegahan dan penanggulangan kemaksiatan di Bondowoso dikristalisasi dalam program Gerdu Bersinar (Gerakan Terpadu Berantas Kemaksiatan dan Narkoba). Gerdu Bersinar adalah terobosan (breakthrough) yang diinisiasi oleh Bupati Amin Said Husni untuk menekan angka kriminalitas dan kemaksiatan yang pelakunya tidak hanya orang dewasa, melainkan juga para remaja yang angkanya setiap saat kian memperihatinkan.

Sekedar catatan, pada tahun 2014 Dewan Pendidikan Kabupaten Bondowoso melansir hasil riset mengenai angka deviasi moral remaja yang terjadi dalam kurun 2011 sampai dengan 2013. Dalam durasi tiga tahun tersebut, total terjadi 1499 kasus kriminalitas dan kemaksiatan yang dilakukan remaja usia SMP, SMA dan SMK. Dari angka tersebut, 38 diantaranya merupakan kasus penyalahgunaan Narkoba, dan 54 lainnya adalah kasus minuman keras (miras).

Kenyataan ini tentu merupakan ironi bagi suatu daerah yang mengkarakterisasi diri sebagai masyarakat religius. Terlebih sejak awal memimpin, Bupati Amin Said Husni telah meneguhkan semangat religiusitas ini dengan perumusan visi yang mencantumkan lema beriman. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Bondowoso memiliki tanggung jawab untuk memastikan semangat religiusitas ini tercermin dalam perilaku warganya.

Di sinilah, Gerdu Bersinar sebagai sebuah gerakan penanggulangan kemaksiatan dan narkoba menjadi urgen dan relevan. Melalui program ini, upaya penanggulangan kemaksiatan dan narkoba dapat diimplementasikan secara integratif dan koordinatif dengan melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholders) terkait.

Pencanangan Gerdu Bersinar dilatarbelakangi oleh setidaknya tiga maksud. Pertama, memberantas kemaksiatan. Kedua, mewujudkan kawasan religius. Ketiga, menciptakan dan membangun keamanan, ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.

Kemaksiatan dan narkoba menjadi titik tekan (stressing point) dari program Gerdu Bersinar. Pencantuman kata maksiat menunjukkan kentalnya motivasi keagamaan yang melandasi program ini disamping motivasi lainnya. Sebab menurut Bupati, munculnya kriminalitas seperti narkoba, berkaitan erat dengan

kemaksiatan yang menjadi objek larangan keras agama.

Sebagai gerakan penanggulangan kemaksiatan dan narkoba, Gerdu Bersinar tidak hanya diimplemantasikan melalui kegiatan penindakan, tetapi juga peringatan dini (early warning) dan rehabilitasi. Karena secara umum gerakan ini bermuara pada persoalan penegakan hukum, maka kepolisian sebagai lembaga penegak hukum menjadi motor penggerak utama gerakan ini.

Secara struktural, mekanisme kerja gerakan ini melibatkan tiga (3) pilar utama, yaitu Bupati, Kapolres dan Dandim, di mana Kapolres bertindak sebagai ketua. Tiga pilar ini secara hierarkis juga terbentuk di dalam seluruh teritorial pemerintahan administratif mulai dari kecamatan hingga desa/kelurahan. Di level kecamatan, tiga pilar Gerdu Bersinar terdiri dari Camat, Kapolsek dan Danramil. Sementara itu, tiga pilar di tingkat desa adalah kades/lurah, Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas) dan Bintara Pembina Desa (Babinsa).

Meski tiga pilar tersebut menjadi garda depan (avant garde), namun keterlibatan masyarakat sangat menentukan keberhasilan program ini. Dalam beberapa kesempatan sosialisasi, Bupati Amin Said Husni selalu menekankan pentingnya partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam menyukseskan program Gerdu Bersinar. Sejatinya, masyarakat adalah ujung tombak program Gerdu Bersinar. Sebab, tanpa keikutsertaan mereka, program ini tidak akan bisa berjalan optimal.

Safari Ramadan

PEMERINTAH Kabupaten Bondowoso di bawah Bupati Amin Said Husni membangun sistem yang menitikberatkan kepada terintegrasinya seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam pembangunan daerah. Karena itu, seluruh segmen kegiatan sosial, selama dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk meningkatkan akselerasi pembangunan daerah itu harus dilakukan. Termasuk ketika pemerintah daerah menunjuk-

kan perhatiannya yang kuat terhadap peningkatan program di bidang keagamaan, juga harus dipahami dalam kerangka yang sama.

Paradigma ini juga terlihat dalam kegiatan rutin bupati setiap tahun sepanjang bulan Ramadan untuk datang ke masjid-masjid melalui program Safari Ramadan. Kegiatan keagamaan ini dilaksanakan bupati secara rutin dengan tujuan untuk mengisi Ramadan dengan mempererat tali silaturahmi antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Melalui silaturahmi ini, diharapkan sinergi positif antara bupati dan rakyat akan semakin baik, sehingga agenda pembangunan di Bondowoso juga terlaksana secara baik.

"Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk menyambung tali silaturahmi dengan masyarakat dan menjaga hubungan baik antara ulama dan umara di Kabupetan Bondowoso" kata Bupati Amin Said Husni pada acara Safari Ramadan di Masjid Nurul Huda, Mangli, Pujer, tahun 2016 silam.

Di samping sebagai media silaturahmi, kegiatan safari Ramadan ini dimanfaatkan oleh bupati untuk menyosialisasi program-program yang dicanangkan oleh pemerintah daerah, sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi langsung dari bupati terkait program-program yang berhubungan dengan hajat hidup mereka.

Demikian juga, melalui ajang safari Ramadan, Bupati Bondowoso sering kali menyampaikan pesan-pesan motivasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas diri seperti melalui peningkatan kualitas ibadah di bulan Ramadan. Hal ini misalnya disampaikan oleh bupati saat mengisi safari Ramadan di Masjid al-Nawawi, Jambesari Darussolah 2017 silam.

"Gotong royong itu tidak hanya di salat saja, tetapi semua sendi kehidupan harus gotong royong", kata Bupati Amin said Husni.

Hingga menjelang akhir jabatan bupati, kegiatan safari Ramadan ini terus dilakukan. Selain sebagai bukti bahwa kegiatan ini murni untuk kepentingan

silaturahmi, bupati Bondowoso juga memanfaatkan forum safari Ramadan sebagai media untuk menyampaikan permohonan maaf dan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Bondowoso. Bagi bupati, dukungan masyarakat selama dua periode kepemimpinan beliau, menjadi energi besar bagi pemerintah yang dipimpinnya dalam melaksanakan agenda pembangunan daerah.

Pemerintahan Inklusif

PADA tahun 2006 silam, Bondowoso pernah menjadi perhatian luas ketika terjadi konflik sosial disebabkan perbedaan paham keagamaan antara dua komunitas lokal. Karena itu, ketika Bupati Amin Said Husni terpilih sebagai bupati Bondowoso sejak tahun 2008, beliau memikul tanggungjawab besar untuk menciptakan harmoni sosial serta mengembalikan masyarakat ke dalam kondisi yang kohesif.

Ini tentu bukan tugas mudah. Apalagi bagi suatu daerah yang secara demografis memang tidak monolitik, melainkan dihuni oleh beragam identitas yang masing-masing memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda. Meminjam bahasa Bartos dan Wehr (2002), terdapat tujuan yang saling bersinggungan *(incompatibility goals)* antara satu kelompok identitas dengan yang lainnya. Karena itu, memastikan bahwa masing-masing pihak mendapatkan distribusi hak secara adil, menjadi tugas yang harus dilakukan oleh pemerintah agar kohesi sosial terbentuk.

Berbekal kemampuan Bupati Bondowoso menjalin komunikasi yang intensif dengan segenap stakeholders, serta didukung oleh komitmen dalam menjamin distribusi hak-hak masyarakat secara adil, di bawah kepemimpinan Bupati Amin said Husni, Bondowoso jauh dari ingar bingar benturan sosial. Yang menonjol justru adalah keberhasilan bupati menjaga harmoni sosial di antara masing-masing kelompok identitas di Bondowoso.

SAFARI; Bupati Bondowoso memberikan sambutan dalam acara Safari Ramadan Ponpes Subulus Salam Sukosari 2018. *(Foto/dokumen)*

Keberhasilan bupati bahkan mendapatkan apresiasi dari Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama' (Lakpesdam PBNU) yang bekerjasama dengan *Center for Marginalized Communities Studies* (CMARs). Melalui riset kolaboratif yang dilakukan kedua lembaga, Bondowoso dinilai sebagai daerah yang sukses mewujudkan pemerintahan inklusif berkat kapasitasnya menciptakan harmoni sosial.

Keberhasilan pemerintah Bondowoso mewujudkan pemerintahan inklusif terletak dalam komitmen bupati untuk memastikan bahwa setiap orang mendapatkan distribusi hak secara adil. Kebijakan diskriminatif jelas kontraproduktif dengan upaya memberikan pelayanan yang adil dan karenanya harus dihilangkan.

"Sebenarnya dalam menjalankan roda pemerintahan di Bondowoso selama saya memimpin hampir dua periode saya berusaha maksimal memberi pelayanan yang baik. Tentu sangat bersyukur karena Lakpesdam melakukan riset dan memberikan predikat itu," kata bupati Bondowoso (26/7/2017), di Gedung PBNU lantai 5 Jalan Kramat Raya No 164 Jakarta Pusat, merespon apresiasi pemerintahan inklusif yang diraihnya.

Berangsur-angsur Tingkatkan *Infrastruktur*

UPAYA keras yang dilakukan pemerintah Bondowoso sejak tahun 2008 hingga tahun 2018 dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat membuahkan hasil. Kini secara de facto, Kabupaten Bondowoso sudah tidak lagi menyandang predikat sebagai daerah tertinggal. Salah satu yang menjadi indikator bahwa Bondowoso terangkis dari daerah tertinggal adalah pesatnya pembangunan infrastruktur daerah, seperti pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana jalan, jembatan, serta fasilitas penunjang mobilitas lainnya.

Berdasarkan Peraturan Presiden nomer 131 tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal 2015-2019 yang dijelaskan secara lebih teknis melalui Permendesa dan PDT Nomer 3 tahun 2016 Petunjuk Teknis Penentuan Indikator dalam Penetapan Daerah Tertinggal secara Nasional, terdapat dua indikator yang yang berkaitan dengan persoalan infrastruktur, yaitu indikator sarana-prasarana dan indikator aksesibilitas. Jika sarana-prasarana menyangkut kelengkapan dasar fisik wilayah, aksesibilitas berkenaan dengan konektivitas serta kemudahan mobilitas dari satu tempat ke tempat lainnya.

Capaian Pemerintah Kabupaten Bondowoso di bawah kepemimpinan Bupati Amin Said Husni, merupakan lompatan besar setelah sekian lama Bondowoso lebih sering didengar sebagai daerah dengan pembangunan infrastruktur yang tertinggal. Apa yang dicapai oleh pemerintah daerah sejauh ini menjadi bukti bahwa pemerintahan Bupati Amin betul-betul bekerja dan serius dalam membangun Bondowoso menjadi lebih baik.

Tentu hasil ini tidak semata-mata karena ikhtiar satu komponen saja, melainkan juga peran berbagai pihak dan instansi terkait, serta support masyarakat yang sama-sama memiliki kepedulian besar untuk memajukan Bondowoso. Sebagaimana yang disampaikan oleh bupati Amin Said Husni dalam sebuah kesempatan, bahwa prestasi Bondowoso menanggalkan status daerah tertinggal ini adalah buah kerja sama yang baik antar pemerintah Kabupaten Bondowoso, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan seluruh lapisan masyarakat.

Menuju Bondowoso yang Lebih Baik

DALAM satu kesempatan, bupati Amin Said Husni pernah menyampaikan bahwa salah satu masalah lokal yang menjadikan Kabupaten Bondowoso masuk kategori daerah tertinggal adalah kondisi geografis. Banyak wilayah terpencil yang sulit dijangkau, sehingga mobilitas penduduk menjadi sangat terbatas. Oleh karena itu, salah satu upaya untuk membuka isolasi daerah terpencil ialah mempercepat dan memperbanyak pembangunan infrastruktur pedesaan.

Karena itu, selama lima tahun pertama, pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui Dinas Bina Marga Cipta Karya meningkatkan akselerasi pembangunan jalan dan jembatan pedesaan. Pembangunan infrastruktur publik ini diproyeksikan sebagai ikhtiar nyata memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar mereka, baik yang berhubungan dengan sarana transportasi (jalan aspal dan jembatan) pertanian (irigasi), serta kebutuhan air bersih.

Memberikan pelayananan yang baik dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat merupakan fokus utama pemerintah agar nantinya masyarakat dapat merasakan langsung buah dari keberpihakan pemerintah daerah kepada mereka.

Bagi masyarakat yang berada di pegunungan, adanya jalan aspal diharapkan membuat mereka tidak mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas perekonomian yang membutuhkan adanya mobilitas dan konektivitas yang tinggi. Begitu juga bagi para petani, adanya fasilitas irigasi yang adekuat, diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian mereka.

Pembangunan infrastruktur di Bondowoso, tidak hanya melulu dalam persoalan perbaikan serta fasilitasi jalan dan fasilitas irigasi, tetapi juga termasuk penyediaan air bersih ke desa-desa yang kekurangan air bersih. Penyediaan air bersih ke desa-desa berbeda dengan penyediaan air bersih di perkotaan.

Jika penyediaan air bersih di perkotaan dikelola melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang kemudian disalurkan ke rumah-rumah yang membutuhkan air, maka penyediaan air

PERESMIAN; Bupati Bondowoso menggunting pita tanda diresmikannya jembatan gantung Grujugan-Cermee. *(Foto/dokumen)*

bersih di desa-desa tidak hanya menjadi domain PDAM, tetapi juga dikelola langsung oleh Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (Hippam), serta desa dalam bentuk Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) melalui dana desa.

Inovasi GEMAPILDASI

PENGATURAN air di Kabupaten Bondowoso menjadi sangat penting untuk menjadi perhatian karena menyangkut hajat hidup masyarakat luas. Secara spesifik, kondisi Kabupaten Bondowoso dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan penyediaan air irigasi menghadapi permasalahan akan kondisi sungai dan jaringan irigasi yang penuh sampah dan banyaknya kotoran ternak yang dibuang ke sungai dan jaringan irigasi. Hal ini mengakibatkan penurunan efisiensi irigasi dan pencemaran lingkungan yang berdampak pada menurunnya derajat sanitasi di sekitar sungai dan jaringan irigasi, serta meningkatnya potensi bencana banjir karena daya tampung jaringan irigasi yang berkurang.

Guna mengatasi permasalahan tersebut, Organisasi Perangkat Daerah, masyarakat serta pihak swasta dan Dinas PUPR sebagai *leading* sektor melaksanakan gerakan kolaboratif bernama GEMAPILDASI (Gerakan Masyarakat Peduli Lingkungan Daerah Aliran Sungai dan Irigasi) pada 2015. Gerakan ini menginsafi suatu postulat bahwa ketika masyarakat membutuhkan layanan irigasi yang lancar, maka dibutuhkan peran masyarakat pula dalam upaya memperlancar layanan tersebut, bukan hanya pemerintah daerah. Dalam hal ini GEMAPILDASI lantas mmembidik beberapa persoalan yang jamak terjadi.

Pertama, permasalahan dalam konservasi sumber daya air. Dalam hal ini, menurunnya debit air yang berada di sumber-sumber air irigasi di Kabupaten Bondowoso yang diakibatkan oleh berkurangnya daerah resapan air akibat perubahan tata guna lahan, hingga 2017, areal kritis mencapai 61.564,34 Ha dari 156.010 Ha atau sekitar 40 persen.

Kapasitas layanan air irigasi untuk pertanian pun akhirnya berkurang. Penurunan tersebut pada gilirannya menimbulkan perubahan pola tanam petani dari padi-padi-padi (sebanyak tiga kali tanam pada 100 persen luas sawah irigasi), menjadi padi-padi-palawija (tiga kali musim tanam pada 60 persen luas sawah irigasi). Lebih dari itu, bisa hanya dua kali musim tanam, yaitu pola padi-palawija-puso/gagal panen (30 persen luas sawah irigasi). Perubahan itu secara langsung berdampak pada penurunan pendapatan petani.

Kedua, permasalahan dalam pemanfaatan sumber daya air. Banyaknya sampah dan sedimentasi kotoran ternak yang mencemari aliran sungai dan saluran irigasi sebagian besar berasal dari limbah rumah tangga di sekitar DAS dan irigasi. Kondisi kemudin menurunkan derajat kesehatan masyarakat di sekitar sungai dan irigasi, mengingatsebagian besar masyarakat juga memanfaatkan air di sungai dan air di saluran irigasi untuk mandi dan mencuci. Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso menyebutan bahwa angka kesakitan Diare per-1000 penduduk pada 2015 mencapai 214.

Ketiga, permasalahan daya rusak air. Dalam hal ini besarnya daya rusak air di Kabupaten Bondowoso sudah mencapai tahap yang memprihatinkan. Hal itu ditandai dengan semakin seringnya kejadian bencana banjir bandang yang menyebabkan kerusakan tanggul sungai dan jaringan irigasi. Dari siklus banjir yang semula terjadi dalam 20 tahunan, kini menjadi sekitar 2 tahunan. Derasnya laju aliran banjir di daerah aliran sungai pun menyebabkan meningkatnya kerusakan tanggul sungai dan jaringan irigasi serta longsoran pada tebing-tebing daerah aliran sungai yang bertambah sekitar 2 hingga 6 titik pertahun. Kerusakan jaringan irigasi dan longsoran tersebut turut andil dalam menurunkan kinerja layanan irigasi.

Keempat, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DAS dan irigasi yang masih rendah, mengakibatkan banyaknya sarana dan prasana yang sudah ada tidak terjaga. Penurunan minat

masyarakat bekerja di sektor pertanian pun disebabkan berkurangnya suplai air sehingga terjadi penurunan produktivitas pertanian.

Formulasi dan Implementasi

DARI berbagai permasalahan sumber daya air di atas, maka Kepala Dinas Pengairan (menjadi PUPR pada 2017) Karna Suswandi mempunyai inisiatif untuk meluncurkan program GEMAPILDASI. Pada awalnya gerakan ini merupakan upaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga dan mengelola lingkungan sungai dan irigasi. Dalam perkembangan berikutnya, kegiatan ini menjadi lebih besar dan lebih masif dengan melibatkan banyak Organisasi Perangkat Daerah lainnya serta pihak swasta yang berkaitan dengan pendayagunaan sungai dan irigasi.

Inovasi GEMAPILDASI merupakan gerakan kolaborasi untuk menjaga dan memelihara sungai di Bondowowso agar tetap lestari. GEMAPILDASI bertumpu pada skema tatakelola daerah aliran sungai dan irigasi berbasis kemitraan yang mendorong kepedulian bersama tiga aktor utama, yakni pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak swasta untuk mendorong lahirnya regulasi dan tindakan nyata pengelolaan DAS dan Irigasi di Kabupaten Bondowoso. Gerakan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian dan kebersihan daerah aliran sungai dan irigasi.

GEMAPILDASI diyakini dapat menjadi solusi terhadap permasalahan pengelolaan sumber daya air yang terjadi di Kabupaten Bondowoso. Dengan kegiatan ini permasalahan tumpang tindihnya kewenangan pengelolaan lingkungan, sungai dan irigasi dapat diatasi, karena semua pihak yang berkepentingan terhadap hal tersebut dapat saling berkoordinasi dan melakukan singkronisasi program dan kegiatannya sehingga mengahasilkan strategi kebijakan yang efektif dan efisien. Kolaborasi secara internal dan eksternal antara pemangku kepentingan pengelolaan

sumber daya air diperlukan agar solusi yang ditawarkan adalah solusi yang holistik, pastisipatif, dan sinergis.

Pada awal pelaksanaannya kegiatan ini hanya terbatas pada lingkup Dinas Pengairan saja, dengan dimotori oleh para juru pengairan di lapangan. Mereka mengajak para petani pemakai air yang tergabung dalam HIPPA untuk turut serta menjaga dan merawat sungai dan irigasi di sekitarnya. Setelah berjalan cukup baik dan dirasa banyak pihak yang berkepentingan terhadap kelestarian sungai dan irigasi, maka pada 2016 diterbitkan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 6 Tahun 2016 tentang GEMAPILDASI. Perbup ini mengatur hubungan kerja antarinstansi pemerintah yang terlibat, masyarakat, dan swasta, serta mengatur secara rinci pelaksanaan kegiatan tersebut yang digunakan sebagai dasar keberlanjutan inovasi ini sampai 2018.

GEMAILDASI diluncurkan secara resmi sebagai kegiatan bersama berskala Kabupaten di Desa Cindogo Kecamatan Tapen, bersamaam dengan peresmian kontainer sampah dan penanaman pohon di lokasi sekitar sumber air dan sempadan saluran pada 2016. Guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam pengelolaan sumber daya air khususnya air irigasi, digunakanlah pendekatan dan metode pelaksanaan yang terstruktur dan sistematis, sehingga dapat menghilangkan paradigma "berencana tanpa dilaksanakan" menjadi paradigma "bekerja bersama semua gembira".

Masyarakat terutama para petani pun sangat mengapresiasi positif atas terlaksananya kegiatan Inovasi GEMAPILDASI. Terlebih dengan adanya Inovasi GEMAPILDASI ini yang telah berdampak pada meningkatnya tingkat kontribusi partisipasi dari HIPPA dalam kegiatan pengelolaan dan pengembangan infrastruktur pekerjaan umum bidang sumber daya air. Hal ini seperti yang bisa dilihat dalam Risalah Kelompok Budaya Kerja (KBK) GEMAPILDASI, bahwa tingkat kontribusi partisipasi HIPPA dalam kegiatan pengelolaan dan pengembangan infrastruktur pekerjaan umum bidang sumber daya air meningkat menjadi sebesar 70,55 persen setelah dilaksanakan dilaksanakannya GEMAPILDASI, dari sebelumnya yang hanya 66,66 persen. Berkat hal ini pula, nama Kabupaten Bondowoso menjadi harum di kancah nasional atas raihan HIPPA Sido Makmur Desa Cindogo sebagai Juara 1 dalam loba HIPPA tingkat nasional pada 2017.

Inovsi Jaringan Irigasi (Precast)

PENGELOLAAN Sumber Daya Air (SDA) yang baik adalah sebuah kenis-cayaan yang tidak bisa ditawar lagi untuk menjawab tantangan krisis air global. Salah satu aspek penting dalam pengelolaan SDA ialah pendayagu-naan SDA yang salah satunya berupa kegiatan penyediaan SDA. Penyediaan sarana dan prasarana jaringan irigasi yang baik merupakan salah satu upaya yang nyata untuk mendukung kegiatan penyediaan SDA tersebut.

Pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Pe-nataan Ruang (PUPR) merupakan salah satu pihak yang dituntut untuk mewu-judkan sarana dan prasarana jaringan irigasi yang baik di wilayah Kabupaten Bondowoso. Perlu diketahui di sini bah-wa saluran irigasi sekunder yang terma-suk dalam kewenangan Pemerintah Ka-bupaten Bondowoso adalah sepanjang 163.089 meter, sedangkan untuk saluran tersier adalah sepanjang 421.463 meter. Dari data yang ada, sampai tahun 2017 tercatat bahwa dari angka tersebut, saluran irigasi yang dalam kondisi baik masih sebesar 72,61 persen.

Untuk itulah dibutuhkan inovasi-ino-vasi baru yang lebih baik dalam kegiatan penyediaan sarana-prasana jaringan iri-gasi, terutama saluran irigasi. Dalam hal ini, Dinas PUPR Kabupaten Bondowoso telah meluncurkan inovasi terbaiknya yaitu "Inovasi Jaringan Irigasi (Precast)" pada awal 2018. Inovasi ini merupakan pembangunan jaringan irigasi dengan menggunakan beton (precast) sebagai bahan konstruksi untuk pelinigan sal-uran irigasi. Dikatakan sebagai suatu inovasi karena program ini berbeda den-gan pembangunan jaringan irigasi den-gan penggunaan beton yang pada um-umnya dilakukan dengan pengecoran langsung di saluran irigasi (in-situ), se-hingga dibutuhkan lebih banyak biaya untuk pembuatan bekisting. Sedangkan inovasi ini menggunakan metode precast yang pasti bisa jauh menekan kebutuhan biaya untuk pembuatan bekisting.

Inovasi Jaringan Irigasi (Precast) ini dikatakan sebagai kegiatan penyediaan saluran irigasi yang baik karena sangat banyak keunggulan yang diperoleh dibandingkan dengan metode yang lain. Beberapa keunggulan tersebut ialah lebih menghemat biaya pembuatan bekisting, tidak membutuhkan waktu lama untuk mematikan air irigasi di saluran irigasi lokasi pekerjaan, sehingga tidak mengganggu para petani yang sedang membutuhkan air irigasi untuk lahan sawah, usia guna hasil pekerjaan lebih lama, dan karena sifat precast-nya, lebih mudah dalam proses pemasangan. Pemeliharaannya pun jauh lebih mudah dari pada pembangunan dengan metode lain.

Inovasi dengan metode precast tersebut bertujuan mempercepat terwujudnya saluran irigasi yang baik. Hal ini bisa dicapai karena saluran irigasi hasil pekerjaan dari inovasi ini memiliki usia guna yang lama, sehingga akan memperlambat kerusakan, sekaligus meningkatkan persentase saluran irigasi yang berada dalam kondisi baik. Terkait hal ini, melihat banyak dampak posistif yang dilhirkan, Karna Suswandi lantas berharap program tersebut terus terealisasi secara berkelanjutan agar

semkin membawa manfaat bagi masyarakat luas.

Masyarakat, terutama para petani, pun sangat mengapresiasi terlaksanannya kegiatan Inovasi Jaringan Irigasi (Precast) oleh Dinas PUPR Kabupaten Bondowoso tersebut. Sebab, dengan dilaksanakannya inovasi tersebut harapan masyarakat akan tersedianya sarana dan prasarana jaringan irigasi, khususnya saluran irigasi yang baik, bukanlah sebuah impian lagi. “Sesuai dengan harapan masyarakat luas, utamanya para petani, semoga inovasi ini menjadi pemantik lahirnya inovasi-inovasi baru yang lebih baik di bidang irigasi di masa-masa yang akan datang”, pungkas Karna.

Inovasi JALAN WALI

MENURUT UU Nomor 38 tahun 2004, jalan memiliki beberapa peran penting. Pertama, sebagai bagian dari prasarana transportasi, jalan berperan untuk menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Kedua, sebagai prasarana distribusi barang dan jasa, jalanmenjadi urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Ketiga sebagai satu kesatuan sistem jaringan, jalan menjadi penghubung dan pengikatseluruh wilayah NKRI.

Hingga saat ini Kabupaten Bondowoso memiliki 1.341 Km jalan kabupaten yang meliputi 982,97 Km jalan beraspal, 124,14 km jalan macadam, dan 235,18 Km jalan tanah dengan kondisi jalan beraspal baik sepanjang 479,09 km (48,74 persen), jalan rusak sedang sepanjang 75,39 Km (7,67 persen), rusak ringan 166,53 Km (16,94 persen), dan 261,99 Km (26,65 persen) kondisi jalan beraspal rusak berat. Jalan beraspal kondisi rusak berat yang panjang disebabkan karena tidak berimbangnya kemampuan membangun, meningkatkan, dan memelihara jalan dengan laju percepatan kerusakan jalan, sehingga pembangunan infrastruktur jalan seperti jalan di tempat atau tidak mengalami perkembangan signifikan. Di sisi lain, pembangunan jalan acapkali kontra produktif dengan upaya pelestarian lingkungan.

Oleh karena itu, untuk menopang mobilitas dan konektivitas warga, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, maka pemerintah Kabupaten Bondowoso memprogramkan pembangunan Jalan Berwawasan Lingkungan (Jalan Wali). Inovasi Jalan Wali ini mulai dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kabupaten Bondowoso pada awal Tahun Anggaran 2017. Program ini pun diharapkan akan terus terlaksana pada tahun-tahun anggaran yang akan datang. Sebab, program ini memiliki beberapa tujuan penting, yakni terlaksananya pembangunan jalan kabupaten yang berwawasan lingkungan, meningkatkan fungsi pohon ayoman, meningkatkan usia layanan jalan, dan meningkatkan kemantapan kondisi jalan kabupaten.

Menurut Karna Suswandi, Jalan Wali merupakan kebijakan hijau *(green policy)* yang juga ditujukan untuk menunjang kegiatan-kegiatan ekonomi kreatif, di mana kegiatan ekonomi kretaif ini lebih diarahkan untuk mengembangkan potensi lokal agar dapat bersaing di pasar regional bahkan global. Potensi lokal yang dapat dikembangkan meliputi potensi pertanian, perkebunan, pariwisata, dan potensi unggulan daerah lainnya. Melalui program Jalan Wali, kini sudah banyak jalan pedesaan yang diaspal. Dengan program tersebut pemerintah daerah juga membuka jalan-jalan baru, dari yang awalnya berupa jalan setapak untuk pejalan kaki dan kendaraan beroda dua, kini sudah diperlebar. Dengan adanya perbaikan jalan di desa-desa, masyarakat diharapkan mampu meningkatkan kualitas perekonomian mereka.

Pada tahun 2018, melalui program Jalan Wali, Pemerintah Kabupaten Bondowoso melakukan perbaikan jalan rusak disemua titik dengan melibatkan masyarakat untuk menjaga saluran irigasi, sistem drainase, dan merawat pohon ayoman di sepanjang jalan. Perbaikan jalan pada tahun 2018 yang ditargetkan disemua titik menggunakan bahan aspal berkualitas dengan kandungan asphalt mixing plan sebesar 7 persen.

Kepala Dinas PUPR, Karna Siswandi menyampaikan bahwa perbaikan jalan secara massal tahun 2018 akan menggunakan konsep jalan Wali yang melibatkan masyarakat. “Para warga nanti-

nya akan diberi tanggung jawab untuk menjaga saluran irigasi dengan tidak membuang sampah sembarangan serta merawat pohon ayoman dan sistem drainase agar saat terjadi hujan tidak menggenang ke jalan", tutur Karna.

Sejak ditetatapkannya program Jalan Wali yang salah satunya menekankan kesadaran masyarakat agar peduli lingkungan, maka pertama kali yang dilakukan pemerintah Bondowoso adalah sosialisasi melalui jalan-jalan sehat yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat sekitar.

Totalitas Membangun Infrastruktur

PEMBANGUNAN infrastruktur merupakan bagian terpenting dalam mendukung pembangunan dan kemajuan daerah. Pembangunan infrastruktur dapat mewujud dalam bentuk pemeliharaan dan pembenahan fasilitas fisik publik secara total. Salah satu bentuk pemeliharaan dan pembenahan infrastruktur adalah pembangunan menuju kawasan wisata dan fasilitas di lokasi wisata.

Infrastruktur yang baik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Berpijak di atas hal ini, pemerintah Bondowoso terus berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dengan meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan jalan, baik jalan yang menuju wisata maupun jalan bukan wisata, dan pemeliharaan jembatan serta perbaikan pasar.

Pada tahun 2017, pemerintah Bondowoso melakukan pemeliharaan jalan sepanjang 65.379.85 meter dan pemeliharaan jembatan sepanjang 31.432,00 meter di seluruh Kabupaten Bondowoso. Melalui program pemeliharaan ini, pemerintah Bondowoso dapat meningkatkan panjang jalan beraspal menjadi 1059,831 kilometer (79,031%) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi	
		2016	2017
01	Jalan aspal (km)	981,72	1.059,831
02	Jalan makadam (km)	124,14	71,109
03	Jalan tanah (km)	235,18	210,10
04	Jumlah panjang jalan (km)	1.341,04	1.341,04
05	Kondisi jalan aspal		
	- Kondisi baik (km)	554,48	651,291
	- Kondisi rusak (km)	427,24	408,54
06	Kondisi jembatan		
	- Kondisi baik (unit)	201	239
	- Kondisi rusak (unit)	77	58

Sementara pada tahun 2018, melalui dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), pemerintah daerah merencanakan perbaikan akses jalan menuju destinasi wisata. Pembangunan infrastruktur jalan menuju destinasi wisata menjadi salah satu program prioritas pemerintah Kabupaten Bondowoso. Karna Suswandi selaku kepala dinas PUPR menegaskan bahwa pihaknya akan selalu mendorong potensi kekayaan alam Bondowoso dan mendorong masyarakat untuk mandiri dan menciptakan lapangan pekerjaan melalui pengembangan potensi yang ada di desa masing-masing, baik itu wisata, kerajinan, dan sebagainya.

"Prioritas pembangunan infrastruktur jalan menuju objek wisata menjadi perhatian khusus bapak bupati dan DPRD Bondowoso. Untuk tahun 2018, perencanaan pembangunan infrastruktur jalan menuju wisata dianggarkan 28,1 miliar di enam titik. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat" ungkapnya.

MONITORRING; Bupati didampingi Sekretaris DPMD Kabupaten Bondowoso meninjau pembangunan infrastruktur. *(Foto/dokumen)*

Untuk mewujudkan terlaksananya pembangunan infrastruktur jalan, Karna juga meminta dukungan masyarakat Bondowoso untuk terus mendorong kemajuan wisata, dengan bersikap ramah terhadap pengunjung, ikut serta menjaga fasilitas wisata, dan merawat jalan menuju lokasi wisata. Enam titik wisata yang menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam pembangunan akses jalan tahun 2018 adalah jalan menuju destinasi wisata Beto Soon, menuju air panas, Jampit, Paralayang, wisata Almor, dan wisata Rengganis desa Glingseran.

Pembangunan Jalan Menuju Wisata Kawah Ijen

KAWAH Ijen termasuk salah satu objek wisata alam yang dimiliki Kabupaten Bondowoso. Bahkan sebelum munculnya objek wisata baru di Bondowoso, Kawah Ijen sudah terlebih dahulu menjadi tumpuan pengunjung, baik lokal, nasional maupun mancanegara.

Dalam setiap tahunnya, pengunjung yang melalui jalur Bondowoso terus bertambah, sehingga hal ini memotivasi pemerintah Bondowoso untuk memberikan kenyamanan melalui perbaikan infrastruktur jalan menuju wisata Kawah Ijen.

Untuk akses jalan menuju wisata Kawah Ijen, pemerintah Bondowoso melakukan perbaikan jalan secara berkala, yaitu jalan Sumber Gading menuju Sukorejo, jalan Sukorejo menuju Gunung Malang, dan jalan Gunung Malang menuju Kawah Ijen.

Pembangunan Jalan Menuju Wisata Kawah Wurung

TIDAK kalah menarik dengan objek wisata Kawah Ijen, Kawah Wurung pun juga mampu memberikan daya tarik terhadap pengunjung dengan menawarkan panorama keindahan alam. Walaupun terbilang baru di Bondowoso, namun beberapa tahun ini keberadaan Kawah Wurung telah menjadi primadona baru yang menyedot kedatangan pengunjung. Tentu perbagai proses telah dilakukan pemerintah Bondowoso untuk memperkenalkan wisata Kawah Wurung, mulai dari publikasi yang masif hingga perbaikan infrastruktur.

Perbaikan infrastruktur dilakukan melalui peningkatan kondisi jalan menuju Kawah Wurung agar pengun-

PONDASI; Bupati Amin Said Husni meletakkan batu pertama pembangunan salah satu infrastruktur daerah. *(Foto/dokumen)*

jung dengan mudah mencapai lokasi wisata. Tujuan perbaikan infrastruktur jalan adalah untuk mempermudah akses masyarakat, mengembangkan kawasan pariwisata, dan meningkatkan ekonomi masyarakat.

Peningkatan jalan menuju objek wisata memang sangat dibutuhkan, termasuk peningkatan jalan menuju wisata Kawah Wurung. Karena itulah pada tahun 2017, pemerintah Bondowoso melakukan peningkatan kondisi jalan dan jembatan menuju wisata Kawah Wurung, khususnya jalan poros dusun Watucapil. Proses peningkatan ini menghabiskan anggaran realisasi Rp. 2.979. 973.000 dengan ruas jalan 4 x 1.319 meter dalam bentuk kontruksi bangunan rigid (jalan beton).

Pembangunan Jalan Menuju Wisata Beto Soon

DESTINASI wisata Beto Soon salah satu bagian dari potensi kekayaan alam yang dimiliki Bondowoso, tepatnya di desa Solor Kecamatan Cermee. Sejauh ini destinasi wisata Beto Soon mulai banyak dikenal oleh masyarakat, baik lokal maupun nasional. Tidak hanya eksotika susunan batunya yang dikenal, kawasan wisata Beto Soon juga dikenal dengan *spot* air terjun yang menjadi daya tarik pengunjung untuk datang.

Di awal dipopulerkannya Beto Soon, untuk bisa sampai ke *spot,* pengunjung harus melalui akses jalan yang tidak baik: makadam, paras, dan tanjakan. Bahkan jika musim hujan tiba, jalan pun akan menjadi licin dan cukup berbahaya bagi pengemdara yang tidak berpengalaman. Sekalipun demikian, pengunjung terus berdatangan untuk menikmati keindahan Beto Soon, sehingga hal ini melecut pemerintah untuk membangun akses dan fasilitas yang memadai.

Memasuki tahun 2017, pemerintah Bondowoso melalui dinas PUPR memulai pembangunan jalan menuju destinasi wisata Beto Soon sepanjang 11 km yang didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) yang menelan anggaran sebesar

11,038 miliar rupiah dengan realisasi panjang 9,5 km dengan komposisi Hotmix. “Awalnya 11 km, namun karena ada pengepresan dan badan jalan yang perlu dinding penahan, maka baru bisa 9,5 km dan insyaallah tahun 2018 akan selesai seluruhnya” ungkap Karna Suswandi.

Pengaspalan jalan menuju destinasi wisata Beto Soon dimulai dari lokasi wisata dan berakhir di desa Batu Ampar, sementara sisa jalan yang belum diaspal dari desa Batu Ampar menuju Cermee masih menunggu alokasi anggaran tahun 2018. Pada awal tahun 2018, rencana tindak lanjut pengaspalan jalan menuju wisata Beto Soon dari desa Batu Ampar menuju Cermee dapat terwujud sesuai rencana, sehingga dengan baiknya akses jalan, pengunjung bisa lebih mudah berkunjung sambil menikmati keindahan jalan menuju lokasi Beto Soon.

Pembangunan infrastruktur menuju destinasi wisata Beto Soon terdiri dari pembangunan jalan dan jembatan. Pembangunan jalan terdiri dari dua ruas jalan yaitu jalan Cermee menuju Suling Wetan dan Suling Wetan menuju desa Solor, yang dikerjakan selama dua tahun (tahun 2017-2018). Sedangkan pembangunan jembatan berupa perbaikan jembatan Widuri yang berlokasi di ruas jalan Kecamatan Prajekan menuju Cermee.

Pembangunan Jembatan Ki Ronggo

JEMBATAN Ki Ronggo salah satu jembatan yang menghubungkan Tegal Ampel menuju Kecamatan Bondowoso. Nama jembatan Ki Ronggo sendiri diadopsi dari nama pembabat alas Bondowoso. Pembangunan jembatan Ki Ronggo bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat Tegal Ampel munuju kota Bondowoso.

Pada jembatan Ki Ronggo terlihat dua tiang sejajar di sisi kanan dan kiri dengan hiasan tali berlampu yang menyala, bahkan masyarakat sekitar menyebutnya sebagai mini Suramadu Bondowoso. Jembatan Ki Ronggo tidak hanya berfungsi sebagai jalan lintasan, tetapi juga dapat menjadi pusat wisata kuliner Bondowoso. Untuk itu, pada tahun 2018, dinas PUPR merencanakan pembangunan gazebo dan taman bermain. “Jadi tempat ini bisa digunakan

untuk wisata kuliner, diskusi, cangkruan, dan kegiatan menarik lainnya", ungkap Karna Suswandi.

Sinergitas lintas instansi dalam pembangunan jembatan Ki Ronggo sangat diperlukan. Untuk urusan pembangunan jembatan dan fasilitas seperti lampu, menjadi tanggungjawab PUPR, sementara penyediaan kluster menjadi tanggungjawab Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindak). Saat ini jembatan Ki Ronggo telah menjadi salah satu *spot* favorit masyarakat Bondowoso yang sering dikunjungi di waktu malam.

Pembangunan Pasar Induk

PASAR merupakan tempat interaksi untuk melakukan transaksi jual beli, baik transaksi perorangan maupun kelompok. Pasar menjadi denyut nadi perekonomian masyarakat dan sumber pendapatan daerah.

Setiap daerah pasti memiliki pusat perekonomian yang dibangun sesuai konsep daerah masing-masing, termasuk pusat perekonomian Kabupaten Bondowoso yang dibangun di pusat perkotaan yaitu pasar induk Bondowoso.

Pasar induk Bondowoso adalah salah satu pasar tradisonal dan menjadi pusat perbelanjaan masyarakat Bondowoso. Sebelumnya, pasar induk ini masih kurang memberikan dampat positif bagi pengguna dan lingkungan sekitar, sehingga hal ini menuntut pemerintah Bondowoso untuk merehabilitasinya demi kenyamanan dan kemanfaatan bagi mereka.

Latar belakang ketidaknyamanan pasar induk Bondowoso sendiri disebabkan kondisi pasar yang semrawut, kotor, kumuh, dan tidak aman, sehingga tidak sedikit pedagang dan pengunjung mengeluhkan kondisi pasar induk Bondowoso.

Oleh karena itu, pemerintah Bondowoso kemudian melakukan perbaikan pembangunan pasar induk tradisional berkonsep modern. Melalui perbaikan pasar induk tradisional yang berkonsep modern, diharapkan akan lebih menghidupkan geliat aktivitas ekonomi ma-

syarakat dan mendorong terciptanya lapangan pekerjaan. Untuk mewujudkan pasar tradisional berkonsep modern, maka dibutuhkan peningkatan fasilitas penunjang lainnya sesuai kebutuhan pengunjung.

Perbaikan pasar induk dilakukan melaui dua tahap. *Pertama*, pembangunan pasar tahun 2017 dengan realisasi anggaran Rp. 14.614.000.000. *Kedua*, pembangunan pasar tahun 2018 dengan realisasi anggaran Rp. 4.602.600.000.

Geliat Membangun dari Desa

PENGUATAN infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tidak hanya menjadi perhatian pemerintah daerah. Pemerintah desa juga mengambil bagian penting di dalamnya. Peran desa ini semakin penting terutama sejak dialokasikannya dana desa yang semakin besar untuk mewujudkan kesejahteraan warganya. Badan Usaha Milik Desa atau Bumdes, menjadi instrument penting yang menjadi kepanjangan desa dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat di desa.

Menurut Asnawi Sabil sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bondowoso, terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan peran dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. "Ada berbagai usaha dan kegiatan yang dilakukan bumdes, ada yang mengelola destinasi wisata, ada juga bumdes yang produktif, dan ada juga bumdes simpan pinjam" kata Sabil menjelaskan.

Pengembangan infrastruktur salah satunya dilakukan oleh bumdes Trebungan Kecamatan Taman Krocok dengan membangun fasilitas penyediaan air bersih bagi masyarakat sebagai salah satu kegiatan produktif yang dikembangkannya. Desa ini merupakan salah satu contoh desa yang mampu memberdayakan masyarakat dengan memanfaatkan dana desa untuk kemaslahatan.

REPRESENTATIF; Proses pembangunan pasar induk Bondowoso. *(Foto/dokumen)*

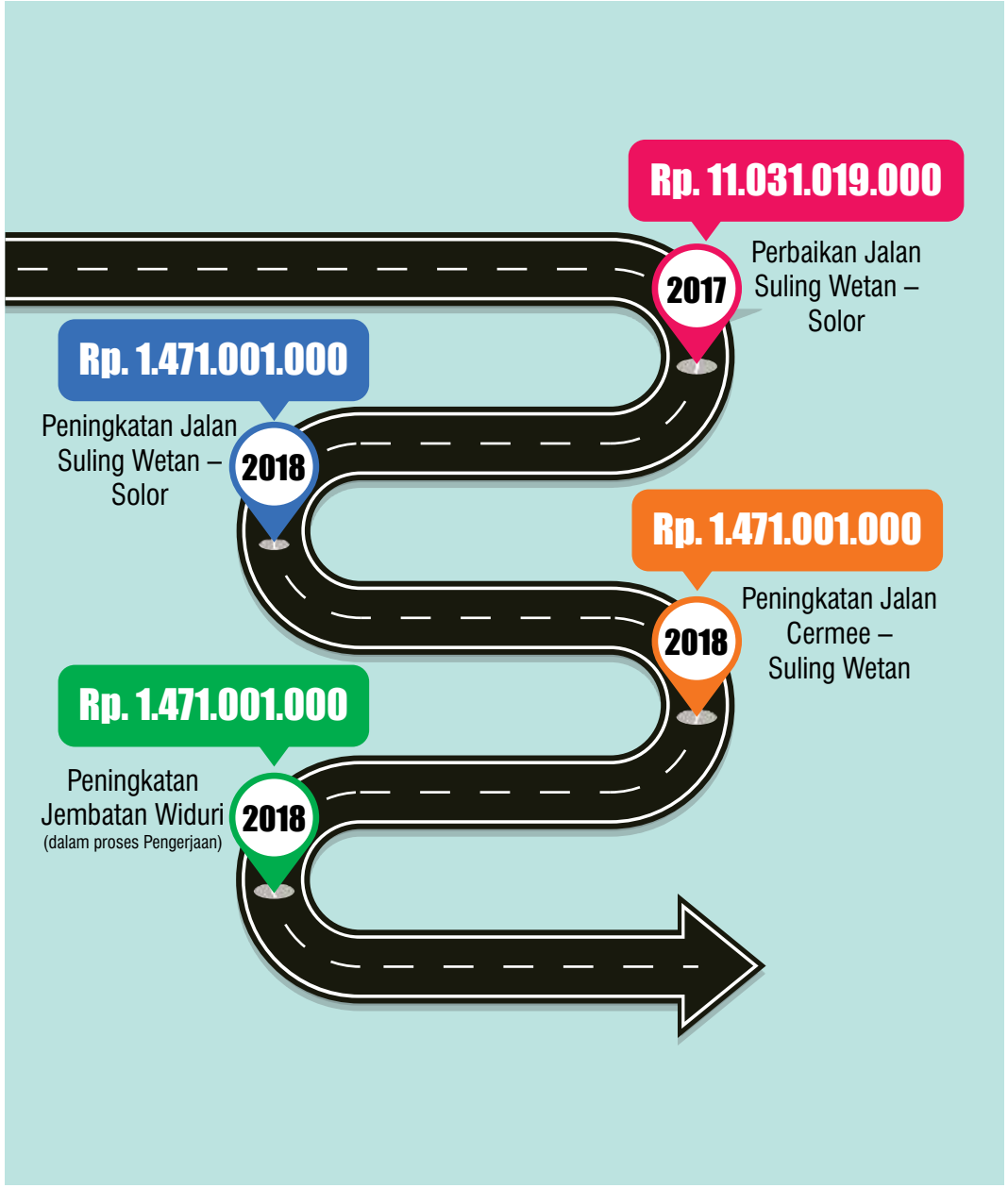

Dari dana itu, pemerintah desa melakukan pengeboran air bersih yang disalurkan ke tandon dan kemudian disalurkan kembali ke rumah-rumah warga. Hal ini telah berlangsung beberapa tahun.

Padahal, secara geografis desa tersebut berada pada posisi yang kurang menguntungkan, terlebih ketika musim kemarau di mana kekeringan sudah menjadi pemandangan yang familiar bagi masyarakat.

Berawal dari kegelisahan akan selalu terjadinya kekeringan di setiap tahun, maka pemerintah desa Trebungan berinisiatif menggunakan dana desa untuk membuat sumur bor dan menyediakan tandon air bersih bagi para warganya. Saat ini, terdapat 17 sumur bor yang disediakan untuk menyalurkan air bersih ke rumah-rumah penduduk. Masyarakat desa Trebungan tidak lagi menggantungkan kebutuhan air bersih dari pemerintah daerah. Sebab, melalui sumur bor yang sudah ada, kebutuhan air bersih para warga sudah terpenuhi.

Bahkan tidak hanya penyedian air bersih yang dilakukan oleh pemerintah desa, pembangungan jembatan pun yang awalnya hanya setapak juga dilakukan guna mempermudah masyarakat menjalankan aktivitas perekonomiannya.

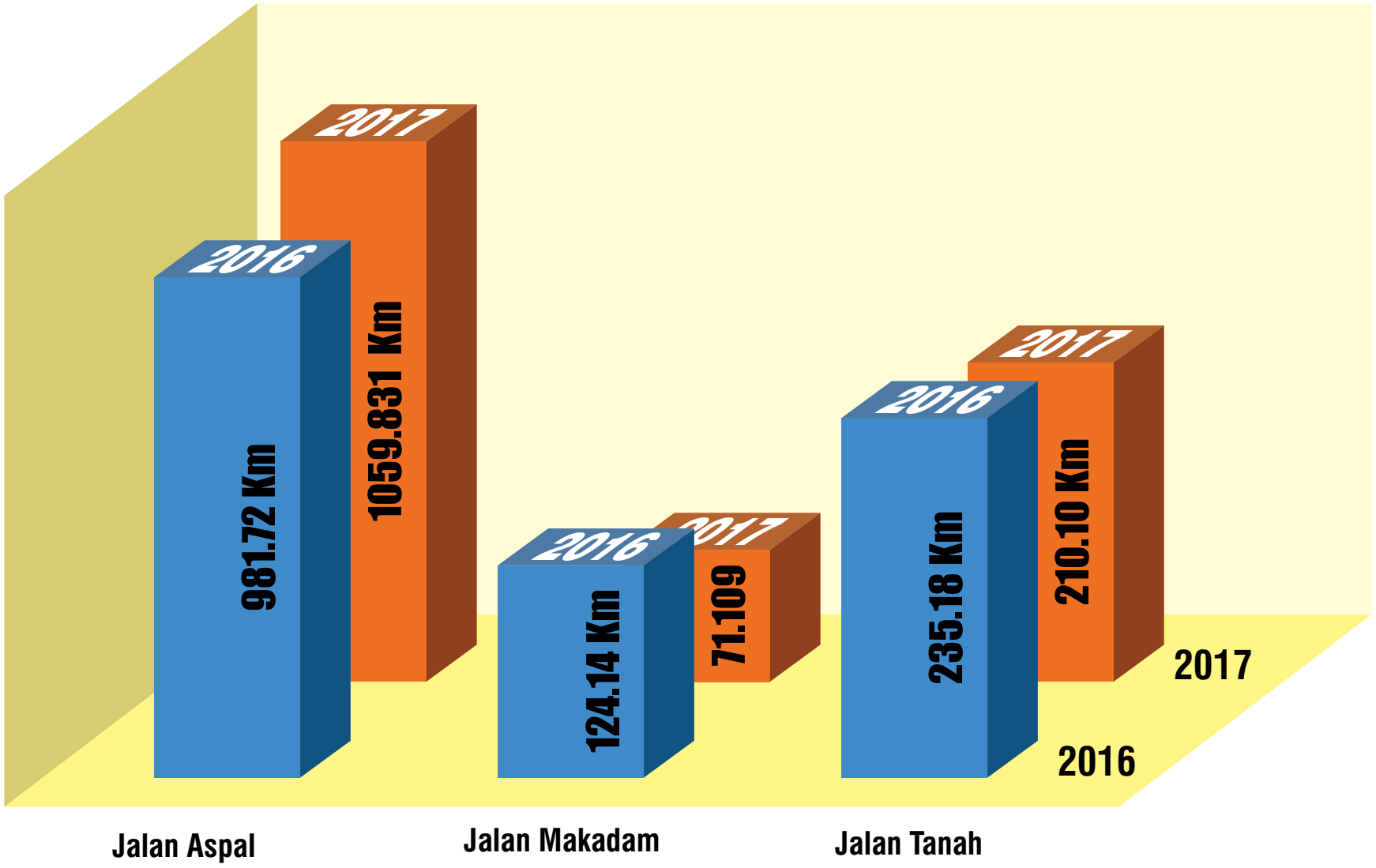
2017
2016
981.72 Km
1059.831 Km
2016
2017
124.14 Km
71.109
2016
2017
235.18 Km
210.10 Km
2017
2016
Jalan Aspal
Jalan Makadam
Jalan Tanah

Alokasi Pembangunan
Jalan Menuju Destinasi
Wisata Kawah Ijen
Pembangunan Jalan Poros Dusun
Watucapil menuju Wisata Kawah Wurung
Rp. 2.979.973.000
Peningkatan Jalan
Sumber Gading - Sukorejo
Rp. 3.119.897.000
Peningkatan Jalan
Sukorejo - Gunung Malang
Rp. 13.800.006.000
Peningkatan Jalan
Sukorejo - Gunung Malang
Rp. 1.100.000.000
Khusus pada penanganan penahan jalan
area longsor (dalam proses pengerjaan)
Rp. 12.220.120.000
Peningkatan Jalan
Gunung Malang - Kawah Ijen

Eksotika
Pariwisata Kita

KEINDAHAN; Bupati Amin Said Husni memberikan sambutan dengan latar panorama Megasari. *(Foto/dokumen)*

BAGI suatu daerah, pariwisata bukan sekedar tempat rekreasi untuk berlibur, bersenang-senang, menghilangkan kepenatan, dan memenuhi rasa penasaran untuk mengunjungi suatu destinasi tertentu. Pariwisata memiliki makna yang lebih dari sakadar apa yang dikatakan oleh M. Ngafenan (1997:27) "Pariwisata adalah segala objek wisata yang dapat menimbulkan daya tarik bagi para wisatawan untuk dapat mengunjunginya", melainkan pariwisata juga menjadi aset pendapatan daerah dan ekonomi kreatif masyarakat.

Oleh karena itu, suatu daerah harus terus berupaya mengembangkan objek wisataya masing-masing dengan pelbagai strategi seperti perbaikan sarana prasarana dan infrastruktur untuk menarik perhatian pengunjung, dan sebagainya. Banyaknya pengunjung yang datang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah dan menggairahkan perekonomian masyarakat.

Upaya di bidang pariwisata ini menjadi salah satu fokus pembangunan Kabupaten Bondowoso. Pemerintah optimis, pengembangan sektor pariwisata dapat menjadi salah satu cara efektif untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Secara geografis, Bondowoso terdiri dari kawasan pegunungan dan perbukitan yang tidak memiliki lautan, justru karena struktur alam demikian, Bondowoso menyimpan potensi kekayaan pariwisata yang melimpah. Ada pelbagai kekayaan yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah kabupaten Bondowoso di bidang pengembangan pariwisata, salah satunya adalah kekayaan peninggalan budaya *(cultural heritage)* dan peninggalan alam *(natural heritage)*.

Menurut M. Ngafenan pengembangan objek wisata dapat dilakukan melalui tiga teori: *pertama*, teori pengembangan objek wisata alam yaitu objek wisata yang daya tariknya bersumber pada keindahan dan kekayaan alam. *Kedua*, teori pengembangan objek wisata budaya yaitu objek wisaya yang daya tariknya bersumber pada kebudayaan seperti peninggalan sejarah, museum, dan objek wisata yang berkaitan dengan kebudayaan. *Ketiga*, teori pengem-

bangan objek wisata tirta yaitu kawasan objek wisata artifisial yang dapat digunakan baik untuk rekreasi maupun untuk kegiatan olah raga, seperti arum jeram, memancing, dan mandi, dan lain sebagainya.

Berdasarkan teori pengembangan objek wisata tersebut, Kabupaten Bondowoso dalam hal ini mengoptimalkan pengembangan wisata di ketiga spektrum tersebut; wisata alam, budaya, dan buatan manusia (tirta). Dulu Bondowoso hanya dikenal dengan *view* Kawah Ijen-nya, namun di masa pemerintahan Bupati Amin Said Husni selama dua periode, Bondowoso terus mengembangkan potensi kekayaan pariwisata lain yang dimiliki. Tidak hanya Kawah Ijen yang dikenal, bahkan wisata-wisata lain mulai bermunculan dan dikelola dengan baik.

Saat ini, pertumbuhan wisata Bondowoso mulai menjamur dan sekian diantaranya menjadi magnet wisatawan nasional maupun internasional untuk datang mengunjunginya, sebut saja wisata Batu Soon, Kawah Wurung, Singo Ulung, Bosamba, pemandian Tasnan dan sebagainya. Upaya pengembangan pariwisata di Bondowoso dilakukan secara terstruktur dan terencana dengan mengacu kepada cetak biru *(blue print)* pengembangan pariwisata yang dikodifikasi ke dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA).

Pengelolaan Pariwisata Bondowoso

PENGELOLAAN merupakan suatu proses yang diterapkan oleh individu atau kelompok dalam upaya organisasi mencapai tujuan. Pencapaian tujuan dalam setiap organisasi menjadi target yang harus dicapai, tak terkecuali dalam konteks daerah atau kabupaten. Salah satunya adalah pencapaian target kabupaten Bondowoso di bidang kepariwisataan. Daya tarik wisata menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke tujuan wisata Bondowoso. Karena itu, pengelolaan pariwisata harus dilakukan secara profesional. Menurut George Robert Terry pengelolaan pariwisata agar menjadi daya tarik pengunjung mencakup empat komponen. *Pertama*, perencanaan. *Kedua*, pengorganisasian.

Ketiga, penggerakan. *Keempat* pengendalian (Siswanto, 2005:18).

Berbicara tentang pengelolaan objek wisata, Harry Patriantono selaku Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda Olah Raga dan Perhubungan (Disparporahub) Kabupaten Bondowoso mengungkapkan bahwa dalam rangka membangun pariwisata Bondowoso dilakukan perubahan, yang awalnya hanya fokus pada pemasaran dan promosi, tetapi saat ini dilakukan perbaikan sarana prasarana dan infrastruktur.

Selanjutnya juga dilakukan penciptaan *city branding* melalui kegiatan-kegitan pengenalan wisata Bondowoso, seperti Bondowoso Republik Kopi (BRK). Pengenalan republik kopi sebagai bagian dari wisata Bondowoso cukup berhasil. Terbukti BRK mulai dikenal sebagai *land mark* yang identik dengan Bondowoso.

"Orang ketika berbicara Bondowoso, *mindset* mereka tidak lagi tertuju ke tape tetapi beralih ke kopi" ungkap Harry. Perubahan identitas Bondowoso sebagai kota kopi mengindikasikan bahwa pemerintah Bondowoso sukses melakukan sosialisasi dan kerjasama dengan instansi-instansi terkait untuk mengorbitkan *branding* BRK.

ADVENTURE; Kawasan Megasari memiliki spot ideal untuk olahraga paralayang. *(Foto/dokumen)*

Pembangunan Wisata yang Layak Kunjung

DALAM pengelolaan wisata di Bondowoso, terdapat pelbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah. *Pertama*, aksesibilitas yaitu perbaikan akses menuju objek wisata, seperti perbaikan jalan menuju lokasi wisata. Salah satu contoh adalah destinasi wisata Beto Soon Solor. Dulu untuk menuju wisata Beto Soon harus melalui jalan bebatuan, namun sejak tahun 2017 di masa kepemimpinan bupati Amin Said Husni, jalan menuju destinasi wisata Beto Soon sudah diaspal. *Kedua*, *attraction* yaitu daya tarik destinasi wisata alam, budaya, dan buatan manusia. Untuk meningkatkan daya tarik wisata, pemerintah Bondowoso melakukan perbaikan fasilitas: tempat bermain anak-anak, tempat istirahat, kamar mandi, dan sebagainya. *Ketiga*, pemasaran dan promosi pariwisata berbasis teknologi *(IT Baset Marketing)*. *IT Based Marketing* dilaku-

kan dengan memperkenalkan wisata daerah melalui komunitas-komunitas, media sosial, dan even-even nasional.

Pok Darwis atau Kelompok Sadar Wisata menjadi salah satu bentuk keterlibatan komunitas yang berperan aktif dalam pengelolaan pariwisata daerah. Mereka dibekali dengan berbagai pelatihan tentang teknik pengelolaan wisata yang baik dan cara mengembangkannya. Kebanyakan dari mereka terdiri dari anak-anak muda progresif yang memiliki potensi dan kemampuan mengembangkan wisata Bondowoso.

Di samping Pok Darwis, pemerintah juga menyelenggarakan even-even nasional maupun internasional di tempat-tempat wisata, guna mengenalkan pariwisata daerah. Bahkan saat ini pemerintah Bondowoso memiliki *calender of event* atau dikenal dengan sebutan *Ijen Festival*. Tujuan dari even-even ini adalah unuk menunjukkan eksistensi Bondowoso sebagai daerah yang memiliki kekayaan wisata daerah. Even-even tersebut dirangkai dalam kegiatan *Load to Ijen*, *Ijen Trail Running*, *Ijen Enduro Challenge*, *Ijen Flaying Fest*, *Mt. Ijen Super Gravity*, Festival Kopi Nusantara, dan Jazz Ijen.

Penguatan *amenities* juga menjadi salah satu upaya yang dilakukan Bondowoso dalam memperkuat pembangunan pariwisata. *Ameneties* sendiri merupakan fasilitas sarana dan prasarana dan layanan jasa wisata di destinasi wisata. Penguatan amenities dimaksudkan sebagai pembenahan dan perbaikan sarana-prasarana dan infrastruktur wisata yang bekerjasama dengan dinas-dinas lain di kabupaten Bondowoso. Objek wisata yang dulunya hanya sekedar tempat wisata tanpa fasilitas yang kurang mamadahi, saat ini sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas, seperti tempat istirahat, bahkan jalan menuju lokasi wisata sudah diperbaiki.

ADRENALIN; Bupati Amin Said Husni mencoba sensasi olahraga paralayang. *(Foto/dokumen)*

Pengelolaan Wisata Melalui Bumdes

PEMERINTAH Kabupaten Bondowoso memiliki konsen terhadap tata kelola dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) melalui Sistem Keuangan Desa (Siskudes), di mana sistem keuangan itu dibuat untuk me-

nyusun perencanaan dan pengelolaan anggaran. Dalam dua tahun terakhir ini, pemerintah mendorong penggunaan dana desa tidak hanya dalam persoalan infrastruktur tetapi juga pendirian Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). "Tahun 2017, pemerintah mendorong teman-teman desa untuk mengalokasikan anggaran untuk bumdes. Dari 209 desa, informasi terakhir terdapat 208 desa sudah berbumdes" kata Asnawi Sabil Sekretaris DPMD Bondowoso.

Melalui Bumdes ini, ada beberapa usaha dan kegiatan yang dilakukan desa salah satunya adalah pengelolaan destinasi wisata. Pemerintah desa dalam hal ini memaksimalkan anggaran dana desa tersebut untuk membangun pariwisata yang layak kunjung. Untuk saat ini, ada dua desa yang menjadi cerita sukses *(success story)* pemanfaatkan dana desa dan alokasi dana desa untuk pengelolaan destinasi wisata, yaitu Desa Alassumur dan Desa Glingseran.

Populasi Kunjungan Wisatawan Bondowoso

UNTUK meningkatkan daya tarik objek wisata, pemerintah Bondowoso berperan aktif memperkenalkan objek wisata melalui kelompok-kelompok dan even-even tahunan. Tidak hanya *marketing* yang dilakukan, tetapi pembenahan fasilitas terus dikembangkan, baik fasilitas berupa sarana prasarana maupun infrastruktur, sehingga pengunjung terus berdatangan untuk menikmati keindahan pariwisata Bondowoso. Tercatat sejak tahun 2014 – 2017, angka statistik kunjungan wisatawan ke Boondowoso terus meningkat. Peningkatan grafik kunjungan ini menjadi indikator keberhasilan pengembangan pariwisata Bondowoso.

Anggaran Bidang Pariwisata Tahun 2015 – 2018

Program	2015	2016	2017	2018
Pemasaran Pariwisata	1.722.000.000	1.325.104.000	2.009.275.000	2.471.300.000
Destinasi Pariwisata	1.765.715.000	2.420.000.000	2.425.000.000	2.417.949.000
Pembangunan Kemitraan	125.000.000	535.000.000	548.000.000	-

Pembangunan Pariwisata Terpadu Bondowoso

PEMBANGUNAN pariwisata terpadu dimaksudkan sebagai upaya pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui kerjasama dengan dinas-dinas untuk mengembangkan destinasi wisata, baik destinasi wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan manusia. Tentu ketika berbicara pengembangan pariwisata terpadu, maka berbicara pula anggaran dana dinas-dinas untuk dialokasikan terhadap pembangunan sektor wisata.

Upaya pengembangan destinasi wisata Bondowoso tidak hanya menjadi tanggungjawab Disparporahub, melainkan juga tanggungjawab dinas-dinas lain di Bondowoso. Pengembangan SDM sadar wisata menjadi tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), DPMD dan Disparporahub. Promosi dan pemasaran destinasi wisata merupakan tanggungjawab Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo), Disparporahub, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Promosi Pariwisata Daerah (BP2D), komunitas-komunitas, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI), klub fotografi, media, dan Association of the Indonesian Tour and Travel Agencies (Asita). Penyediaan akomodasi destinasi wisata menjadi tanggungjawab Diskoperindak, Disparporahub, PTPN XII, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK), Di-

Data Kunjungan Wisatawan Bondowoso Sejak Tahun 2010-2017

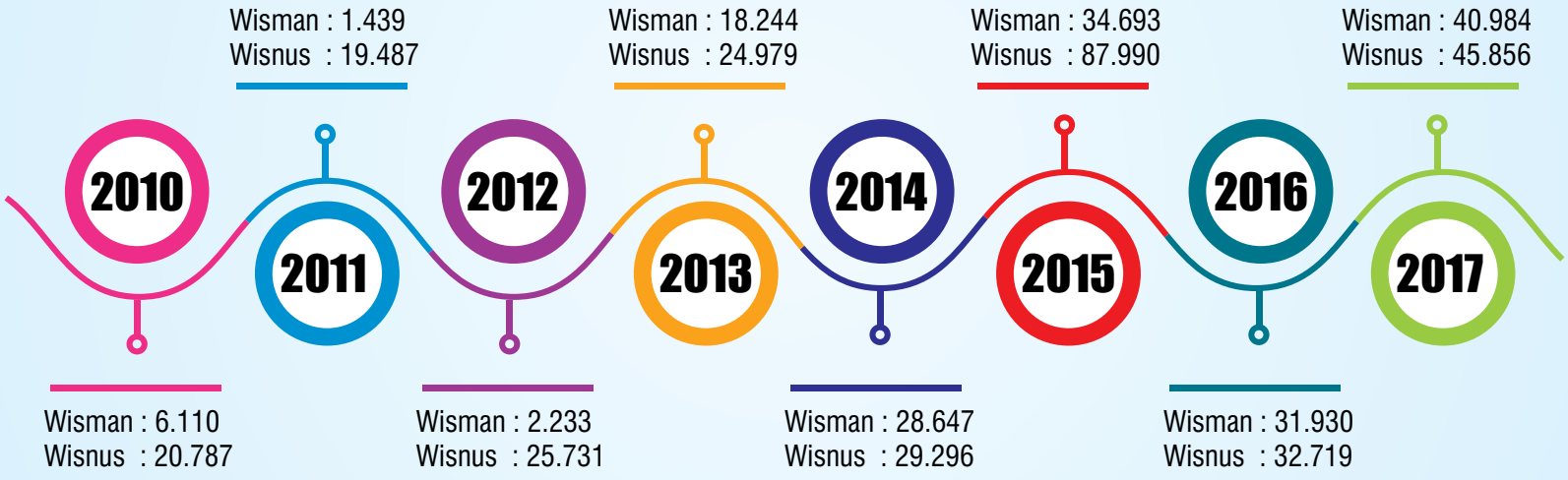

nas Kesehatan (Dinkes), Badan Lingkungan Hidup (BLH), dan PHRI. Pembangunan aksesibilitas tanggungjawab Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Disparporahub, Organisasi Angkutan Darat (Organda), Asita, dan ojek. Sementara pengembangan destinasi wisata melalui kemitraan menjadi tanggung jawab Disparporahub, Perhutani, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), PTPN XII, desa, Diskoperindak, pengrajin, pengusaha, dan masyarakat.

Destinasi Wisata Alam (natural tourism)

PENGEMBANGAN wisata peninggalan alam terus dilakukan oleh pemerintah Bondowoso melalui pemaksimalan potensi kekayaan alam. Bondowoso yang merupakan daerah pegunungan dan perbukitan terus berupaya membangun keindahan wisata, baik dari segi sarana prasarana dan infrastruktur. Upaya pengembangan destinasi wisata alam ini mencapai 36 % pemberdayaan, mulai dari sarana prasarana, infrastruktur, dan sosialisai. Beberapa di antara objek wisata peninggalan alam di Bondowoso adalah Kawah Ijen, Kawah Wurung, Beto Soon Solor, wisata Megasari, air terjun Belawan, air terjun Tancak Kembar, pemandangan Arak-arak, Gunung Raung, Patirana P28, dan Puncak Scorpio.

KAWAH IJEN

GUNUNG Ijen atau lebih dikenal dengan Kawah Ijen adalah salah satu gunung yang memiliki ketinggian 2.443 mdpl. Kawah Ijen merupakan satu komplek gunung yang terdiri dari kawah dan dataran tinggi. Kawasan ini terletak di tiga kabupaten, yaitu Bondowoso, Banyuwangi, dan Situbondo. Di kawasan Gunung Ijen terdapat pertambangan belerang. Saat berada di kawasan Gunung Ijen, pengunjung bisa menyaksikan para penambang yang sibuk membawa tumpukan belerang menyusuri jalan yang curam.

Kawah Ijen merupakan pusat danau kawah yang terbesar, yang bisa memproduksi 36 juta meter kubik belerang dan hidrogen klorida dengan luas sekitar 5.466 hektar. Kawah ini memiliki

keindahan yang luar biasa dengan danau belerang berwarna hijau toska dengan sentuhan dramatis dan elok.

Ada beberapa jalur yang bisa dilalui jika ingin mengunjungi Kawah Ijen, yaitu jalur Situbondo dan jalur Banyuwangi. Jalur Utara melewati kota Situbondo menuju ke arah Sempol Bondowoso, dan melewati Wonosari menuju lokasi wisata. Jarak dari Situbondo ke lokasi wisata kurang lebih 93 km dengan kondisi jalan aspal yang bisa ditempuh kurang lebih 2-3 jam. Jalur Selatan bisa melewati kota Banyuwangi, mengambil jurusan ke daerah Licin yang berjarak sekitar 15 km, dari daerah Licin langsung ke lokasi wisata yang berjarak sekitar 18 km. Perjalanan bisa dilanjutkan menggunakan kendaraan dengan *double garden*.

KAWAH WURUNG

KAWAH Wurung Bondowoso merupakan sebuah wisata alam liar dengan hamparan tanah yang luas dengan ditumbuhi rerumputan. Jika dilihat sekilas, lokasi Kawah Wurung mirip dengan kawasan gunung Bromo, hanya saja luas Kawah Wurung lebih kecil dari kawasan Bromo. Pemandangan hijau yang indah akan terlihat ketika musim penghijau. Ketika musim kemarau, rumput-rumput hijau berubah menjadi kekuningan, terkadang juga menjadi berwarna merah muda. Kawah Wurung terletak di desa Jampit Kecamatan Sempol Kabupaten Bondowoso. Kawah ini terletak berdekatan dengan Kawah Ijen. Oleh karena itu, jika telah mengunjungi Kawah Ijen, tidak ada salahnya untuk berkunjung pula dan melihat-lihat tempat wisata dengan bukit hijau yang indah sebagai tempat peristirahatan.

Di lokasi wisata Kawah Wurung pengunjung bisa melakukan berbagai jenis kegiatan seperti berkendara menggunakan kendaraan pribadi atau sekedar bersepeda mengitari kawasan padang rumput. Lokasi wisata ini juga bisa dijadikan objek foto yang bagus. Harga tiket masuk ke kawasan wisata Kawah Wurung cukup murah, cukup dengan tarif Rp. 3000/orang, pengunjung bisa menikmati keindahan Kawah Wurung.

BETO SOON SOLOR

SEBAGIAN orang menyebut wisata batu ini sebagai stonehenge, mengacu kepada wisata magalitikum yang terkenal di Inggris. Batu Soon, demikian nama objek wisata batu bersusun ini, merupakan salah satu destinasi wisata peninggalan alam yang bertempat di desa Solor Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso. Wisata Batu Soon terdiri pemandangan bebatuan yang tersusun dengan rapi. Selain Batu Soon, ada pula pemandangan air terjun yang melengkapi keindahan Batu Soon. Nama Batu Soon sendiri diambil dari lema Madura yang artinya batu tersusun. Dinamakan batu Soon karena susunan bebatuan yang rapi dan mirip pilar bangunan, seakan-akan dilihat dari jauh seperti pondasi bangunan pada zaman dahulu. Ada asumsi bahwa Batu Soon merupakan peninggalan zaman migalitikum sekalipun masih belum ada penelitian resmi mengenainya.

EKSOTIS: Bupati Amin Said Husni dengan latar Beto Soon Solor-Cermee. *(Foto/dokumen)*

Keindahan Batu Soon akan lebih tampak pula jika musim penghujang, rerumputan hijau mulai tumbuh menghiasi jalan-jalan menuju lokasi wisata Batu Soon. Saat ini untuk datang ke objek wisata Batu Soon tidaklah sulit, infrastruktur jalan dari Cermee menuju lokasi wisata mudah dilalui melewati desa Batu Ampar dan Kladi.

WISATA MEGASARI BONDOWOSO

WISATA Megasari termasuk salah satu wisata alam, karena wisata tersebut lebih menonjolkan keindahan alam yang menjadi daya tarik wisatawan untuk menikmati keindahan panoramanya. Objek wisata Megasari adalah puncak pegunungan yang berada di kecamatan Ijen dan menawarkan pemandangan yang sangat indah dengan hamparan bukit-bukit yang memesona. Apalagi pada musim penghujan, pengunjung akan disuguhkan dengan momen turunnya kabut, yang menghadirkan fantasi seakan-akan pengunjung berada di atas awan.

Keindahan puncak Megasari menarik perhatian pegiat olahraga paralayang (paragliding) untuk melakukan

atraksi sekaligus menikmati keindahan alam. Bahkan pada tahun 2016, puncak Megasari terpilih sebagai tempat pembukaan kompetisi paralayang bertajuk *Trip of Indonesia* (Troi) seri IV. Disamping atlet olahraga paralayang, beberapa komunitas lain juga tertarik menjelajahi Megasari. Beberapa klub motor pun juga berdatangan untuk menjajal dan menaklukkan ketinggian puncak Megasari yang berada di ketinggian 1.698. Tidak hanya pengunjung lokal yang berdatangan, tetapi juga pengunjung mancanegara yang tertarik menikmati indahnya puncak Megasari, sambil mencoba olahraga ekstrim dengan terbang dan menikmati alam dari atas.

AIR TERJUN BELAWAN

AIR terjun Belawan termasuk salah satu wisata alam yang dimiliki Kabupaten Bondowoso yang terletak di desa Kalianyar Kecamatan Sempol, kurang lebih 52 km dari pusat kota Bondowoso. Air terjun Belawan adalah hilir dari Kali Pahit, rembesan Kawah Ijen yang penuh dengan belerang serta dikelilingi oleh tumbuhan macadamia.

Air terjun ini mengalir melalui terowongan yang ada di bawah tanah dan kemudian muncul kembali di daerah Asembagus Kabupaten Situbondo. Ketinggian air terjun Belawan mencapai 30 meter dan berwarna kuning yang sesungguhnya adalah kandungan belerang.

Untuk mencapai air terjun Belawan, pengunjung bisa menggunakan angkutan desa berupa jasa ojek. Setelah sampai di lokasi wisata, pengunjung melanjutkan dengan jalan kaki melewati jalan naik-turun di antara tebing. Sungguh perjalanan menantang bagi wisatawan yang berkunjung ke wisata air terjun Belawan, karena disamping kontur yang naik-turun, juga jalan pun sangat licin.

Tidak jauh dari wisata air terjun Belawan di desa Kalianyar, terdapat pula wisata alam pemandian air hangat dan wisata alami pemandian Damar Wulan yang kemudian dikenal dengan wisata Damar Wulan. Untuk menghilangkan rasa penat, pengunjung perlu mengagendakan menikmati pemandian air hangat dan pemandian Damar Wulan.

EKSOTIS; Wisata air terjun Belawan-Ijen Kabupaten Bondowoso. *(Foto/dokumen)*

AIR TERJUN TANCAK KEMBAR

AIR terjun Tancak Kembar bagian dari destinasi wisata alam yang dimiliki Bondowoso dengan ketinggian tebing mencapai 77 meter. Wisata ini sudah ada sejak dahulu kala, konon dalam keyakinan masyarakat bahwa Tancak Kembar dilatarbelakangi oleh kisah Dewi Rengganis, seorang putri dari kerajaan Majapahit yang melarikan diri dari kerajaan. Menurut keyakinan masyarakat setempat siapa pun yang mandi di air terjun itu akan terlihat awet muda.

Lokasi wisata air terjun Tancak Kembar berada di desa Andungsari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso; dan untuk sampai di lokasi wisata memang dibutuhkan usaha ekstra, karena akses jalan sempit dan suasana jalanan berada di area persawahan dan hutan yang sangat sepi dari pengendara.

Meskipun akses jalan kurang mendukung dan medan yang cukup menantang, antusiasme wisatawan tak berkurang. Bahkan dengan keindahan panorama air yang menakjubkan, air terjun Tancak Kembar tidak pernah sepi dari pengunjung terutama saat hari libur. Pemanfaatan air terjun Tancak Kembar tidak hanya sebagai tempat rekreasi saja, tetapi juga sebagai sarana irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan kebutuhan sehari-hari penduduk setempat.

PEMANDANAGAN ARAK-ARAK

OBJEK wisata pemandangan Arak-arak merupakan sebuah bukit yang sangat indah dengan ketinggian kurang lebih 345 meter di atas permukaan laut (mdpl), terletak di jalur antara Bondowoso dan Situbondo, tepatnya di desa Sumber Canting Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso. Objek wisata pemandangan Arak-arak menjadi objek wisata alternatif yang

sering dikunjungi bagi wisatawan lokal maupun luar kota. Sejak pemerintah Bondowoso membangun berbagai fasilitas di lokasi wisata, pengunjung mengalami peningkatan luar biasa.

Di sana para pengunjung bisa menikmati keindahan panorama alam dari ketinggian dan dapat berfoto dengan latar gunung dan tebing. Tak sedikit para pengendara roda dua atau empat memlih untuk beristirahat sejenak di bukit ini sembari menikmati pemandangan terasering lahan pertanian.

Selain itu, jika pengunjung berjalan lagi ke sisi timur, pengunjung akan menjumpai air terjun kecil bersusun yang memiliki keunikan tersendiri. Untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para pengunjung, pemerintah menyediakan beberapa fasilitas, yaitu area parkir kendaraan roda dua dan empat, *rest area* untuk melepas rasa lelah, tempat ibadah untuk melaksanakan kewajiban umat Islam, dan warung yang menyediakan aneka makanan dan minuman khas Bondowoso.

GUNUNG RAUNG

GUNUNG Raung termasuk dalam deretan pegunungan Ijen tepatnya di Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso. Gunung Raung memiliki pemandangan yang menarik serta hamparan flora dan berbagai jenis satwa. Wisata ini sangat menarik dan menantang, khususnya bagi wisatawan yang menggemari petualangan mendaki gunung.

Gunung ini terletak pada ketinggian 3.332 m bertipe stratovolcano dengan titik kordinat antara 8°07'30"S 114°02'30"E/8.125°S 114.10167°E. Hutan yang terdapat di Raung meliputi kawasan hutan dipterokarp bukit, hutan dipterokarp atas, hutan montane, dan hutan ericaceous atau hutan gunung.

Gunung ini juga merupakan gunung kawah terbesar ke dua di Indonesia setelah gunung Tambora, yang memiliki diameter sekitar 2 km. Para pengunjung dapat memulai pendakian gunung Raung dari pos I (Pesanggerahan) yang dilengkapi dengan sejumlah pemandu wisata yang siap melayani pengunjung.

PATIRANA PUNCAK

WISATA Patirana Puncak atau orang mengenalnya dengan sebutan P28 merupakan salah satu wisata alam yang menjadi tujuan wisata baru bagi para pengunjung dari berbagai daerah pada setiap libur akhir pekan. Wisata ini terletak di dusun Patirana desa Wonosari Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso dengan ketinggian 1674 mdpl.

Wisata Patirana Puncak layak dimasukkan ke dalam daftar kunjungan para wisatawan. Kondisinya masih cukup alami. Para pengunjung disamping bisa melihat pemandangan alam di lereng gunung Argopuro, juga akan tertantang untuk merasakan sensasi pendakian.

Pemandangan indah yang terlihat dari puncak, menarik perhatian pengunjung untuk sekedar berfoto dan makan-makan bersama keluarga. Akan lebih indah lagi jika pengunjung berada di bukit P28 pada waktu pagi dan sore, karena bisa menyaksikan pesona matahari terbit *(sunrise)*, maupun matahari terbenam *(sunset)*. Hal menarik lainnya di P28 adalah kabut tipis yang menjelma bagaikan hamparan samudera di atas awan yang dilatari panorama langit berwarna keemasan.

Disamping pemandangan puncak yang menjadi tujuan wisata, desa Wonosari Grujugan juga memiliki Tancak Patirana, sebuah air terjun yang tidak kalah menarik dengan Patirana Puncak. Pengunjung yang mendatangi Patirana Puncak, bisa melanjutkan perjalanan menuju wisata Tancak Patirana dengan berjalan kaki yang jaraknya tidak terlalu jauh dari Patirana Puncak.

PUNCAK SCORPIO

BONDOWOSO yang merupakan dataran tinggi telah banyak memberikan manfaat besar, salah satunya adalah melalui wisata alam perbukitan. Puncak Scorpio misalnya, wisata alam Bondowoso berupa bukit yang bentuknya mirip ujung kalajengking dengan ketinggian mencapai 800 mpdl. Objek wisata ini terletak di desa Sumber Canting Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso, menawarkan keindahan pemandangan yang bisa diekspos dari keting-

gian. Hamparan persawahan warga, permukiman penduduk, tumpukan gunung menjulang, hingga garis pantai Probolinggo dan pasir putih tampak terlihat jelas mewarnai keindahan alam. Keindahan akan bertambah, jika terlihat bersamaan dengan momen matahari terbit atau terbenam.

Destinasi wisata puncak Scorpio tergolong wisata baru yang dibuka pada bulan Mei tahun 2017. Wisata ini dikelola pemerintah desa melalui badan usaha milik desa (Bumdes) dengan menggunakan dana desa. Sekalipun puncak Scorpio cukup sederhana dari segi fasilitas dan sarana-prasarana, pemerintah desa terus berupaya melengkapi kebutuhan-kebutuhan objek wisata ini melalui kerja sama dengan pihak-pihak terkait. Sementara untuk akses jalan menuju puncak Scorpio, pemerintah desa melalui programnya sudah meningkatkan aksesibilitas, meskipun masih perlu ditingkatkan.

BUKIT MAHADEWA

BUKIT Mahadewa adalah sebuah bukit perkebunan yang indah, terletak di desa Kupang Kecamatan Curahdemi Kabupaten Bondowoso, dengan ketinggian mencapai 1000 mdpl. Dalam catatan sejarah, bukit Mahadewa berkaitan dengan sejarah kerajaan-kerajaan di Indonesia pada waktu itu.

Dengan melewati bukit itu, para raja dan prajuritnya sering melepaskan lelah dan bermalam di sana, bahkan para raja beserta prajuritnya membuat sebuah goa sebagai tempat persembunyian ketika dikejar Belanda. Hingga saat ini, ada kepercayaan di tengah masyarakat, bahwa bukit Mahadewa memiliki sejarah pra- kemerdekaan Indonesia. Patutlah kiranya jika kemudian pemerintah daerah Bondowoso merawat bukit itu sebagai destinasi wisata alam, yang tentunya akan membuka lapangan pekerjaan terhadap masyarakat sekitar melalui aktivitas ekonomi kreatif.

Bukit Mahadewa memiliki pesona yang sangat indah dan menarik untuk diketahui, karena disamping memiliki nilai sejarah, bukit Mahadewa juga memberikan berbagai keindahan. Dari arah timur, pengunjung dapat melihat kota Bondowoso; terlihat bagaikan bin-

KAYA BUDAYA; Singo Ulung salah satu warisan kebudayaan masyarakat Bondowoso. *(Foto/dokumen)*

tang ketika malam hari. Berbeda lagi ketika pengunjung melihat ke arah selatan, akan tampak gunung Raung. Begitu juga akan berbeda lagi ketika melihat ke arah barat dan utara, maka akan terlihat jejeran tebing dan pohon pinus yang berbaris rapi.

Untuk kenyamanan dan keamanan *(safety)* pengunjung, pemerintah melengkapi berbagai fasilitas wisata, seperti area parkir roda dua dan empat, *rest area* sekitar kawasan bukit Mahadewa, tempat ibadah, dan rumah makan. Sementara akses jalan menuju wisata Mahadewa tidak terlalu sulit, yang terpenting bagi pengunjung adalah mengetahui lokasinya.

Destinasi Wisata Budaya (cultural tourism)

DISAMPING objek wisata peninggalan alam, Bondowoso juga memiliki objek wisata peninggalan budaya. Objek wisata peninggalan budaya ini dirancang guna melestarikan kebudayaan daerah sebagai aset kekayaan bangsa yang harus dijaga. Pemerintah Bondowoso memiliki tanggungjawab untuk melestarikan dan memperkenalkannya ke khalayak. Pengelolaan destinasi wisata budaya ini, baik berkenaan dengan pembangunan sarpras, infrastruktur, dan pemasaran, dialokasikan 36% pemberdayaan. Adapun objek wisata peninggalan budaya Bondowoso adalah Desa wisata Lombok Kulon, Makam Ki Ronggo, padepokan seni Gema Buana, Batik Sumbersari Maesan, situs Pekauman, situs Banyuputih, tarian Singo Ulung, Gerbong Maut, Alun-alun Bondowoso, Masjid Agung at-Taqwa, Sampean Baru, Ojung, Pojien (tari bambu), dan Museum kereta api. Tarian Singo Ulung menjadi salah satu wisata unggulan yang sering ditampilkan di pelbagai kegiatan kedinasan.

SINGO ULUNG

DALAM catatan sejarah, nama Singo Ulung diambil dari nama seseorang yaitu kiai Singo Wulu, seorang tokoh masyarakat yang membabat desa Blimbing, yang kemudian nama tersebut dijadikan nama tarian. Singo Ulung merupakan kesenian tradisional kebanggaan masyarakat Bondowoso.

Kesenian ini menggunakan pakaian singa dan para penari menari-nari layaknya singa. Kesenian tradisional Singo Ulung kerapkali ditampilkan dalam berbagai kegiatan, bahkan dalam kancah nasional, Singo Ulung menjadi perhatian dan memukau para hadirin.

Pertunjukan tarian Singo Ulung menceritakan tentang pertarungan antara kiai Singo Wulu dengan Jasiman, seorang penguasa hutan. Dalam pertarungan itu, kiai Singo Wulu berubah menjadi macan putih dan mampu mengalahkan Jasiman, sehingga dia mengakui ketangguhan kiai Singo Wulu dan masuk Islam.

Tarian Singo Ulung biasanya menjadi pengisi wajib pada acara Hari Jadi Bondowoso (Harjabo) setiap tanggal 16 Agustus. Tokoh-tokoh dalam tarian ini adalah Singo Ulung yang menggambarkan wujud kiai Singo Wulu yang menjadi macan putih, dan Panji yang mewakili sosok Jasiman penguasa hutan. Dalam adegan, dua orang berkelahi menggunakan rotan, menggambarkan pertarungan kiai Singo Wulu dengan Jasiman, kemudian tampil penari perempuan yang menggambarkan istri kiai Singo Wulu, serta seorang kiai yang menggambarkan kiai Singo Wulu sebelum menjadi macan putih.

BUDAYA OJHUNG

INDONESIA negara multikultural yang terdiri dari berbagai suku, ras, dan agama dengan atribut kebudayan beragam. Bondowoso adalah salah satu bagian dari keragaman Indonesia, yang juga memiliki kebudayaan tersendiri. Di antara kebudayan masyarakat Bondowoso yang hingga saat ini masih sering ditampilkan dalam berbagai kegiatan adalah *Ojhung*. Tradisi *Ojhung* adalah kesenian masyarakat, di mana dua orang berhadapan sambil memegang rotan untuk saling memukul secara bergantian. Sebagai produk kebudayaan, *Ojhung* mewakili keyakinan sekaligus spirit masyarakat, bahwa setiap seorang diharapkan mampu menghadapi rintangan yang silih berganti menghadang. Karena itu usaha dan kesabaran harus menyertai setiap individu dalam mengarungi kehidupan.

Tradisi *Ojhung* adalah seni tradisional yang mewakili sisi religius dan magis, dengan mempertemukan keahlian bertarung dan laku *kanuragan* dari dua orang yang beradu fisik dengan menggunakan senjata rotan. Awalnya, tradisi ini diadakan dengan tujuan untuk meminta turun hujan agar terhindar dari kekeringan dan paceklik, namun saat ini tradisi *Ojhung* sudah menjadi tradisi yang bernilai rekreatif bagi masyarakat.

Tradisi *Ojhung* di Bondowoso bahkan juga diawali dengan *tawassulan*. Artinya, sebelum permainan *Ojhung* dimulai, masyarakat bersama-sama melakukan istigasah, dilanjutkan dengan ceramah agama, tahlil dan doa; dan usai kegiatan ritual itu, permainan *Ojhung* baru dimulai di depan khalayak ramai. Biasanya tradisi *Ojhung* akan dilaksanakan ketika ada hajatan desa atau selamatan tokoh fenomenal di desa setempat.

KEBUDAYAAN POJIAN

POJIAN atau istilah lain disebut *Pepujen* salah satu bagian dari kekayaan budaya yang dimiliki Bondowoso. Masyarakat Bondowoso, khususnya desa Sukorejo Kecamatan Sumber Wringin jauh sebelumnya sudah mengenal tradisi itu, dan dalam setiap tahunnya, *Pojian* selalu dilakukan oleh masyarakat Sukorejo untuk meminta hujan.

Bencana kekeringan yang melanda Bondowoso mendorong masyarakat saat itu untuk melakukan *Pojian* agar diturunkan hujan. Acara *Pojian* biasa dilaksnakan di tempat-tempat umum dan dihadiri ratusan hingga ribuan orang. Selain sebagai sarana meminta hujan, *Pojian* juga dilakukan ketika menyambut datangnya bulan Ramadan.

Ritual *Pojian* dilaksanakan melalui adegan ekstrem di mana seseorang memanjat sebatang bambu dengan ukuran 8 meter, kemudian membakar diri. Dengan iringan gamelan dan tabuhan gendang, beberapa orang mencoba menaiki bambu tanpa rasa takut dan sesampainya di atas, pemanjat menari-nari untuk menarik perhatian penonton.

TIRTA; Wisata artifisial Tirta Agung yang terletak di Sukosari Kidul-Sumberwringin. *(Foto/dokumen)*

Destinasi Wisata Tirta

TIDAK jauh berbeda dengan objek wisata peninggalan alam dan budaya, objek wisata buatan di sekitar air juga dikembangkan oleh pemerintah Bondowoso. Pengembangan objek wisata buatan menjadi alternatif bagi pengunjung. Jika mereka merasa bosan dengan objek wisata peninggalan alam dan budaya, pengunjung bisa mendatangi objek wisata buatan ini.

Sebenarnya objek wisata ini tergolong objek wisata tidak alami yang dikemas dalam berbagai desain agar pengunjung dapat menikmatinya. Mereka tidak hanya sekedar rekreasi, tetapi juga bisa menikmati fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan di lokasi wisata.

Pengembangan objek wisata buatan mencapai porsi 28% pembangunan pariwisata daerah. Adapun objek wisata buatan ini di Bondowoso meliputi Desa wisata Almur, Desa wisata Glingseran, pemandian Tasnan, pemandian Kharisma, Bosamba Rafting , pemandian air hangat Belawan, pemandian Kelapa Gading, River Tubing Tlogosari, dan *event* Kabupaten Bondowoso. Di antara beberapa destinasi wisata buatan tersebut, untuk saat ini hanya dua wisata yang berada di bawah pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) , yaitu Desa Wisata Alassumur dan Desa wisata Glingseran.

DESA WISATA ALASSUMUR

MENIKMATI keindahan alam sambil memancing merupakan momen berharga bagi seseorang, apalagi bersama keluarga atau teman. Saat ini, pemerintah Bondowoso membuat wisata alam yang tidak hanya sekedar tempat rekreasi tetapi juga sebagai tempat melangsungkan hobi memancing, yaitu rawa indah Alassumur atau Almor yang berada di desa Alassumur Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso. Sebenarnya wisata Almor berawal dari fenomena alam dengan munculnya air yang semakin lama semakin luas dan membentuk rawa, sehingga hal ini menarik perhatian para pengunjung untuk mengunjunginya. Oleh karena itu, pemerintah daerah berinisiatif mengembangkan rawah indah ini sebagai salah satu destinasi wisata yang dapat menjadi sumber pemasukan bagi desa dan masyarakat sekitar.

Adapun aktivitas yang dapat dilakukan pengunjung saat berlibur ke desa wisata Alassumur diantaranya memancing, menikmati sensasi wahana luncur gantung (*flying fox)*, wisata kuliner, dan berburu *(hunting)* foto. Untuk dapat berlibur ke lokasi desa rawa indah Alassumur tidaklah mahal, untuk memancing cukup dengan harga 15.000/kg, sedangkan untuk luncur gantung cukup membayar dengan tarif Rp. 5000. Pada tahun 2018 kunjungan wisata rawa indah Alassumur menempati urutan kedua setelah Kawah Ijen. Selama setahu destinasi wisata yang dikelola oleh pemerintah desa ini bisa membukukan pengunjung sebanyak 53.385 orang. Kepala Dispar-

pora, Harry Patriantono mengatakan, pihaknya selama ini memang mendorong geliat wisata yang ada di Bondowoso. Dorongan itu sesuai dengan apa yang dicita-citakan bupati Amin Said Husni, yakni memberikan *multiple effect* bagi masyarakat.

DESA WISATA GLINGSERAN

DESA Glingseran Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso memiliki destinasi wisata berupa air terjun Sulaiman dan mata air yang diyakini sebagai peninggalan Dewi Rengganis putri raja Majapahit yang tinggal di lereng Gunung Argopuro. Kedua wisata tersebut merupakan modal untuk mengembangkan gagasan desa wisata. Dalam pengembangan destinasi wisata itu, pemerintah desa Glingseran melibatkan sejumlah pihak seperti pemerintah Kabupaten Bondowoso dan Universitas Jember. Pemerintah desa Glingseran juga mengalokasikan dana Rp. 200 juta melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) untuk mengembangkan dan mengelola objek wisata tersebut.

Wisata Glingseran Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso merupakan binaan Unej yang bekerjasama dengan pemerintah daerah Bondowoso. Masyarakat perlu mendukung pengembangan desa wisata Rengganis hasil pemetaan mahasiswa Unej ini, karena merupakan salah satu wujud dari program *"One Village One Product"* yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

Festival Desa Nusantara

Festival Desa Nusantara 2018

BONDOWOSO adalah salah satu kabupaten di Jawa Timur yang kini mulai dilirik banyak mata, dari tingkat nasional sampai internasional. Kabupaten pemilik monumen Gerbong Maut ini mulai tenar dalam kancah dunia setelah berhasil mengeksplorasi berbagai potensinya di banyak bidang, yaitu pertanian, perkebunan, pariwisata, dan produk unggulan daerah. Dengan berbagai keberhasilan yang telah diraih dan semakin tingginya animo masyarakat dunia untuk mengenal Bondowoso, kabupaten ini menjadi layak untuk disebut The Highland Paradise.

Kemilau cahaya prestasi tersebut dapat terpancar tentu bukan buah keringat pemerintah daerah semata, melainkan juga berkat partisipasi seluruh masyarakat Bondowoso. Dengan kata lain, berbagai prestasi yang telah diraih merupakan keberhasilan bersama, pemerintah daerah dan masyarakat. Tanpa partisipasi aktif atau kontribusi masyarakat di setiap desa di wilayah Kabupaten Bondowoso, niscaya segala program pembangunan tidak akan menuai keberhasilan.

Kontribusi mayarakat setempat dalam roda pembangunan terlihat pada komitmennya mengembangkan potensi

desanya serta mendukung program-program pembangunan daerah. Dalam hal ini, lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjadi asa perubahan dan kemajuan bagi masyarakat desa. Melalui tangan pemerintah desa, UU Desa memeberikan ruang sekaligus uang kepada masyarakat desa untuk menumbuh-kembangkan segala potensi yang dimilikinya.

Walhasil, berkat implementasi Undang-Undang Desa, sudah ribuan inovasi yang lahir dari desa, infrastruktur desa juga meningkat, produk olahan khas desa semakin banyak, UMKM dan badan usaha desa juga terus menggeliat, gairah masyarakat desa tumbuh dan berkembang dengan baik. Bagi pemerintah Kabupaten Bondowoso, *progress* kemajuan desa perlu terus ditingkatkan sehingga nantinya akan mengkristal menjadi kemajuan daerah. Kemajuan daerah ini nantinya pun akan mengkristal dengan kemajuan daearah-daearah lain menjadi kemajuan Jawa Timur, begitu seterusnya hingga memuncak menjadi kemajuan nasional.

Inovasi Desa

BERANGKAT geliat kemajuan desa yang kian meningkat, Pemerintah Kabupaten Bondowoso menggelar hajatan besar bertajuk Festival Desa Nusantara 2018 dengan tema "Berbagi Pengalaman Memajukan Desa" pada 16 sampai 18 Juli 2018. Melalui Unit Kerja Dinas Pemnberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Pemerintah Kabupaten Bondowoso menggelar hajatan akabar tersebut dalam rangka memperkokoh eksistensi desa sebagai akar kekuatan kekuatan nasional. Even akbar yang dibuka dihadiri dan dibuuka secara resmi oleh Menteri Desa Eko Putro Sandjojo tersebut diikuti oleh banyak peserta yang merupakan perwakilan desa seluruh Indonesia, perusahaan-perusahaan ternama, dan berbagai partisipan lainnya.

Sekretaris DPMD Kabupaten Bondowoso Muhammad Asnawi Sabil menjelaskan bahwa even besar tersebut bertujuan meningkatkan jangkauan publikasi Kabupaten Bondowoso di bidang prestasi desa dan turisme, meningkatkan atensi pemerintahan di level kabupaten, provinsi, dan kementerian untuk semakin kuat mengawal capaian desa, meningkatkan wawasan serta jejaring desa dalam kolaborasi nasional dan internasional, memasarkan berbagai ragam unggulan, potensi, dan kebudayaan desa, serta menyediakan forum berbagi dan belajar bersama secara terfokus tentang praktik yang baik dalam memajukan desa. Oleh karena itu hajatan tersebut digelar dengan rangkaian atau paket kegiatan yang meliputi ekspo atau pameran desa, rembuk desa, belajar bersama dan berbagai pengalaman dalam memajukan desa, dan pemberian penghargaan kepada desa terbaik. Dengan rangkaian kegiatan tersebut, desa memamerkan produk, potensi unggulan, kebudayaan lokal, serta ragam kekayaan desa lainnya. Dengan demikian diharapkan, kebudayaan dan segala potensi unggulan desa yang merupakan kekayaan Kabupaten Bondowoso daopat dikenal dan dipasarkan di tingkat nasional dan internasional.

Kegiatan Fesitival Desa Nusantara 2018 lantas mengisyaratkan betapa besarnya manfaat Dana Desa bagi

pengembangan dan peningkatan potensi desa. Fasilitas atau anggran yang dibawa UU Desa tersebut terbukti telah merangsang pertumbuhan potensi dan ekonomi masyarakat desa. Sebagaimana produk-produk uggulan desa yang dipamerkan dalam Festival Desa Nusantara tersebut, banyak inovasi desa berupa produk unggulan lokal berupa kerajinan, produk olahan berbahan dasar potensi lokal, perkembangan UMKM atau BUMDes, serta pengembangan potensi alam menjadi destinasi wisata baru yang menggairahkan berkat stimulan Dana Desa.

Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Bondowoso terus bergerak maju dan mendorong lahirnya inovasi-inovasi desa dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi desa yang nantinya akan bermuara pada peningkatan ekonomi daerah. Terkait hal ini pula, Muhammad Asnawi Sabil menjelaskan bahwa berbagai inovasi serta optimalisasi potensi lokal telah menurunkan angka kemiskinan di Kabupate Bondowoso sebesar 7,69 persen, dari 22,23 persen menjadi 14,54 persen. "Dengan inovasi dan optimalisasi potensi lokal itu, akselerasi semua desa di Kabupaten Bondowoso untuk menjadi desa mandiri akan segera dan mudah terwujud," tutur Sabil.

Degan demikian, inovasi desa merupakan kunci utama kesuksesan pembangunan desa. Dengan segala potensi lokal yang dimiliki di bidang sumber daya alam, ekonomi, sosial, dan budaya, apabila dikelola dengan baik, desa akan menjadi akar ekonomi daerah, bahkan nasional. Proyeksi besar inilah yang menjadi dasar sekaligus pandangan diselenggarakannya Festival Desa Nusantara 2018. Semoga hajatan akbar yang baru pertama kali ini dilaksanakan di Indonesia tersebut menjadi pemantik dan penggugah gairah desa untuk terus berinovasi. Tanpa inovasi dan kreasi, segala potensi hanya akan menggunung sebagai stagnasi.

BRK
Bondowoso
Republik Kopi

Optimalisasi
Pemerataan Akses Listrik

ADA banyak tantangan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam ikhtiar mewujudka kesejahteraan masyarakat. Salah satu tantangannya adalah keterbatasan dari sisi aksesibilitas disebabkan oleh letak geografis daerah yang tidak berada di jalur lalu lintas perekonomian utama. Kondisi yang demikian membuat kondisi Kabupaten Bondowoso agak sulit berkembang dibandingkan dengan Kabupaten sekitarnya. Salah satu upaya untuk mengejar ketertinggalan ini, Pemerintah Kabupaten Bondowoso menjalankan program pembangunan bidang ketenagalistrikan.

Pembangunan ketenagalistrikan adalah salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terhadap prasarana listrik. Setiap tahunnya, pemerintah Bondowoso bekerja keras untuk meningkatkan akses pasokan listrik ke 23 seluruh wilayah. Sebab, belum semua dusun di beberapa desa yang dapat menikmati pasokan listrik dari pemerintah. Karena itu, target untuk menjamin tersambungnya aliran listrik ke beberapa daerah tersebut terus dimaksimalkan.

Berdasarkan data, hingga dengan tahun 2017, masih terdapat 122 dusun yang belum berlistrik di Bondowoso, di mana sebagian di antaranya berada di daerah pegunungan yang sulit dijangkau jaringan listrik. Upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam memenuhi energi listrik bagi masyarakat daerah terpencil dan terisolir tersebut di antaranya dengan program pembangunan *Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)* maupun *Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMh)*. Sedang untuk daerah yang tersedia infrastruktur jalan dan masih bisa dilalui kendaraan roda empat, Pemerintah Kabupaten Bondowoso melaksanakan kegiatan pembangunan *Jaringan Listrik* dan pemberian *Bantuan Sambungan Rumah – Instalasi Rumah (SR-IR) Gratis*.

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya dilaksanakan untuk daerah terpencil dan terisolir yang rumah penduduknya saling berjauhan (terpencar) dengan kondisi infrastruktur jalan terbatas, yang diperkirakan dalam 5-10 tahun ke depan jaringan listrik tidak mungkin ada. PLTS diharapkan dapat menjadi alternatif untuk menggantikan

sulitnya instalasi listrik ke kawasan terpencil tersebut.

Sejak tahun 2001 hingga tahun 2018 ini, telah berdiri ratusan PLTS yang tersebar di beberapa daerah. Hampir setiap tahun pemerintah melalui kemitraan dengan pelbagai pihak membangun unit-unit PLTS sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebagai catatan, pada tahun 2016, berdiri 25 uni PLTS di dusun Burgu, Desa Solor Kecematan Cermee ke 25 kepala keluaraga. Kemudian pada tahun 2018, juga berdiri 18 unit PLTS di dusun Glundang yang mengaliri listrik ke 18 kepala keluarga.

Di samping PLTS, kebijakan lain adalah dengan memanfaatkan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohida (PLTMh). Pembangkit ini cocok diterapkan di daerah yang memiliki potensi air dengan debit kontinyu yang cukup. Namun kondisi Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro banyak yang tidak bisa digunakan lagi karena adanya kerusakan.

Secara kronologis, optimalisasi pembangunan Jaringan Listrik di Kabupaten Bondowoso dilaksanakan mulai dari tahun 2003 hingga tahun 2017. Bupati Amin Said Husni memberikan priotitas kepada upaya mengalirkan listri ke seluruh pelosok kabupaten. Target ini tidak mudah karena membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Karena itu, dalam durasi hampir 10 tahun Bupati Amin Said Husni memimpin, kebijakan instalasi listrik terus mendapatkan prioritas.

Dalam ikhtiar yang dilakukan, pembangunan ketenagalistrikan dilakukan dengan beragam cara dan pendekatan. Di samping berusaha secara mandiri mewujudkan target pasokan listrik yang menyebar ke pelbagai pelosok, pemerintah Kabupaten Bondowoso juga mengupayakan keterlibatan pemerintah provinsi Jawa Timur, terutama pasca keluarnya Undang-undang nomer 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pada bagian lampiran regulasi tersebut disebutkan, bahwa kewenangan pengelolaan energi dan Sumber Daya Mineral di bidang ketenagalistrikan menjadi kewenangan provinsi. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bondowoso sejak tahun 2017 tidak lagi melakukan pembangunan instalasi listrik, tetapi memfasilitasi program bantuan Sambungan Rumah Instalasi Rumah (SR-IR) bagi masyarakat kurang mampu.

Untuk program bantuan Sambungan Rumah Instalasi Rumah (SR-IR) ini telah ada kesepakatan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bondowoso dengan PT. PLN (Persero) dalam bentuk MoU Nomor: 180/16.430.4.2/2017 tentang Peningkatan Rasio Elektrifikasi di Kabupaten

Bondowoso, tanggal 7 September 2017 yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dalam penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik untuk masyarakat kurang mampu. Dalam kesepakatan ini tanggung jawab pemerintah Kabupaten Bondowoso adalah *pertama*, menanggung seluruh biaya penyambungan listrik dan instalasi rumah bagi masyarakat kurang mampu.

Kedua, membangun infrastruktur jalan menuju lokasi yang disepakati guna kelancaran pembangunan jaringan listrik. *Ketiga*, melakukan penyediaan lahan serta pemberian izin terkait penanaman tiang jaringan listrik dan pembebasan pohon sepanjang jalur pembangunan jaringan listrik.

Keempat, Bertanggung jawab terhadap segala biaya yang timbul apabila di kemudian hari jaringan listrik sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerjasama mengalami pergeseran lokasi dikarenakan ada proyek atau kegiatan Pemerintah Kabupaten Bondowoso meskipun jangka waktu perjanjian kerjasama telah berakhir. Sedangkan pihak PT. PLN (Persero) bertanggung jawab terhadap pembangunan fasilitas jaringan listrik ke lokasi bantuan yang telah disepakati.

Melalui program-program pembangunan bidang ketenagalistrikan ini diharapkan seluruh rakyat Bondowoso bisa merasakan listrik sehingga tingkat kesejahteraan seluruh rakyat bisa meningkat. Untuk mengetahui jumlah masyarakat yang sudah menikmati listrik bisa dilihat dari Rasio Elektrifikasi. Rasio Elektrifikasi adalah perbandingan jumlah KK yang telah menikmati listrik (PLN dan non PLN) dibagi dengan jumlah KK total. Perkembangan Rasio elektrifikasi Kabupaten Bondowoso ditunjukkan dalam tabel.

Berdasarkan table tersebut, kenaikan Rasio Elektrifikasi di Kabupaten Bondowoso rata-rata 3 % hingga terakhir bulan Oktober 2017 mencapai 76 %. Kenaikan Rasio Elektrifikasi cukup tinggi terjadi pada akhir tahun 2016 dan awal tahun 2017. Meningkatkan rasio elektrifikasi ini merupakan buah dari kerja keras pemerintah daerah.

No.	Tahun	Rasio Elektrifikasi	Kenaikan
1	Triwulan IV 2012	52,76 %	
2	Desember 2013	52,75 %	0,01 %
3	Triwulan IV 2014	55,24 %	2,49 %
4	Maret 2015	55,24 %	0 %
5	Triwulan IV 2016	65 %	9,76 %
6	Juni 2017	71,67 %	6,67 %
7	Juli 2017	74,06 %	2,39 %
8	Oktober 2017	76 %	1,94 %
	Rata-rat RE	**62,84 %**	**3 %**

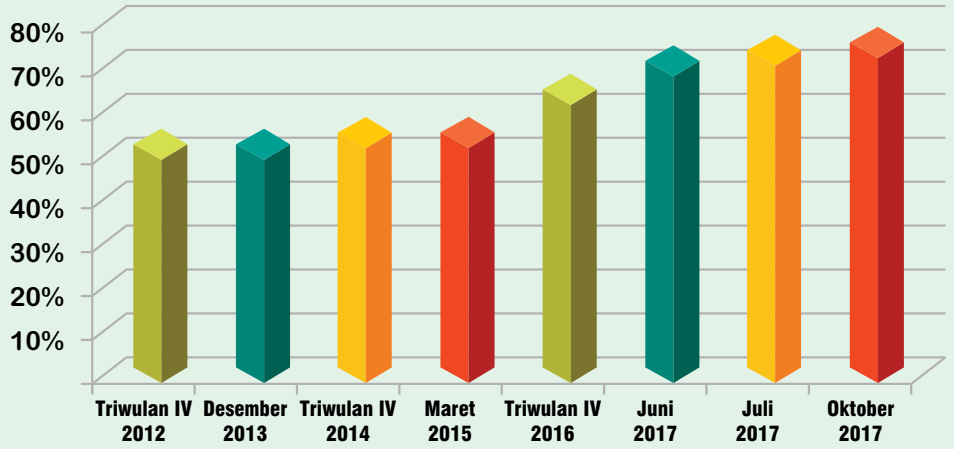

Merawat
Produk Unggulan Daerah

Batik Bondowoso

BATIK merupakan kerajinan khas masyarakat Indonesia yang ditekuni sejak nenek moyang secara turun temurun dari satu generasi ke generasi. Batik menjadi salah satu industri tekstil dan warisan budaya-benda peninggalan budaya dunia yang dikukuhkan oleh UNESCO pada tanggal 2 Oktober 2009 di Abu Dhabi. Ini tentu menjadi kebanggaan sekaligus tantangan bagi bangsa Indonesia, karena seluruh pemangku kepentingan batik harus melestarikan, memelihara dan melindungi batik sebagai warisan budaya nusantara serta kehormatan bangsa Indonesia.

Kerajinan batik menyebar di hampir semua wilayah kota/kabupaten di Indonesia. Perbedaan batik antara satu wilayah dengan wilayah lain umumnya terletak pada motif dan coraknya. Batik Solo, Batik Pekalongan, batik Bugis, Makasar, dan lain-lain, merupakan sebutan bagi nama batik yang merujuk pada kota di mana batik itu diproduksi. Masing-masing kota memproduksi batik dengan motif dan corak khusus yang membedakan ciri khasnya sendiri-sendiri, termasuk batik bondowoso.

Batik Bondowoso memiliki motif batik yang khas dengan corak atau motif yang berbeda dengan batik yang ada di pasaran. Batik Bondowoso banyak terinspirasi dari bentuk tanaman daun singkong dan daun tembakau yang membuat batik ini terlihat sangat unik. Motif tembakau dan daun singkong ini diambil dari filosofi mata pencaharian orang Bondowoso yang banyak bertani tembakau dan penghasil tape yang bahan dasarnya singkong.

Pada awalnya Bondowoso hanya memiliki 1 (satu) pelaku industri batik yaitu Batik Sumbersari yang berlokasi di Kecamatan Maesan. Seiring dengan adanya SMKN Tamanan yang mempunyai kurikulum Keterampilan Membatik, alumni dari SMK tersebut menjadi wirausaha baru di bidang batik. Dan pada titik sekarang ini, Bondowoso telah memiliki 20 (dua puluh) pelaku in-

dustri batik yang tersebar di beberapa kecamatan, diantaranya di Kecamatan Tamanan, Cermee, Taman Krocok, Bondowoso, Klabang, Tapen, Wringin, Jambesari DS. dan Sumberwringin.

Saat ini dunia sedang berada pada era ekonomi digital atau revolusi industri ke 4 atau industri 4.0. Era ini ditandai dengan penggunaan mesin-mesin otomasi yang terintegrasi dengan jaringan internet *(internet of things)*, adopsi teknologi dan inovasi. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mengimplementasikan industri 4.0 guna membangun industri yang berdaya saing global. Komitmen ini ditandai dengan peluncuran "making indonesia 4.0" oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 4 April 2018 dengan harapan Indonesia dapat mencapai top ten (10 besar) ekonomi global dunia pada tahun 2030.

Globalisasi perdagangan selain menimbulkan persaingan pasar yang semakin ketat, juga memunculkan peluang pasar baru bagi produk-produk etnik yang berkualitas. Oleh karena itu, pelaku usaha harus dapat meningkatkan daya saingnya supaya produknya tetap disukai konsumen dan berkembang dengan baik.

Industri batik merupakan salah satu industri yang mempunyai prospek yang cerah dalam memenuhi peluang pasar tersebut. Pasar batik Bondowoso tidak hanya pada pasar lokal, namun sudah merambah ke luar negeri. Untuk pasar lokal, batik Bondowoso telah dipasarkan di wilayah Jember, Banyuwangi, Surabaya, dan sekitarnya. Adanya era digital membuat peluang pasar semakin terbuka lebar. Pemasaran dilakukan via internet, sehingga konsumen di Jakarta, Papua, Sumatera, Sulawesi dan Balikpapan dapat menjadi pangsa pasar baru bagi batik Bondowoso. Sedangkan, untuk pasar luar negeri, Batik Bondowoso telah mendapat pemesanan dari negera Filipina, Singapura, Malaysia dan negara-negara ASEAN lainnya. Bahkan saat ini pasar batik Bondowoso sudah merambah negara-negara Eropa, sep-

erti Belanda, Prancis dan lain-lain, serta Brazil dan Amerika. Yang terbaru adalah digunakannya salah satu desain batik Bondowoso oleh Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi sebagai batik Asean Games.

Strategi yang perlu dibangun untuk bersaing di pasar global antara lain dengan memberikan kualitas produk terbaik yang mampu diproduksi melalui standarisasi, pengembangan desain dan produk inovasi. Desain dan produk yang berkualitas akan membentuk harga yang sesuai dan dapat merebut pasar perdagangan. Upaya untuk menghasilkan produk yang berkualitas, erat hubungannya dengan upaya memberikan kepuasan kepada pembeli mengenai produk yang dijualnya. Selain kualitas produk, ketepatan waktu pengerjaan menjadi salah satu point penting yang harus ditepati oleh para IKM untuk mencapai kepuasan pelanggan. Ketika kepuasan pelanggan meningkat, maka akan semakin tinggi pula minat pelanggan untuk membeli kembali.

Beberapa program pembinaan telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso, diantaranya adalah mengikutsertakan pelaku IKM Batik pada kegiatan magang pewarnaan sintetis di Balai Besar Kerajinan dan Batik, Pelatihan membatik menggunakan pewarna alam, membuat pewarna alam dari sumber daya alam Bondowoso, pelatihan pembuatan canting cap, fasilitasi ISO dan SNI batik, bantuan alat proses produksi batik, mengikutsertakan dalam even-even pameran, baik lokal maupun luar Bondowoso.

Saat ini perajin batik Bondowoso telah menjadi bagian dari Asosiasi Perajin Batik Jawa Timur (APBJ) sebagai sarana komunikasi dan berbagi informasi terkait pengembangan batik. Selain motif, proses pembuatan juga mengalami perkembangan. Dari awal menggunakan canting, sekarang menggunakan cap dan kombinasi. Pun produksi batik yang dihasilkan, tidak hanya berupa kain batik dengan aneka corak dan motif, melainkan sudah terdiferensiasi menjadi berbagai produk corak batik, seperti pakaian, mukena, sajadah, tas, sandal, dan produk rumah tangga lainnya. Diharapkan ke depan, produksi batik Bondowoso akan lebih maju dengan kualitas yang lebih baik sehingga masyarakat Bondowoso bangga dan pada akhirnya batik Bondowoso akan menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Kuningan Khas Bondowoso

BAGI para traveler yang melintasi kawasan Desa Cindogo, Kecamatan Tapen, akan menjumpai produk kerajinan kuningan yang berjejer di sepanjang jalan. Kawasan tersebut memang merupakan sentra kerajinan kuningan yang menjadi salah satu produk khas Bondowoso. Selain di Desa Cindogo, pusat kerajinan kuningan juga terdapat di Desa Jurangsapi, Kecamatan Tapen.

Kerajinan kuningan tidak dapat dilepaskan dari Kabupaten Bondowoso. Selain merupakan salah satu ikon kerajinan yang dimiliki Bondowoso, kerajinan kuningan juga memiliki potensi untuk dapat dikembangkan pada masa mendatang. Industri kerajinan kuningan di Desa Cindogo dan Desa Jurangsapi merupakan industri yang telah dilakukan secara turun temurun sehingga telah menjadi budaya bagi masyarakat sekitar. Produk kuningan Kabupaten Bondowoso telah mendapatkan beberapa kali penghargaan dan apresiasi dari pemerintah berupa upakarti dan kalpataru.

Secara historis, perkembangan kerajinan kuningan terbagi dalam empat dekade yaitu: dekade tahun 1948-tahun 1980, dekade tahun 1981-tahun 1990, dekade tahun 1991–tahun 2000 dan dekade tahun 2000–sekarang. Sejarah kuningan di Kabupaten Bondowoso yang berawal pada tahun 1948, diawali dengan pembuatan kelontong sapi. Pembuatan kelontong sapi sangat dimungkinkan karena kebutuhan saat itu sedemikian besar. Proses yang dilakukan melalui tahapan yang sangat sederhana serta tidak memerlukan peralatan modern.

Pada pertengahan dekade 1980 sampai dengan 1990 terjadi pergeseran hasil produk yang dipasarkan yaitu membuat barang-barang kebutuhan rumah tangga antara lain cetakan kue. Produk cetakan kue terbuat dari IK.

Kuningan di Kabupaten Bondowoso memiliki keunggulan tersendiri yaitu bahan yang dihasilkan memiliki tingkat ketebalan yang tinggi bila dibandingkan dengan cetakan kuningan dari daerah lain. Dengan memiliki tingkat ketebalan yang bagus maka panas yang dihasilkannya dapat lebih lama serta lebih merata. Pada dekade berikutnya, mulai terdapat sentuhan inovasi dan diversifikasi produk kuningan.

Hal tersebut terlihat dari semakin beragamnya hasil produk yang dihasilkan. Saat ini, kerajinan kuningan telah menggunakan peralatan/mesin produksi derngan sentuhan teknologi tepat guna. Demikian juga dalam prosesnya kini, kerajinan kuningan telah melalui sentuhan finishing pada hasil akhir berupa pewarnaan dengan air brush, penggunaan anti gores serta menggunakan gerinda untuk proses pemerataan permukaan produk akhir. Beberapa produk yang dihasilkan antara lain paidon, bokor, peralatan rias manten, patung binatang dan lain-lain.

Kini, kerajinan tersebut masih tetap eksis di tengah pelbagai tantangan yang semakin besar. Khususnya tantangan regenerasi yang menjadi nafas keberlangsungan kerajinan ini di kemu-

dian hari. Di samping tantangan regenerasi, tantangan lain juga berasal dari sulitnya mendapatkan bahan baku kuningan yang berkualitas tinggi.

Karena itu, pemerintah terus mendorong agar produk kerajinan kuningan terus diletarikan. Salah satunya dengan meningkatkan rasa cinta dan bangga terhadap produk kerajinan kuningan Bondowoso yang kualitasnya bernilai tinggi.

Di samping itu, salah satu upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah Bondowoso dalam menjaga eksistensi kerajinan kuningan adalah peningkatkan kemampuan SDM para perajin. Pemerintah mendorong agar para perajin dibekali kemampuan yang memadai demi menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Sebab di tengah persaingan pasar yang kopetitif, kualitas menjadi aspek yang paling diperhitungkan.

Menjaga Industri Tape Bondowoso

TAPE menjadi salah satu produk unggulan khas Bondowoso. Secara turun temurun, industri tape terus hidup dan menjadi salah satu denyut nadi perekonomian daerah. Sebagai branding kota, tape tidak lagi sekedar menjadi produk makanan khas daerah, tetapi juga ikon budaya lokal Bondowoso.

Pamerintah Kabupaten Bondowoso memberikan perhatian serius bagi pengembangan industri tape Bondowoso. Bersama dengan pengembangan produksi kopi, industri tape diletakkan sebagai sektor utama karena keduanya menjadi *trademark* daerah.

Pemerintah dengan berkolaborasi bersama pelaku usaha tape, bekerja keras untuk menjaga keberlangsungan industri makanan yang berbahan utama ubi kayu ini. Terutama di era perdagangan saat ini, di mana persaingan semakin tinggi, sehingga mutu produk tape Bondowoso harus terus ditingkatkan.

Bondowoso menjadi salah satu sentral penghasil tape dengan cita rasa yang tidak ada duanya. Karena itu, permintaan pasar terhadap tape Bondowoso terus mengalir, meski di saat bersamaan beberapa daerah lain juga memproduksi tape. Cita rasa khas tape Bondowoso terletak pada rasa manisnya yang khas, serta mampu bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama.

Dikutip dari sumber Bappeda Bondowoso tahun 2016, tercatat sebanyak 177 IKM yang bergerak di industri tape. Seluruh IKM tersebut tersebar di 10 kecamatan yang merupakan sentra penghasil tape, yaitu Binakal, Wringin, Bondowoso, Jambesari, Botolinggo, Wonosari, Maesan, Pujer, Sukosari dan Tapen.

Volume produksi tape Bondowoso cukup besar. Perhari, rata-rata 1,5 ton ubi kayu dihabiskan untuk pembuatan tape. Dengan hari kerja selama lima hari dalam seminggu, maka kebutuhan terhadap ubi kayu sebagai bahan dasar tape mencapai 360 ton setiap tahunnya.

Besarnya kebutuhan pelaku usaha tape terhadap ubi kayu, menjadi persoalan tersendiri dalam pengembangan industri tape. Sebab, ada tren menurunnya lahan pertanian ubi kayu, yang justru paradoks dengan permintaan ter-

hadap tape yang semakin meningkat. Sebagai catatan, pada tahun 2017, luas panen ubi kayu mencapai 2.342 hektar, menurun dari tahun 2016 yang masih menyerap 3.860 hektar (Bappeda, 2018).

Saat ini, sentra penghasil ubi kayu sebagai bahan dasar tape Bondowoso tersebar di 11 kecamatan dari 23 kecamatan di Bondowoso, yaitu Kecamatan Wringin, Pakem, Binakal, Tegalampel, Taman Krocok, Klabang, Prajekan, Botolinggo, Cermee, Tamanan dan Jambesari DS.

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jember (2017), ada beberapa strategi yang dapat digunakan dalam pengembangan ubi kayu di Kabupaten Bondowoso yang menjadi bahan dasar pembuatan tape. *Pertama*, memperluas akses kredit murah bagi petani ubi kayu. *Kedua*, memperluas kemitraan antara petani ubi kayu dengan industri berbahan baku ubi kayu. *Ketiga*, memperkuat konstruksi triple helix antara Petani/pengusaha ubi kayu, pemerintah daerah dan Akademisi. *Keempat*, menfasilitasi perdagangan online sehingga dapat memperluas akses dan rentang pemasaran juga sekaligus memperpendek mata rantai perdagangan. *Kelima*, menyusun IG untuk ubi kayu Bondowoso. *Keenam*, menyusun *schedule* masa tanam yang sesuai sehingga akan berdampak pada peningkatan harga jual dan dapat meningkatkan keuntungan petani ubi kayu.

Di samping itu, tantangan lain yang dihadapi oleh industri tape adalah masih tradisionalnya pengelolaan tape Bondowoso. Karena itu, pemerintah mendorong agar dilakukan inovasi untuk menjadikan usaha pembuatan tape sebagai mata pencaharian pokok bukan sekedar usaha sampingan.

Bupati Amin Said Husni berharap tapa Bondowoso terus dikembangkan dan tidak tergerus oleh sektor usaha lain. Bagaimanapun, tape adalah produk lokal yang telah berlangsung lama dan karenanya menjadi penting untuk terus dirawat eksistensinya sebagai identitas daerah. Bupati berkomitmen untuk memberikan proteksi agar tape Bondowoso bisa terus berkembang dan mampu berkontribusi semaki produktif bagi kemajuan daerah.

AMIN SAID HUSNI
Bondowoso
Republik Kopi
BRK
Bondowoso
Republik Kopi
BRK
Bondowoso
Republik Kopi

Membangun dengan Totalitas

TOTALITAS. Demikianlah rumus yang bisa kita sarikan dari sepak terjang Drs. H. Amin Said Husni selama menjadi Bupati Bondowoso.

Dua periode amanah memimpin kota Gerbong Maut jatuh ke tangannya. Itu bermakna kepercayaan masyarakat kepadanya demikian besar. Dan kepercayaan itu dibayar lunas oleh bupati Amin Said Husni dengan bekerja keras membawa perubahan besar bagi Kabupaten Bondowoso.

Dengan energi besarnya, Amin Said Husni memimpin Bondowoso dengan 'berlari'. Karena Bondowoso harus mengejar ketertinggalan dan mengukir kemajuan. Sepuluh tahun berjalan, kini Bondowoso bukan lagi kabupaten yang tertatih-tatih.

Bondowoso kini adalah kabupaten yang penuh energi dan inovasi. Semua komponen tentu layak diapresiasi. Karena masing-masing telah memberikan kontribusi.

Namun apresiasi terbesar tidak salah jika ditujukan kepada bupati. Sebagai pemimpin, tongkat komando bupatilah yang mengorkestrasi ritme kerja berbagai elemen di bawahnya. Karena itu, keberhasilan masing-masing elemen kerja bergerak sebagai satu tim, tergantung kecakapan bupati sebagai pemimpin.

Jika merujuk kepada ungkapan John Maxwell *"the leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way" (pemimpin adalah seseorang yang mengetahui cara, menjalankan cara, dan menunjukkan cara)*, maka jejak kepemimpinan Bupati Amin Said Husni -dalam batas tertentu- dapat dijadikan representasi.

Tentu tidak ada yang sempurna. Demikianlah rumus kehidupan yang abadi. Maka perjalanan Bupati Amin Said Husni juga digeluti ketidaksempurnaan.

Ketidaksempurnaan tidak selalu memiliki konotasi negatif. Karena ia justru menjadi alasan kenapa regerenasi memiliki arti. Generasi berikutnya itulah yang akan menyempurnakan apa yang belum kafi.

Kita berharap, semoga Bondowoso dalam kesinambungan suksesi, akan mengalami gradasi yang senantiasa meninggi. Sehingga cita-cita mewujudkan negeri yang *gemah ripah loh jinawi* atau *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur* akan terealisasi.

Akhirnya, doa khusus marilah kita tujukan untuk kemajuan Bondowoso Republik Kopi. Doa ini adalah energi yang memiliki daya tinggi, dan dampaknya akan menjadi semakin dahsyat jika berhasil dikolaborasi dengan kerja keras dan totalitas untuk mengabdi. Jayalah selalu Bondowoso Republik Kopi!

Tentang Pak Bupati

Drs. H. Amin Said Husni, lahir di Pamekasan pada tanggal 19 Agustus 1966. Lulusan S-1 Fakultas Syari'ah Institut Keislaman Hasyim Asy'ari Jombang ini pernah menjabat sebagai Sekjen GP Anshor masa bakti 1995-2000. Karirnya di bidang politik dimulai sejak beliau menjadi Anggota DPR RI periode 1994-2004 dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) dari daerah pemilihan (dapil) 3 Bondowoso, Banyuwangi, dan Situbondo.
Beliau kembali menjadi anggota DPR RI periode 2004-2009 dari Partai dan dapil yang sama. Bupati Bondowoso 2 periode ini (2008-2013 dan 2013-2018) didampingi oleh istri tercinta Hj. Ny. Faizah dan ketiga putranya Kavin Rabbany, Fayruz Aquilla, dan Rayda Zhavira.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso (2017). Kabupaten Bondowoso dalam Angka 2017. Bondowoso: BPS Kabupaten Bondowoso.

Candra Fajri Ananda (2018). Pembangunan Ekonomi daerah: Dinamika dan strategi Pembangunan. Malang: UB Press

David Horth & Dan Buchner (2014). Innovation LeadershipHow to use innovation to lead effectively, work collaboratively, and drive result. Continuum.

Dodik Harnadi (2016). Living Law dan Mekanisme Resistensi atas UU Perlindungan Anak di Kabupaten Bondowoso (tesis). Surabaya: Universitas Airlangga.

Kuntowijoyo (2017). Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agaris Madura 1850-1940. Yogyakarta: IRCiSoD.

Marsudin HS. dal*am , pada tanggl 7 Maret 2015 di kediaman beliau, Desa Walidono Kecamatan Prajekan Bondowoso*

Max Weber (1968). On Charisma and Institution-Building, dalam Selected Papers oleh S.N. Eisenstadt. Chicago and London: University of Chicago Press.

Pendopo Bupati Kabupaten Bondowoso (2016). Daftar nama Bupati Bondowoso dari period ke periode.

Peter Ferdinand Drucker (2018). The Effective Executive. London : Routledge

Soerjono Soekanto (2014). Pokok-pokok Sosiologi Hukum. Depok: Rajagrafindo

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Jakarta.

Surepno. 2015. Kunci Sukses dan Peran Strategis Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual. *Jurnal Dinamika Akuntansi*. Vol 7 Nomor 2.

Tresnawati, F dan Apandi, RNN. 2016. Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada Kementerian/Lembaga Republik Indonesia). *Jurnal Akuntansi Riset*. Vol 5 Nomor 2.

Setyawati, Heny. 2017. Strategi Pencapaian Opini WTP Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam Penerapan Standar Akuntasi Pemerintahan Berbasis Akrual. *Bisma Jurnal Bisnis dan Manajemen*. Vol 11 Nomor 3.

Mardiasmo, 2004. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit ANDI, Yogyakarta.

LAN dan BPKP, 2000. Akuntabilitas dan *Good Governance (Modul Sosialisasi SAKIP). Modul 1 dari 5. Jakarta: LAN.*

Michael Todaro. 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jakarta : Erlangga

Paul Wehr & Otomar Bartos. 2002. Using Conflict Theory. Cambridge: Cambridge University Press

Mujamil Qamar. 2002. Pesantren : Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi. Jakarta:Erlangga

Masdar Farid Mas'udi. 2010. Pajak itu Zakat: Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat. Yogyakarta: Mizan

BPS Kabupaten Bondowoso. 2017. Kabupaten Bondowoso dalam Angka. Bondowowo. BPS Kabupaten Bondowoso.

Tim Penulis

PENANGGUNG JAWAB:

Drs. H. Amin Said Husni (Bupati Bondowoso)
Drs. KH. Salwa Arifin (Wakil Bupati Bondowoso)

DEWAN PENGARAH:

Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso,
Asisten I Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso
Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Bondowoso
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

TIM PENULIS:

Dodik Harnadi
Suheri
Faqih Yahullahbi
Siddik

EDITOR AHLI

H. Moh. Syaeful Bahar
Yatimul Ainun
H. Khairul Anwar
H. Samsul Tahar

GRAFIS LAYOUT:

M. Rizki Septiadi

FOTOGRAFER:

Dhany Hermawan CR
Mohadi
Edy Suwito
H. Samsul Tahar

SUMBER PUBLIKASI:

TIMES INDONESIA NETWORK
BAPEDDA KABUPATEN BONDOWOSO

ISBN: 978-602-97507-6-9

BRK
Bondowoso
Republik Kopi

Bondowoso Republik Kopi

Pak Amin ini Sukses membangun Bondowoso, dulu saya menugaskan pak Amin Said yang dulunya di Jakarta. Sebelum dipimpin pak Amin, Bondowoso ini adalah daerah paling miskin di Jawa Timur, tapi sekarang sudah berada di tengah, ada kemajuan yang luar biasa.

Pak Amin Said Husni sebagai kader NU dan PKB luar biasa, telah mampu memajukan Bondowoso dengan tangan dingin pak Amin, saat ini Bondowoso luar biasa. Jadi pak Amin ini kader PKB yang layak jadi menteri. Setelah habis masa jabatannya sebagai bupati, nantinya H Amin Said Husni sebagai kader terbaik NU dan PKB akan ditarik lagi ke Jakarta.

A. Muhaimin Iskandar - Ketua Umum DPP PKB

BONDOWOSO

SWASTHI - BHUWANA KRTA